



**REVISI
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2013 – 2018**



**MAKASSAR
2015**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN	
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN SULSEL	
BAB I. PENDAHULUAN.....	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN SULSEL	
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	7
2.2. SUMBER DAYA	10
2.3. KINERJA PELAYANAN	27
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN.....	37
BAB III. ISU – ISU STRATEGIS	
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUPOKSI SKPD	39
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	40
3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA	42
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	43
3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS	46
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1. VISI DAN MISI	47
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	48
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	53
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINE RJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	55
BAB VI. INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	86

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga revisi (penyesuaian) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 sesuai perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Rencana Strategis ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Kesehatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membantu Gubernur Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan urusan Kesehatan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah bekerja optimal dan sungguh-sungguh serta seluruh pihak yang turut membantu dalam penyusunan Renstra ini.

Demikian Renstra ini disusun dan diharapkan dapat memperoleh masukan, saran dan kritik membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan 5 (lima) tahun mendatang dengan harapan dapat terwujud visi pembangunan kesehatan “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”.

Makassar, Desember 2015

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Dr.dr.H. Rachmat Latief, SpPD, KPTI,M.Kes, FINASIM
Pangkat : Pembina Utama
NIP : 19590204 198511 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (Lansia) dan keluarga miskin.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahap II dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 mengamanatkan bahwa Pembangunan Kesehatan adalah bagian integral dari Pembangunan Nasional.

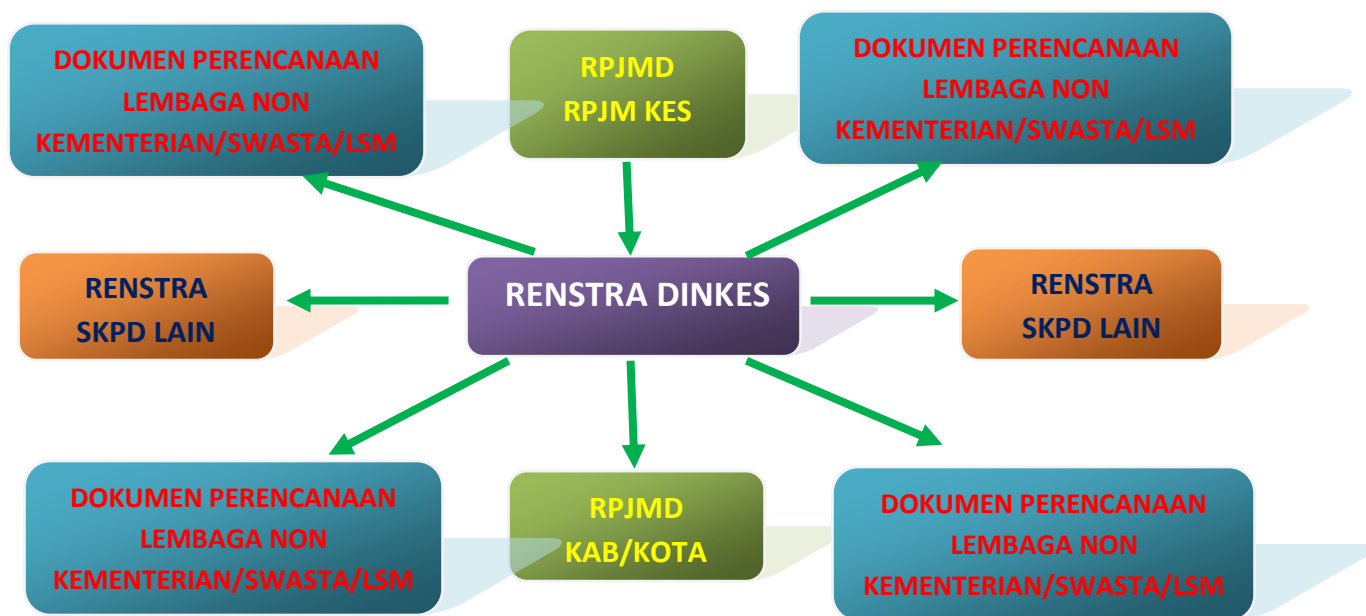
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan dokumen perencanaan yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang bersifat indikatif dan akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2013 – 2018, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI.

Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memberikan arah dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun, dan berperan sangat penting dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan penyusunan Rencana Strategis Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan sistem perencanaan melalui pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*.

Rencana Strategis ini merupakan Renstra yang direvisi atau disesuaikan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 berdasarkan Perda Perubahan RPJMD Tahun 2013 – 2018 Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2015.

Hubungan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan bahwa secara vertikal, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJM Bidang Kesehatan dan menjadi acuan/pedoman bagi RPJMD Kabupaten/Kota, kemudian secara horizontal Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi acuan/pedoman terhadap dokumen perencanaan dinas-dinas terkait serta lembaga teknis lainnya, sedangkan secara diagonal dapat menjadi acuan dokumen perencanaan bagi Sektor Swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Non Kementerian.



1.2. Landasan Hukum

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya sebagaimana dijelaskan berikut ini :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI)
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 - 2014
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 32/MENKES/SK/I/2013 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010 - 2014

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan lingkungan strategis.

2. Tujuan

Rencana Strategis ini memiliki tujuan antara lain :

- 2.1. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesehatan.
- 2.2. Sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
- 2.3. Memudahkan pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 2.4. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 khususnya pada Lampiran/Buku IV tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- B. Sumber Daya SKPD
- C. Kinerja Pelayanan SKPD
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- A. Visi dan Misi SKPD
- B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- C. Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

➤ Tugas dan Fungsi

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan meliputi pelayanan kesehatan, pembinaan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pembinaan kesehatan masyarakat, serta pembinaan sumber daya tenaga kesehatan dan teknologi kesehatan
2. Penyelenggaraan urusan sosial dan pelayanan umum di bidang kesehatan meliputi pembinaan pelayanan kesehatan, pembinaan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pembinaan kesehatan masyarakat, serta pembinaan sumber daya kesehatan dan teknologi kesehatan
3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang kesehatan meliputi pembinaan pelayanan kesehatan, pembinaan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pembinaan kesehatan masyarakat, serta pembinaan sumber daya tenaga kesehatan dan teknologi kesehatan
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari :

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan umum dan program, penyediaan data dan informasi kesehatan, monitoring dan evaluasi program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan surat menyurat, humas dan protokol, perpustakaan serta hukum kesehatan
2. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan pengembangan dan penunjang
3. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengendalian penyakit dan kejadian luar biasa, pengamatan penyakit menular dan tidak menular, penanganan korban bencana dan situasi khusus serta kegiatan penyehatan lingkungan
4. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan kesehatan keluarga (ibu, anak dan lanjut usia), upaya pelayanan gizi masyarakat serta pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (individu dan kelompok)
5. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan upaya pembiayaan dan jaminan kesehatan, upaya pengembangan tenaga kesehatan dan pelaksanaan upaya farmasi dan perbekalan kesehatan

➤ Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan (YANKES) :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang
4. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) :
 - a. Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra
 - b. Seksi Penanggulangan Penyakit
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan
5. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat (KESMAS) :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga
 - b. Seksi Gizi Masyarakat
 - c. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Kesehatan :
 - a. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
 - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan
 - c. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
 - a. Akademi Keperawatan (AKPER) Anging Mammiri
 - b. Balai Kesehatan Kulit Kelamin dan Kosmetika
 - c. Unit Transfusi Darah (UTD)
 - d. Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM)
 - e. Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Sumber Daya

Gambaran mengenai situasi sumber daya kesehatan dapat dilihat melalui tiga hal yaitu sarana kesehatan, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan.

A. SARANA KESEHATAN

Sarana Kesehatan antara lain puskesmas, rumah sakit, sarana produksi dan distribusi farmasi dan alat kesehatan, sarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), institusi pendidikan tenaga kesehatan serta pembiayaan kesehatan.

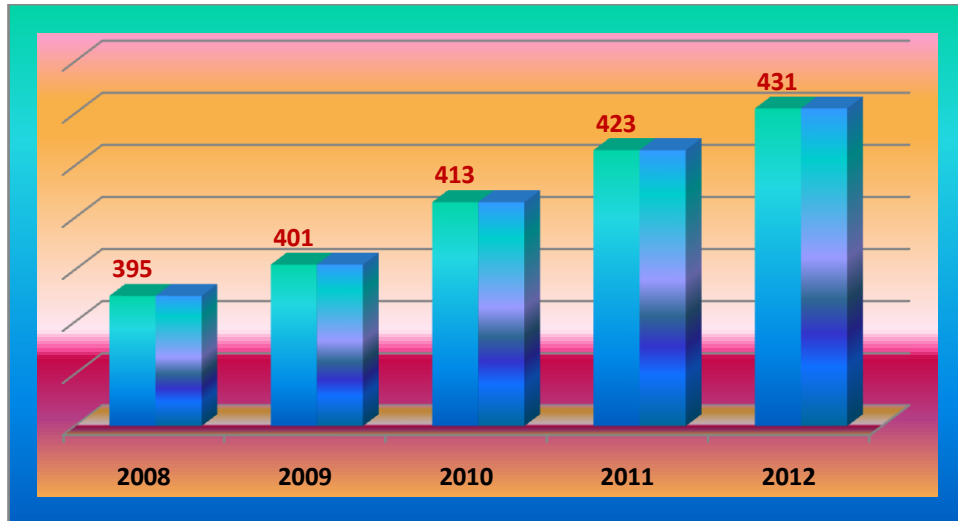
1. Puskesmas

Puskesmas adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan.

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis kesehatan di bawah supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Secara umum, mereka harus memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif baik melalui upaya kesehatan perorangan (UKP) atau upaya kesehatan masyarakat (UKM). Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan. Hal ini disepakati oleh puskesmas dan dinas kesehatan yang bersangkutan. Dalam memberikan pelayanan di masyarakat, puskesmas biasanya memiliki sub unit pelayanan seperti puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, pos kesehatan desa maupun pos bersalin desa (polindes).

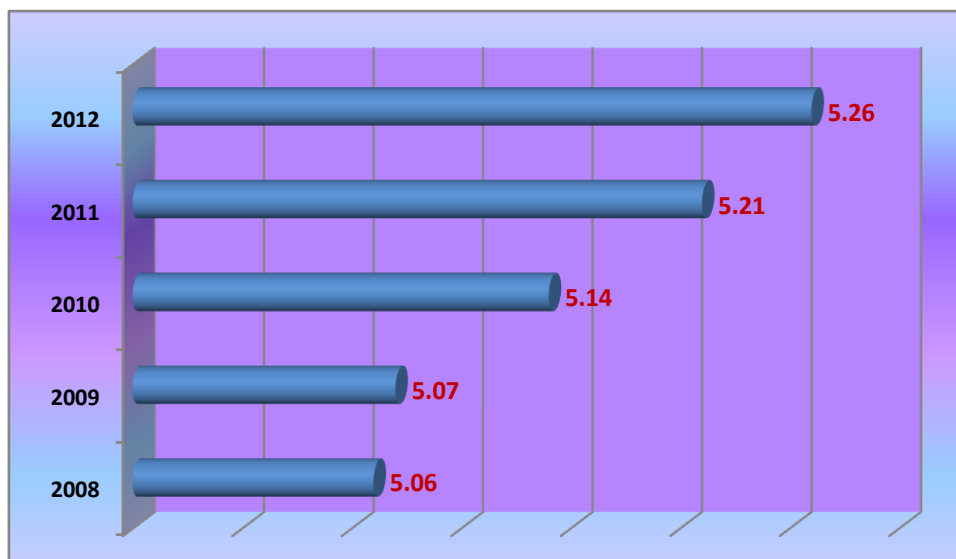
Puskesmas di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami perkembangan yang cukup baik, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah puskesmas setiap tahun. Perkembangan puskesmas dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini :

GAMBAR 1
PERKEMBANGAN JUMLAH PUSKESMAS DI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2012



Berdasarkan data yang ada, sejak tahun 2008 - 2012 rasio puskesmas per 100.000 penduduk mengalami peningkatan dan saat ini rasio-nya mencapai 5,26 yang berarti bahwa setiap 100.000 penduduk Sulawesi Selatan rata-rata dilayani oleh 5-6 Puskesmas, sebagaimana tampak pada gambar 2 di bawah ini :

GAMBAR 2
RASIO PUSKESMAS PER 100.000 PENDUDUK DI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2012

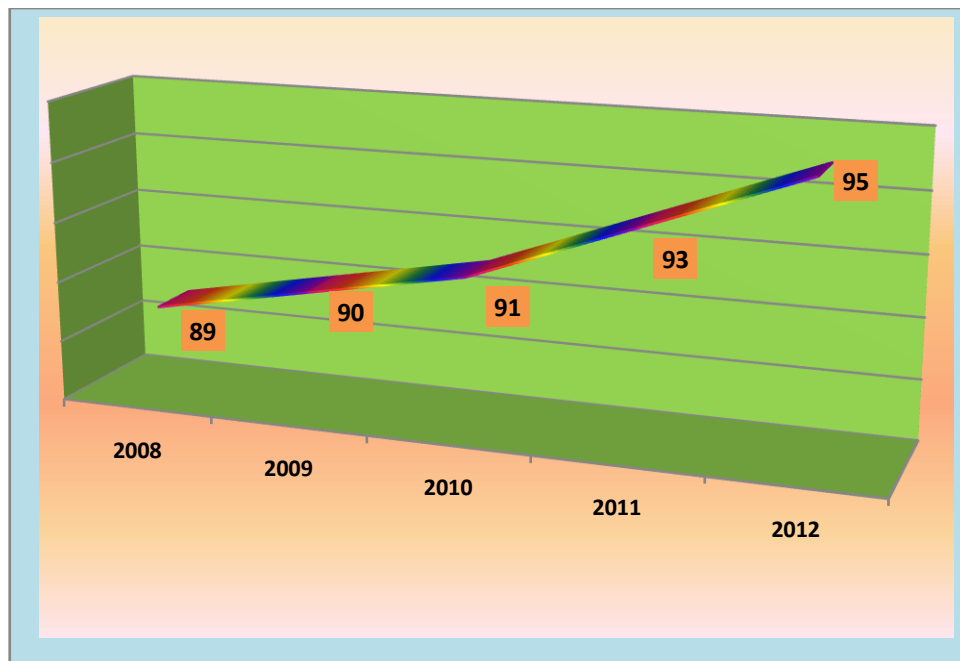


2. Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan pada masyarakat yang bergerak dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif serta berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan ruang lingkup pembangunan kesehatan selain upaya promotif dan preventif. Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana rumah sakit antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang biasanya diukur dengan jumlah rumah sakit dan tempat tidurnya serta rasionya terhadap jumlah penduduk.

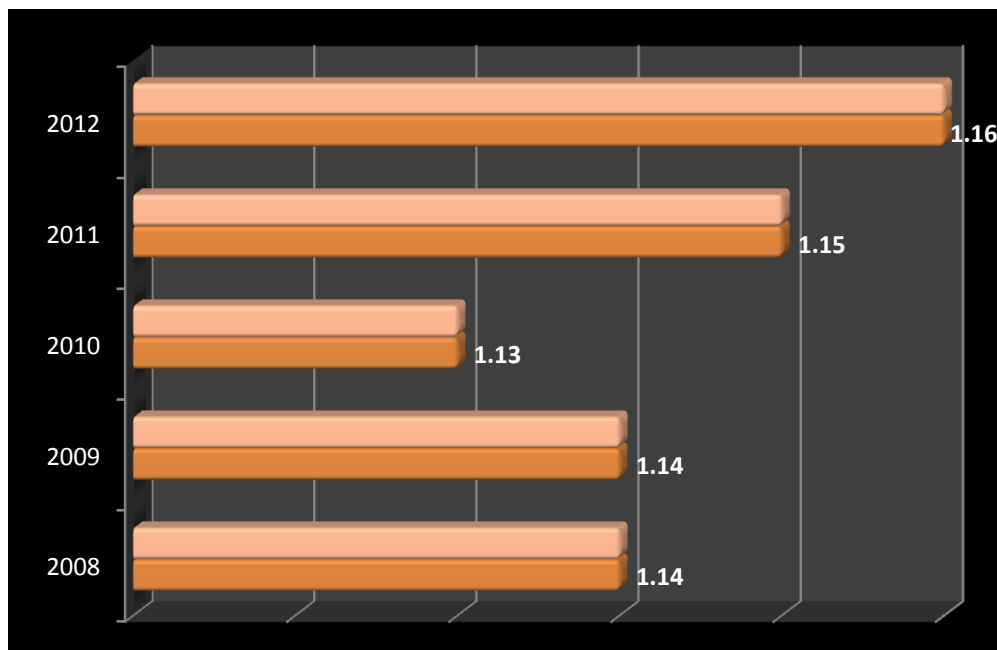
Pada tahun 2008-2012, jumlah Rumah Sakit terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini :

GAMBAR 3
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT DI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008-2012



Rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk dapat menggambarkan ketersediaan rumah sakit pada satu wilayah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Perkembangan rasio rumah sakit terhadap 100.000 penduduk sejak tahun 2008-2012 dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini :

GAMBAR 4
RASIO RUMAH SAKIT PER 100.000 PENDUDUK DI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008-2012



3. Sarana Produksi, Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Salah satu indikator penting untuk menggambarkan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan adalah jumlah sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pada tahun 2008 jumlah sarana distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan sebanyak 483 apotek dan toko obat 344, pada tahun 2009 tercatat sebanyak 503 apotek dan 368 toko obat sedangkan pada tahun 2010 tercatat sebanyak 504 apotek, toko obat 283 dan pada tahun 2011 tercatat 518 apotek dan 115 toko obat, sebanyak 31 sarana Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK), 59 Sarana Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK), 94 Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF), 32 Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), 12 Sarana Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), 1 Sarana Industri Obat Tradisional (IOT), dan 1 Sarana Produksi Kosmetik.

Di kabupaten/kota, distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah dikelola oleh unit pengelola obat, dahulu disebut sebagai gudang farmasi kabupaten. Adapun jumlah unit pengelola obat (ex gudang farmasi) kabupaten/kota pada tahun 2008 di Sulawesi Selatan tercatat sebanyak 24.

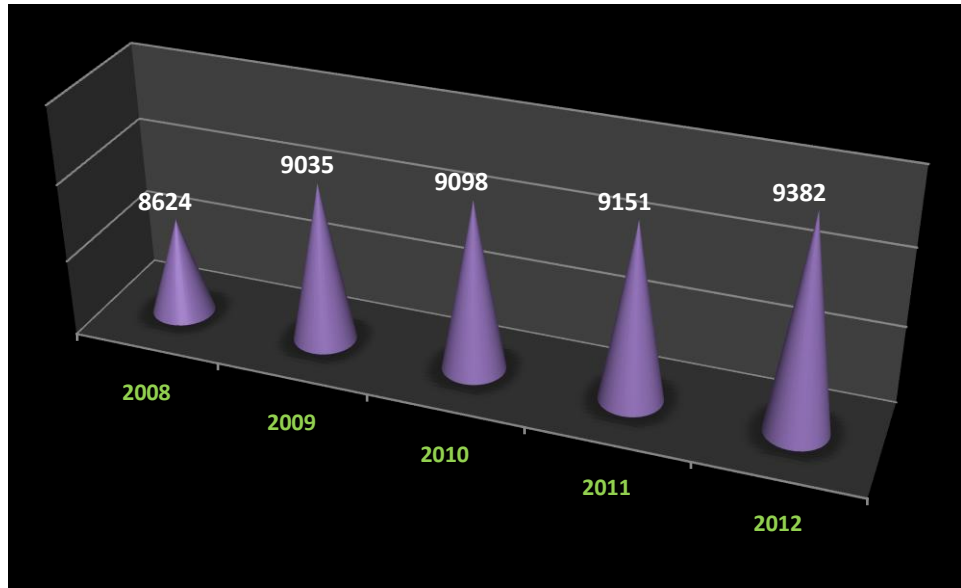
4. Sarana Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

Dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada di masyarakat. Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) di antaranya adalah Posyandu, Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), Polindes (Pondok Bersalin Desa), Toga (Tanaman Obat Keluarga), POD (Pos Obat Desa), Pos UKK (Pos Upaya Kesehatan Kerja), Desa Siaga dan sebagainya.

Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling dikenal di masyarakat. Posyandu menyelenggarakan minimal lima program prioritas, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare. Untuk memantau perkembangannya, posyandu dikelompokkan ke dalam empat strata, yaitu Posyandu Pratama, Posyandu Madya, Posyandu Purnama dan Posyandu Mandiri.

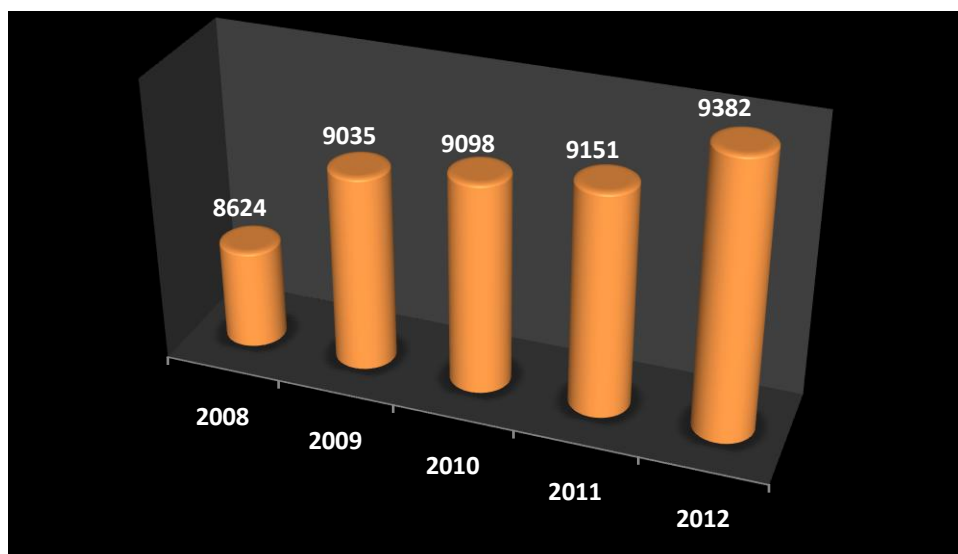
Jumlah posyandu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini sangat positif karena akan memudahkan masyarakat menerima pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara langsung. Perkembangan jumlah posyandu sejak tahun 2008-2012 dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini :

GAMBAR 5
JUMLAH POSYANDU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2012



Di samping itu, banyaknya jumlah posyandu yang melayani balita di suatu wilayah dapat dilihat melalui rasio posyandu per 1.000 balita. Pada tahun 2008-2012, perkembangan rasio posyandu cenderung stabil. Hal ini dapat dilihat pada gambar 6 di bawah ini :

GAMBAR 6
RASIO POSYANDU PER 1.000 BALITA DI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008–2012



5. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Poskesdes dapat dikatakan sebagai sarana kesehatan yang merupakan pertemuan antara upaya-upaya masyarakat dan dukungan pemerintah.

Pelayanannya meliputi upaya-upaya promotif, preventif dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya.

Poskesdes juga diharapkan sebagai pusat pengembangan atau revitalisasi berbagai UKBM lain yang dibutuhkan masyarakat desa (misalnya Warung Obat Desa, Kelompok Pemakai Air, Arisan Jamban Keluarga, dan lain-lain). Dengan demikian, poskesdes juga berperan sebagai koordinator UKBM-UKBM tersebut.

Salah satu kriteria desa siaga adalah memiliki satu poskesdes. Jumlah poskesdes tercatat pada Profil Kesehatan Indonesia tahun 2008 sebanyak 11.287 unit sementara hasil pengumpulan data tahun 2008, jumlah poskesdes di Sulawesi Selatan sebanyak 881 unit, pada tahun 2009 meningkat sebesar 1.004 unit, pada tahun 2010 meningkat menjadi 1.433 unit dan pada tahun 2011 meningkat 1.435 unit dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 1.517 unit.

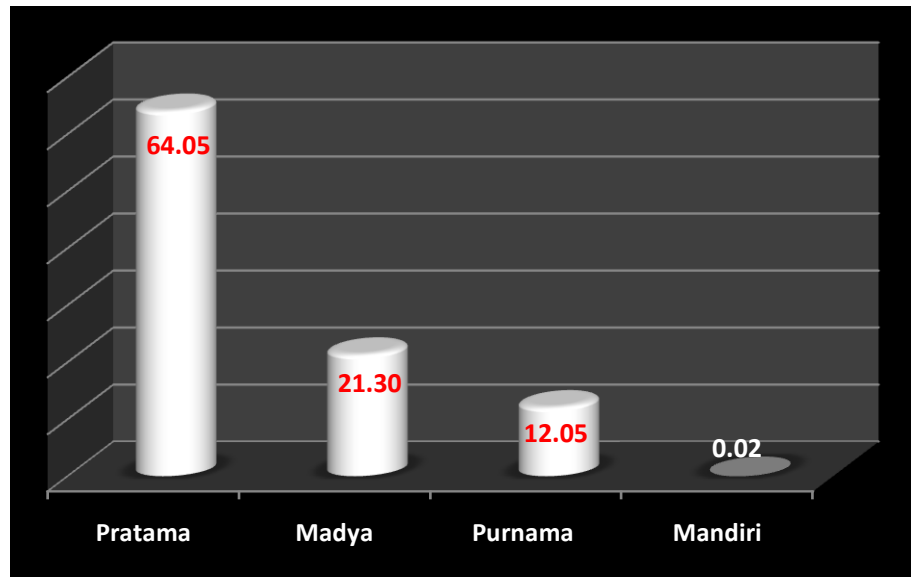
6. Desa Siaga

Desa Siaga adalah suatu kondisi masyarakat tingkat desa yang memiliki kemampuan dalam menemukan permasalahan yang ada, kemudian merencanakan dan melakukan pemecahannya sesuai potensi yang dimilikinya, serta selalu siap siaga dalam menghadapi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan.

Desa Siaga juga dapat merupakan pengembangan dari konsep Siap-Antar- Jaga, sehingga diharapkan pada gilirannya akan menjadi Desa Siaga dan selanjutnya Desa Sehat yang dilengkapi komponen-komponen yaitu dikembangkannya pelayanan kesehatan dasar dan UKBM, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di kalangan masyarakat, diciptakannya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kegawatdaruratan dan bencana, serta sistem pembiayaan kesehatan yang berbasis masyarakat.

Persentase Desa Siaga Aktif tahun 2012 dapat dilihat pada gambar 7 berikut ini :

GAMBAR 7
PERSENTASE DESA SIAGA AKTIF
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2012



B. TENAGA KESEHATAN

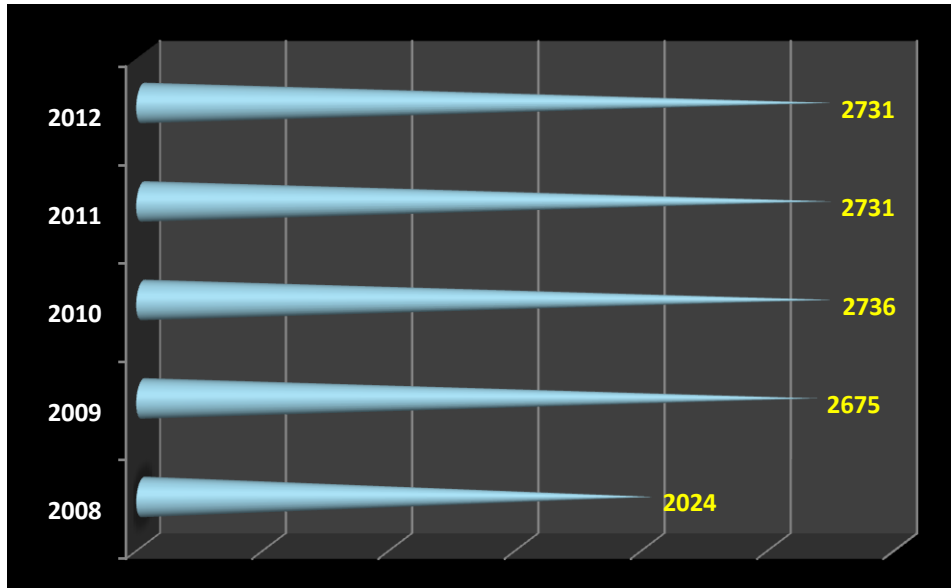
Saat ini, jumlah tenaga kesehatan di Sulawesi Selatan yang tercatat melalui Profil Kesehatan Kabupaten/Kota pada tahun 2011 sebanyak 22.234 orang (pegawai kesehatan) dengan proporsi tenaga kesehatan yang terbesar adalah perawat 42,38% (9.422), bidan 17,26% (3.837 orang), kemudian medis sebesar 13,58% (3.020 orang). Sedangkan jumlah tenaga khusus dalam lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan hingga akhir 2011 berjumlah 1.287 orang.

1. Tenaga Medis

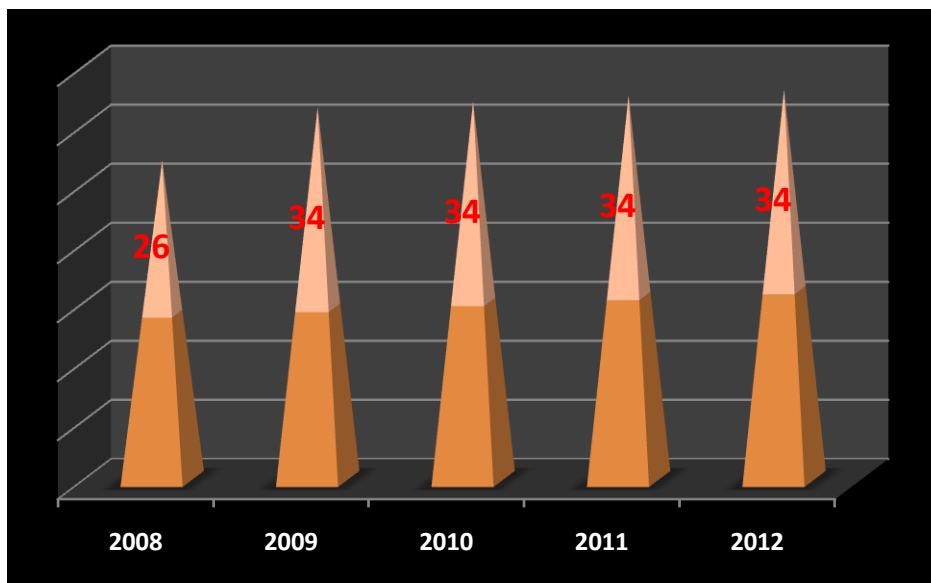
Tenaga medis adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan dokter keluarga. Hingga tahun 2011 di Sulawesi Selatan tercatat jumlah tenaga medis sebanyak 2.731 orang dengan rasio 34 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio masing-masing tenaga medis per 100.000 penduduk adalah rasio dokter spesialis sebesar 12,48 per 100.000 penduduk, rasio dokter umum 14,31 per 100.000 penduduk dan rasio dokter gigi sebesar 6,86 per 100.000 penduduk.

Jumlah dan rasio tenaga medis dapat dilihat pada gambar 8 dan gambar 9 di bawah ini :

GAMBAR 8
JUMLAH TENAGA MEDIS DI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2012



GAMBAR 9
RASIO TENAGA MEDIS DI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2012



2. Tenaga Kefarmasian dan Gizi

Tahun 2011, tenaga kefarmasian telah berjumlah 1,222 orang dengan rincian : Apoteker dan sarjana farmasi sebanyak 627 orang atau 51,30% dari seluruh tenaga farmasi atau 5,50% dari total tenaga di Sulawesi Selatan, D-III Farmasi dan Asisten Apoteker sebanyak 567 orang. Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk yaitu 12,33% per 100.000 penduduk.

Sementara itu, jumlah tenaga gizi hingga tahun 2011 di Sulawesi Selatan sebanyak 863 orang dengan rasio sebesar 9,00 per 100.000 penduduk.

3. Tenaga Keperawatan

Tenaga keperawatan adalah Perawat dan Bidan. Rasio tenaga keperawatan di Sulawesi Selatan hingga tahun 2011 sebesar 104,58 per 100.000 penduduk. Namun bila dirinci menurut jenisnya maka di Sulawesi Selatan, pada tahun yang sama tercatat jumlah perawat sebanyak 9.422 orang terdiri dari sarjana keperawatan (17,22%) dan perawat sebesar 82,77% dari jumlah keseluruhan tenaga perawat. Proporsi tenaga perawat 42,38% dari seluruh tenaga kesehatan.

Jumlah tenaga bidan sebanyak 3.837 orang atau dengan proporsi sebesar 17,26% dari seluruh tenaga kesehatan, sementara rasio tenaga bidan per 100.000 penduduk adalah sebesar 42,95 per 100.000 penduduk.

4. Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Sanitasi

Jumlah tenaga Kesehatan Masyarakat di Sulawesi Selatan dari hasil pengumpulan profil kesehatan tahun 2007 tercatat sebanyak 1.143 orang dengan rasio sebesar 14,98 per 100.000 penduduk dan untuk tenaga sanitasi tercatat sebanyak 580 orang dengan rasio sebesar 7,60 per 100.000 penduduk dan tahun 2008 tercatat jumlah tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 886 dengan rasio sebesar 11,40 per 100.000 penduduk dan untuk tenaga sanitasi tercatat sebanyak 496 orang dengan rasio 6,38 per 100.000 penduduk, sedangkan pada tahun 2009 tercatat jumlah tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 1.393 dengan rasio sebesar 16,72 per 100.000 penduduk dan untuk tenaga sanitasi tercatat sebanyak 6,14 per 100.000 penduduk.

Dan pada tahun 2011 jumlah tenaga kesehatan masyarakat tercatat 2.075 orang dengan rasio sebesar 16,65% dari 100.000 penduduk dan adapun jumlah tenaga sanitasi yang dilaporkan sebanyak 571 orang dengan rasio sebesar 5,66% per 100.000 penduduk.

5. Tenaga Teknisi Medis

Tenaga teknisi medis terdiri dari analis laboratorium, TEM (Teknisi Elektro Medis), Pranata Anestesi (seorang yang ahli melakukan anestesi bius), sebelum pasien dirawat di puskesmas, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan. Adapun jumlah tenaga teknisi medis yang dilaporkan sebanyak 1.028 orang dengan rasio sebesar 11,76 per 100.000 penduduk. Sedangkan fisiotherapis yaitu seorang therapis yang mengobati kecelakaan atau disfungsi dengan latihan dan pengobatan fisik lainnya pada bagian tubuh yang mengalami kerusakan (di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana lain), adapun jumlah tenaga fisitherapis sebanyak 196 orang dengan rasio sebesar 2,07% per 100.000 penduduk.

C. PEMBIAYAAN KESEHATAN

Dalam rangka menggambarkan situasi pembiayaan kesehatan di Sulawesi Selatan, berikut ini akan diuraikan tentang pembiayaan kesehatan oleh pemerintah yaitu mengenai alokasi Anggaran Pembangunan Nasional (APBN) dan alokasi APBD kabupaten/kota untuk kesehatan, dan juga uraian tentang salah satu wujud pembiayaan kesehatan oleh masyarakat yaitu mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan.

1. Anggaran Pembangunan Kementerian Kesehatan

Pada tahun 2008 anggaran dekosentrasi yang dialokasikan di Sulawesi Selatan secara keseluruhan sebanyak Rp. 101.178.788.250,- yang terdiri dari Rupiah murni 66.594.109.000,-, RM pendamping sebanyak Rp. 5.042.188.00,- dan RK sebanyak 29.542.491.250,-.

Sementara untuk tahun 2009 anggaran dekonsentrasi rupiah murni Rp.42.777.766.000,- RM pendamping sebanyak 6.299.715.000,-, dan PHLN sebanyak Rp. 19.185.877.000,- dengan realisasi secara keseluruhan sebesar 35.731.504.694,- (52,34%) sedangkan Dana DAK pelayanan dasar alokasi sebesar Rp.179.570.490.585,- realisasi sebesar Rp.160.667.403.805,- (89,47), alokasi dana DAK pelayanan rujukan sebesar 34.553.908.444,- dan realisasi sebesar Rp.33.272.894.483,- (89,47%).

Pada tahun 2010 total anggaran dekosentrasi sebanyak 71.672.244.000.- terdiri dari rupiah murni sebanyak Rp. 20.830.104.000.-, RM pendamping sebanyak 11.111.992.000.-, dan PHLN sebanyak Rp.39.730.148.000.-, dan adapun total realisasi sebanyak 59.270.291.068.- yang terdiri dari rupiah murni sebanyak Rp.18.571.478.775.-, RM pendamping sebanyak Rp.7.035.430.550.-, dan PHLN sebanyak 33.663.381.743.-.

Total anggaran dekosentrasi pada tahun 2011 sebanyak Rp.45.625.550.000,- terdiri dari rupiah murni dan RM Pendamping sebanyak Rp. 25.796.369.000.-, dan PHLN sebanyak Rp.19.829.181.000.-, dan adapun total realisasi sebanyak 36.097.404.361.- (79,12%), yang terdiri dari rupiah murni dan RM pendamping sebanyak Rp.19.892.839.299.- (77,11%), dan PHLN sebanyak 16.204.565.062.- (81,72%).

2. Anggaran Pembangunan Daerah

Alokasi pembiayaan kesehatan tahun 2010 sebesar Rp. 28.965.343.952.- terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 16.935.343.952 dan belanja tidak langsung sebesar 12.030.000.000,- dengan jumlah realisasi keseluruhan sebesar Rp.28.147.708.276 (97,18%) yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp.16.513.215.377.- (97,51%) dan belanja tidak langsung sebesar Rp.11.634.492.939.- (96.71%).

Pada tahun 2011 alokasi pembiayaan kesehatan sebesar 29.022.576.587.-, terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 14.258.798.200.- dan belanja tidak langsung sebesar 14.763.778.387.- dengan jumlah realisasi keseluruhan sebesar Rp. 28.267.200.444.-, yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 13.757.785.802,- (96,49%) dan belanja tidak langsung sebesar Rp.14.509.414.642.- (98.28%).

Tahun 2012 alokasi pembiayaan kesehatan sebesar 44.336.004.642.-, terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 28.244.240.000.- dan belanja tidak langsung sebesar 16.091.764.642.- dengan jumlah realisasi keseluruhan sebesar Rp. 38.899.964.647.-, yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 22.859.769.478,- (80.94%) dan belanja tidak langsung sebesar Rp.16.040.195.169.- (99,68%).

Sementara tahun 2013 alokasi pembiayaan kesehatan sebesar 27.480.221.515,-, terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 10.200.000.000- dan belanja tidak langsung sebesar 17.280.221.515,- dengan rincian pembiayaan program sebagai berikut :

NO	PROGRAM	JUMLAH DANA	KETERANGAN
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.437.810.000	
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.949.981.000	
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	204.050.000	
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	950.730.000	
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	82.425.000	
6	PENGADAAN OBAT, PERALATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	301.820.000	
7	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	575.800.000	
8	PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA	34.680.000	
9	PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	506.000.000	
10	PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	195.000.000	
11	PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	300.000.000	
12	STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	1.066.704.000	
13	KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	36.375.000	
14	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	35.000.000	
15	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	45.000.000	
16	KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	115.000.000	
17	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR	995.000.000	
18	PENINGKATAN KESEHATAN BAYI DAN ANAK	80.000.000	
19	JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT	288.625.000	
TOTAL		10.200.000.000,-	

3. Pembiayaan Kesehatan oleh Masyarakat

Sejak lama sudah dikembangkan berbagai cara untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Pada saat ini berkembang berbagai cara pembiayaan kesehatan praupaya, yaitu dana sehat, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja (Astek)/Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan asuransi jiwa lain. Untuk penduduk miskin disediakan Kartu Jamkesmas, sehingga mereka tidak perlu membayar pelayanan kesehatan yang digunakannya (karena telah dibayar oleh pemerintah).

Namun demikian, cakupan atau kepesertaan masyarakat terhadap berbagai jaminan pembiayaan kesehatan ini masih sangat rendah. Menurut data dari profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2011, masyarakat yang tercakup jaminan pembiayaan kesehatan baru 93,58%, sebagian besar tercakup dalam Askes, kemudian kartu Jamkesmas, Jamsostek dan asuransi lain.

4. Pembiayaan Kesehatan Gratis

Salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Program tersebut berjalan sejak bulan Juli 2008. Kepesertaan pelayanan kesehatan gratis ini diperuntukkan bagi seluruh penduduk Sulawesi Selatan yang belum mempunyai jaminan kesehatan yang berasal dari program lain dan memiliki kartu identitas sebagai penduduk Sulawesi Selatan.

Pelayanan Kesehatan Gratis pada masyarakat diberikan sesuai fungsi dan kemampuan sarana, prasarana dan tenaga kesehatan yang ada di setiap tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dan diberikan sesuai dengan indikasi medik. Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pelayanan kesehatan tingkat dasar dan pelayanan kesehatan tingkat lanjut.

Pelayanan kesehatan tingkat dasar berupa Rawat Jalan Tingkat Dasar (RJTD), Rawat Inap Tingkat Dasar (RITD) dan penanganan gawat darurat yang diberikan di Puskesmas dan jaringannya.

Pelayanan kesehatan tingkat lanjut berupa Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) dan penanganan gawat darurat yang diberikan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) milik Pemerintah yang telah ditunjuk.

Sedangkan pelayanan pada kasus gawat darurat (emergency), seluruh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) milik Pemerintah wajib memberikan pelayanan tanpa terlebih dahulu meminta kartu identitas korban/pasien.

Kunjungan peserta kesehatan gratis di Sulawesi Selatan pada tahun 2010 berdasarkan laporan dari Pokja Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, untuk rumah sakit sebanyak 164.211 orang (rawat jalan) dan 55.902 orang (rawat inap), dan untuk puskesmas sebanyak 5.916.136 orang dan 53.366 orang (rawat inap).

Penyerapan dana kesehatan gratis yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 168.436.558.053,- dan terealisasi sebesar 139.749.638.221 (70,25%). Data tentang kesehatan gratis secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL
JUMLAH KUNJUNGAN PESERTA KESEHATAN GRATIS DI PUSKESMAS
DAN RUMAH SAKIT DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KUNJUNGAN				
		Rawat Jalan	Rawat inap	UGD	Rujukan yang diterima	Dirujuk
1	2	6	7	8	9	10
1	KAB. SELAYAR	249,354	1,240	1,262	4,630	36
2	KAB. BULUKUMBA	59,597	287	-	614	-
3	KAB. BANTAENG	147,584	3,677	1,150	4,380	-
4	KAB. JENEPONTO	137,283	3,726	2,572	8,062	513
5	KAB. TAKALAR	233,695	4,150	245	2,379	41
6	KAB. GOWA	21,090	5,588	9,113	-	-
7	KAB. SINJAI	0	0	-	0	-
8	KAB. MAROS	63,234	2,397	1,445	6,233	446
9	KAB. PANGKEP	190,800	5,844	1,583	17,993	3,505
10	KAB. BARRU	48,113	1,908	1,335	3,272	1,010
11	KAB. BONE	308,330	6,387	3,715	45,572	365
12	KAB. SOPPENG	253,983	4,183	479	9,078	20
13	KAB. WAJO	262,199	4,313	844	3,944	60
14	KAB. SIDRAP	246,934	3,644	332	8,979	37
15	KAB. PINRANG	224,996	8,936	2,207	4,137	-
16	KAB. ENREKANG	55,335	534	-	566	-
17	KAB. LUWU	90,679	1,109	-	2,621	4,657
18	KAB. TANA TORAJA	139,060	2,858	1,396	3,135	2,460
19	KAB. LUWU UTARA	119,794	5,860	3,053	10,710	137
20	KAB. LUWU TIMUR	328,185	8,566	2,770	21,995	10
21	TORAJA UTARA	113,861	1,489	-	764	-
22	KOTA MAKASSAR	17,612	63	0	1,233	0
23	KOTA PALOPO	101,580	324	-	25,083	100
24	KAB. PAREPARE	110,780	4,746	2,014	1,316	79
UPT PROVINSI						
1	RSU HAJI MAKASSAR	2,939	-	1,642	-	13
2	RSB PERTIWI	223	472	560	560	-
3	RSIA FATIMAH	2,175	-	324	2,175	24
4	BK3A	1,967	-	-	-	-
5	BP PELAYANAN GIMUL	4,586	-	-	2,346	-
6	RSU LABUANG BAJI	22,073	3,218	863	12,709	87
UPT PUSAT						
1	RSU TAJUDDIN CHALID	680	-	141	680	133
2	RS DR. W. SUDIROHUS ODO	1,823	-	1,236	-	-
3	BKMM/BKIM	2,967	-	-	2,967	34
4	BBKPM/BP4	3,393	-	20	3,393	-
TOTAL		3,566,904	85,519	40,301	211,526	13,767

Sumber : Sekretariat Pokja Kesehatan Gratis

TABEL
JUMLAH, REALISASI DAN SISA DANA KESEHATAN GRATIS YANG
BERSUMBER APBD PROVINSI DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011

N0	KABUPATEN/KOTA	KLAIM (Rp)	REALISASI (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	KAB. SELAYAR	3,057,311,682	3,057,311,682
2	KAB. BULUKUMBA	1,307,662,000	897,081,800
3	KAB. BANTAENG	2,397,747,950	2,364,961,281
4	KAB. JENEPONTO	3,343,194,250	3,336,054,250
5	KAB. TAKALAR	3,672,621,898	2,076,013,760
6	KAB. GOWA	4,840,658,619	4,363,176,095
7	KAB. SINJAI	0	0
8	KAB. MAROS	4,649,367,368	3,795,940,639
9	KAB. PANGKEP	7,151,944,775	4,360,561,937
10	KAB. BARRU	2,736,170,551	2,736,170,551
11	KAB. BONE	17,383,722,966	17,011,443,011
12	KAB. WAJO	9,713,687,519	9,713,687,519
13	KAB. SOPPENG	8,988,367,090	7,153,456,532
14	KAB. SIDRAP	4,892,709,529	4,801,758,926
15	KAB. PINRANG	9,244,286,868	9,171,544,231
16	KAB. ENREKANG	486,482,600	486,482,600
17	KAB. LUWU	3,239,699,900	3,239,699,900
18	KAB. TANA TORAJA	3,805,686,825	3,437,995,117
19	KAB. LUWU UTARA	12,485,186,949	11,572,875,074
20	KAB. LUWU TIMUR	33,951,812,453	22,216,837,012
21	TORAJA UTARA	1,944,320,000	1,944,320,000
22	KOTA MAKASSAR	248,837,000	248,837,000
23	KAB. PAREPARE	4,541,354,069	3,902,820,288
24	KOTA. PALOPO	1,209,079,500	765,580,000
	UPT PROVINSI		
1	RSU LABUANG BAJI	7,562,830,849	7,146,621,143
2	RSU HAJI MAKASSAR	431,308,397	431,308,397
3	RSB PERTIWI	1,148,088,450	1,148,088,450
4	RSIA FATIMAH	2,465,354,492	2,465,354,492
5	BK3A	291,155,200	291,155,200
6	BP PELAYANAN GIMUL	353,914,700	353,914,700
	UPT PUSAT		
1	RSU TAJUDDIN CHALID	134,286,913	106,041,843
2	RS DR. W. SUDIROHUSODO	5,819,176,778	2,815,542,999
3	BKMM/BKIM	516,683,003	516,683,003
4	BBKPM/BP4	332,759,306	332,759,306
	TOTAL	164,347,470,449	138,262,078,738

Sumber : Sekretariat Pokja Kesehatan Gratis

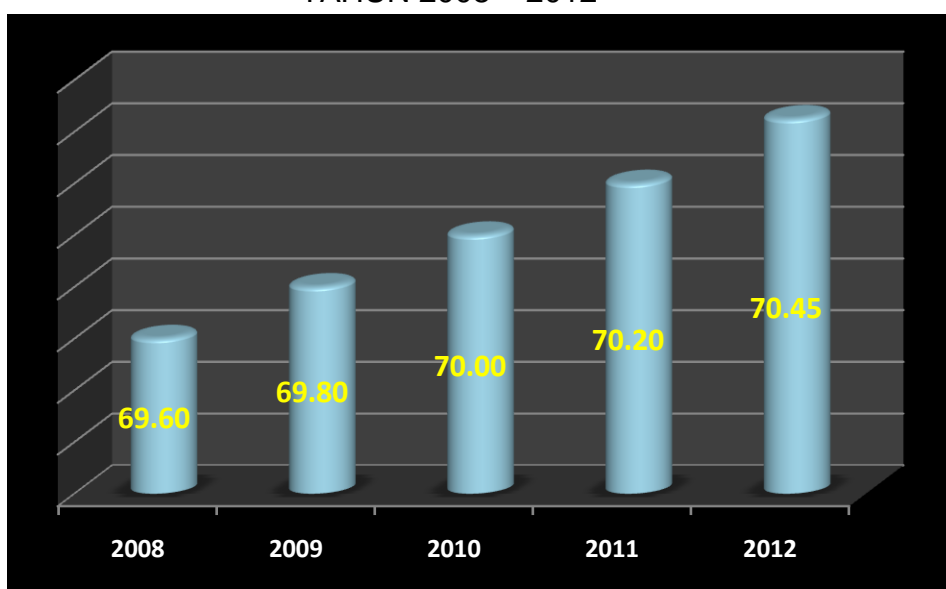
C. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat melalui pencapaian 4 Indikator Utama Bidang Kesehatan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Status Gizi (Gizi Buruk dan Gizi Kurang), serta Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Disamping itu, kita juga harus berkomitmen untuk mewujudkan tercapainya tujuan Millenium Development Goals (MDGs).

1. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) bermanfaat untuk mengetahui berapa lama orang dapat hidup sejak dari usia tertentu. Jika umur harapan hidup tinggi, itu menunjukkan tingkat taraf hidup suatu negara juga tinggi, begitupun sebaliknya. Umur harapan hidup penduduk di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada gambar 10 di bawah ini :

GAMBAR 10
UMUR HARAPAN HIDUP DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2012



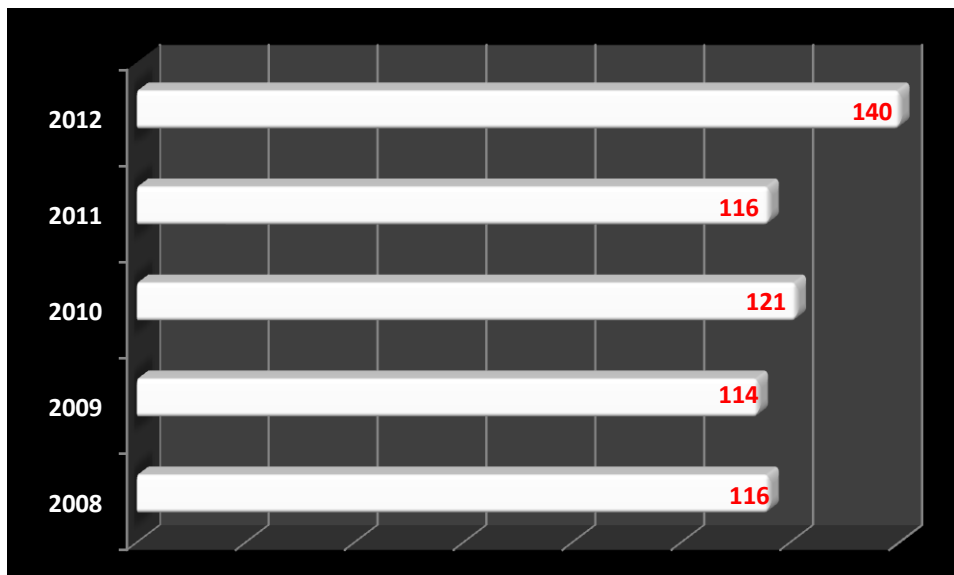
Umur harapan hidup di Sulawesi Selatan sejak tahun 2008-2012 terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan sumber daya manusia termasuk pembangunan bidang kesehatan di Sulawesi Selatan.

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas.

Angka Kematian Ibu (AKI) diperoleh melalui berbagai survey yang dilakukan secara khusus seperti survey di Rumah Sakit, beberapa survey di masyarakat dengan cakupan wilayah yang terbatas, Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) serta Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). SKRT dan SDKI merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan RI. Oleh karena itu, dalam hal ini hanya akan disajikan data jumlah kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai gambar 11 berikut ini :

GAMBAR 11
JUMLAH KEMATIAN IBU (KASUS) DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 - 2012



Selama 5 (lima) tahun ini, jumlah kematian ibu mengalami fluktuasi penurunan dan peningkatan kasus. Kecenderungan peningkatan kasus dipengaruhi oleh faktor teknis dan non teknis, termasuk validitas pelaporan yang dikirimkan oleh Kabupaten/Kota.

Monitoring/evaluasi dan Audit Maternal Perinatal terhadap kasus-kasus kematian ibu perlu ditingkatkan di semua level pemerintahan dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

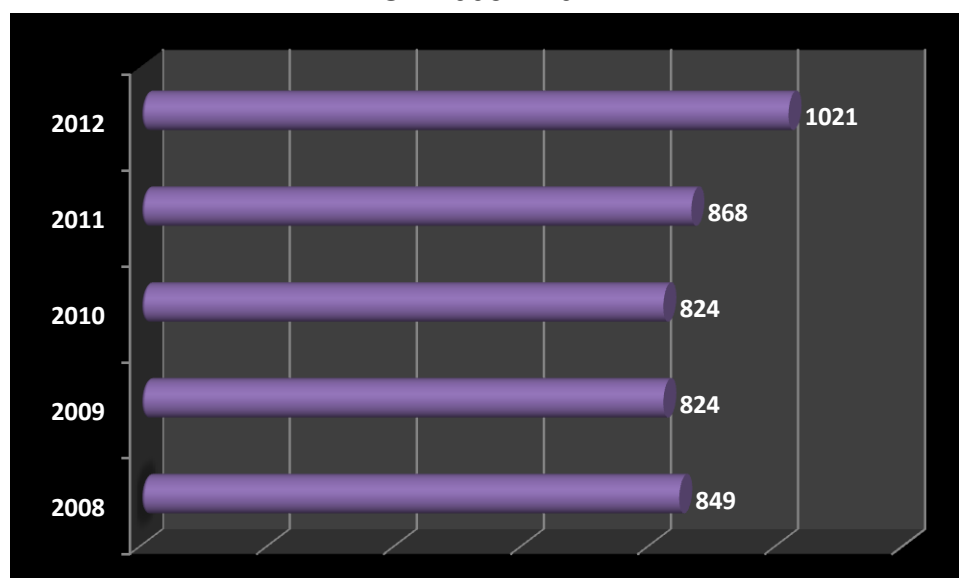
Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu ini telah dilakukan berbagai upaya antara lain melalui Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan pendekatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi, Asuhan Persalinan Normal, Audit Maternal Perinatal dan sebagainya, namun upaya tersebut masih harus ditingkatkan dan lebih difokuskan pada kabupaten/kota yang memiliki kasus kematian ibu yang tinggi, serta dari aspek responsif gender disadari bahwa perlu melibatkan peran laki-laki/suami terhadap berbagai upaya, program ataupun kegiatan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu.

3. Angka Kematian Bayi (AKB)

Infant Mortality Rate atau Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah yang bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk pemeliharaan kesehatannya. AKB cenderung lebih menggambarkan kesehatan reproduksi. AKB relevan dipakai untuk memonitor pencapaian target program karena mewakili komponen penting pada kematian balita.

Sebagaimana Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi ini juga dapat diperoleh melalui survey yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI. Sementara, untuk jumlah kematian bayi di Sulawesi Selatan tahun 2008-2012 dapat digambarkan sebagai berikut :

GAMBAR 12
JUMLAH KEMATIAN BAYI (KASUS) DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2012



Selama 5 (lima) tahun ini, jumlah kematian bayi mengalami fluktuasi penurunan dan peningkatan kasus. Kecenderungan peningkatan kasus dipengaruhi oleh faktor teknis dan non teknis, termasuk validitas pelaporan yang dikirimkan oleh Kabupaten/Kota. Monitoring dan evaluasi terhadap kasus-kasus kematian bayi perlu ditingkatkan di semua level pemerintahan dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam upaya menurunkan angka kematian bayi ini telah dilakukan berbagai upaya antara lain melalui Program Peningkatan Kesehatan Bayi dan Anak melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Neonatal, Manajemen Terpadu Balita Sakit dan lain sebagainya, namun upaya tersebut masih harus ditingkatkan dan lebih difokuskan pada kabupaten/kota yang memiliki angka kematian bayi yang tinggi, serta dari aspek responsif gender disadari bahwa perlu melibatkan peran laki-laki/suami terhadap berbagai upaya, program ataupun kegiatan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi.

4. Status Gizi

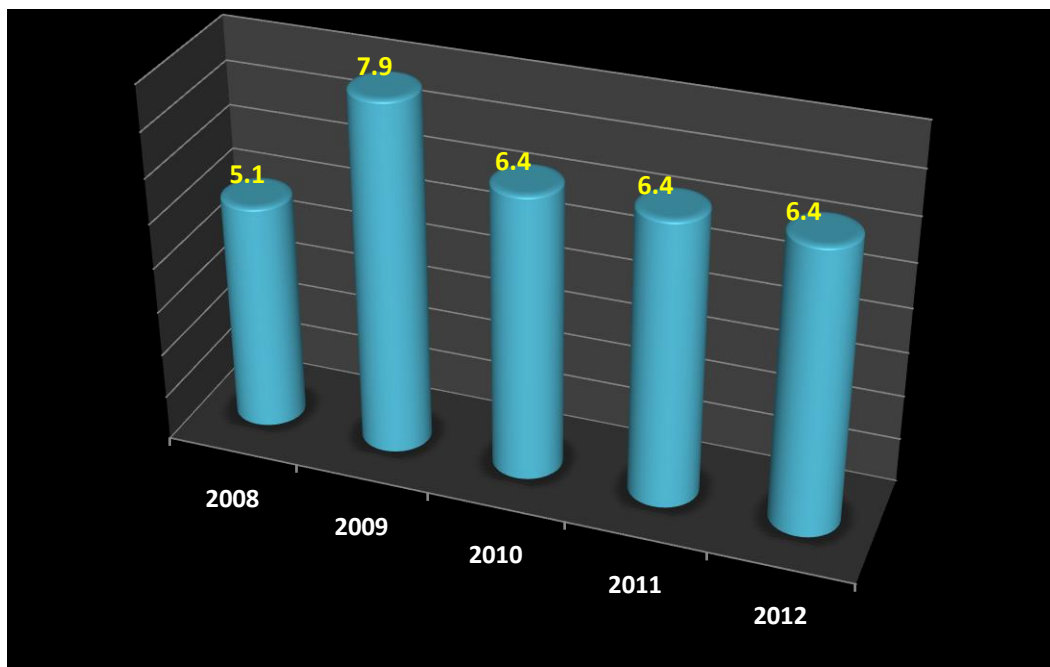
Status gizi seseorang sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena selain sebagai faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung juga dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan individual. Bahkan Status Gizi janin dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil, Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan Anemia pada WUS yang akan berpotensi melahirkan Bayi BBLR, serta status gizi Ibu menyusui.

Tolok ukur yang mencerminkan status gizi masyarakat adalah status gizi pada anak balita yang diukur berat badan dan tinggi badannya kemudian dibandingkan dengan baku rujukan WHO (2005). Selain itu keadaan gizi masyarakat juga dapat diketahui dari besarnya masalah kekurangan gizi mikro pada kelompok rentan yaitu Gangguan Akibat Kekurangan iodium (GAKI), Anemia Gizi Besi (AGB) dan Kekurangan Vitamin A (KVA).

Berikut ini adalah gambaran status gizi balita yaitu Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Prevalensi Balita Gizi Kurang.

Prevalensi balita gizi buruk sejak tahun 2008-2012 cenderung mengalami penurunan walaupun capaiannya di tahun 2011 sebesar 6,4% masih belum mencapai target sebesar <5% dan pada tahun 2015 akan diturunkan hingga 2%, sebagaimana ditampilkan pada gambar 13 berikut ini :

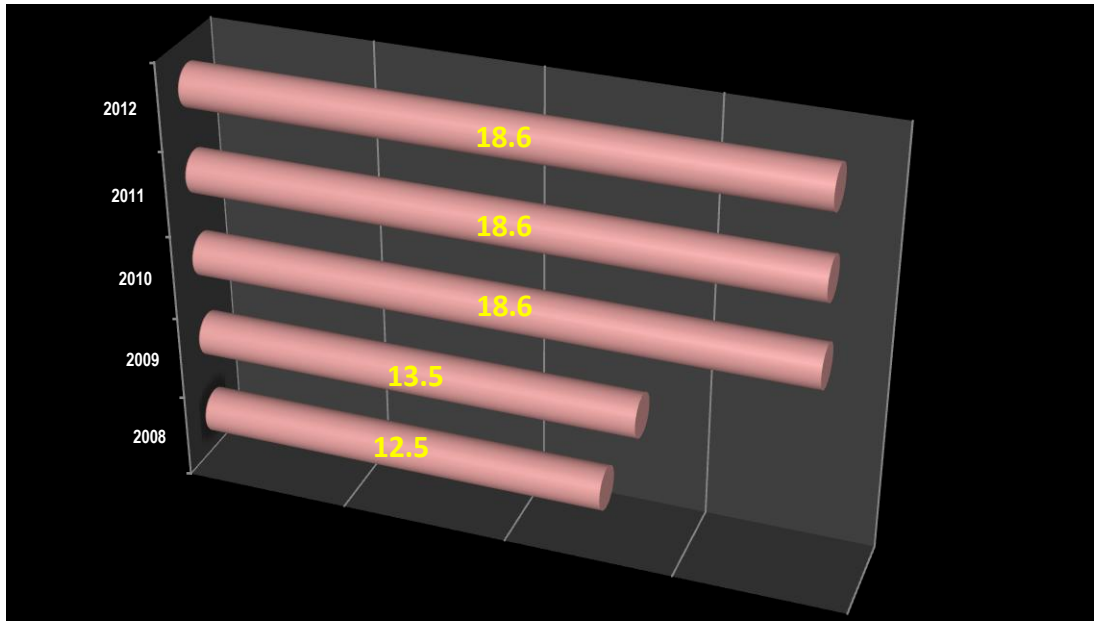
GAMBAR 13
PREVALENSI BALITA GIZI BURUK DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2012



Sementara prevalensi balita gizi kurang sejak tahun 2008-2012 cenderung mengalami peningkatan dan pada tahun 2015 akan diturunkan hingga mencapai 8%.

Prevalensi balita gizi kurang tahun 2008-2012 dapat dilihat pada gambar 14 di bawah ini :

GAMBAR 14
PREVALENSI BALITA GIZI BURUK DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2012



Gambaran pelayanan sektor kesehatan juga dapat dinilai dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan sebagai ukuran minimal pelayanan kesehatan yang harus diberikan kepada masyarakat.

Standar pelayanan minimal terdiri dari :

PELAYANAN KESEHATAN DASAR

1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
3. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki
4. Cakupan Pelayanan Nifas
5. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
6. Cakupan Kunjungan Bayi
7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
8. Cakupan Pelayanan Anak Balita
9. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin
10. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

11. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
12. Cakupan Peserta KB Aktif
13. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Acute Flacid Analysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 Tahun
14. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit – Penemuan Penderita Pneumonia Balita
15. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit – Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif
16. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit – Penderita DBD yang Ditangani
17. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit- Penemuan Penderita Diare
18. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

19. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
20. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota

PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB

21. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

22. Cakupan Desa Siaga Aktif

Pencapaian indikator SPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
1	% Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95%			78%	80%	82%	84%	90%	81,35	84,47	86,62	90,6	92,0	81,35	105,5	105,6	108,0	102,3
										%	%	%	0%	7%	%	9%	3%	0%	0%
2	% Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	80%			33%	36%	39%	41%	65%	116,3	50,27	48,88	52,60	57,3	116,1	139,6	125,3	128,0	88,20
										%	%	%	%	3%		4%	3%	0%	%
3	% Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	90%			77%	79%	81%	83%	89%	82,5	83,3	85,9	92,1	93,6	82,5	106,	106,	111,	105,
										4%	8%	6%	7%	8%	4	18%	12%	00%	26%
4	% Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	90%			75,5	78,4	81,3	84,2	85%	92,7	20,0	67,1	84,9	88,2	92,7	114,	82,5	101,	103,
					7%	5%	4%	3%		0%	6%	1%	6%	8%		80%	0%	00%	86%
5	% Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani	90%			84,3	84,4	84,5	84,7	60%	79,5	16,1	91,7	90,5	56,7	79,5	19,0	108,	107,	94,5
					1%	5%	9%	2%		1%	0%	3%	6%	0%	1	6%	44%	00%	0%
6	% Cakupan Kunjungan Bayi	90%			80,0	82,0	84,0	86,0	86%	76,3	64,9	54,0	81,8	99,4	76,3	79,1	64,3	95%	115,
					9%	7%	6%	4%		1%	9%	6%	4%	6%	1	9%	1%		65%
7	% Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%			90%	95%	100	100	90%	79,9	83,2	83,2	83,2	87,1	79,9	87,5	83,2	83,	96,7
							%	%		0%	0%	0%	0%	0%		8%	0%	%	8%
8	% Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%			38,0	48,4	58,8	69,2	81%	31,1	10,4	41,3	82,6	77,6	31,1	21,6	70,2	133,	95,8
					3%	2%	2%	1%		4%	6%	2%	9%	3%	4	0%	0%	00%	4%
9	% Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	100%			69,8	75,8	81,8	87,9	-	71,9	60,4	75,8	88%	-	71,9	79,6	92,6	100	-
					1%	5%	9%	2%		8%	3%	5%		8	7%	%	%		
10	% Cakupan Balita Gizi Buruk Melakukan	100%			68,5	74,8	81,1	87,4	100	85,3	100	100	87,4	100	85,3	133,	123,	100	100
					0%	0%	0%	0%	%	7%	%	%	0%	%	7	69%	30%	%	%

	Perawatan																
11	% Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	100%	59,7	67,7	75,8	83,8	92%	13,8	48,2	55,0	91,9	88	13,8	71,1	72,9	110,	95,6
			2%	7%	3%	9%		4%	1%	3%	4%	%	4	4%	0%	00%	5%
12	% Cakupan Peserta KB Aktif	70%	63,6	64,8	66,1	67,4	63%	66,7	69,7	56,4	68,7	64,7	66,7	92,1	85,2	102,	102,
			1%	9%	7%	4%		9%	8%	3%	2%	5%	9	3%	0%	00%	78%
13	% Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit-Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 Tahun		1104					2,26					0,00				
			897					%					2				
14	% Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit-Pneumonia Balita	100%	9249					78,6					78,6				
								2%					2				
15	% Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit-Penemuan Pasien Baru TB BTA +	100%	6452	100	55%	55%	51,1			55%	56	51,1			100	98	%
				%			9%				%	9			%		
16	% Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit-Penemuan Penderita DBD yang Ditangani	100%	6452	100	55%	55%	100			55%	56	51,1			100	98	%
				%			%				%	9			%		
17	% Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit-Penemuan Penderita Diare	100%	6452	100	55%	55%	27,4			55%	56	51,1			100	98	%
				%			1%				%	9			%		
18	% Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			%	%	%	%	%		%	%	%	%	%	%	%	%	%

	Miskin																	
19	% Cakupan	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	Kesehatan																	
	Rujukan Pasien																	
	Masyarakat																	
	Miskin																	
20	% Cakupan	100%	62,5	68,8	75%	81,3	100	33,3	68,8	75%	100	100	33,3	100	100	123	100	
	Pelayanan		0%	0%		0%	%	3%	0%		%	%	3	%	%	%	%	%
	Gawat Darurat																	
	Level 1 yang																	
	harus Diberikan																	
	Sarana																	
	Kesehatan (RS) di																	
	Kabupaten/Kota																	
21	%	100%	94,7	96,6	97,4	98,3	100	78,7	100	100		100	78,7	103,	102,		100	
	Desa/Kelurahan		7%	2%	7%	1%	%	8%	%	%		%	8	50%	60%		%	
	Menganalisis																	
	KLB yang																	
	Dilakukan																	
	Penyelidikan																	
	Epidemiologi <																	
	24 Jam																	
22	% Desa Siaga	80%	44,6	53,6	64,3	77,2	88,8	45,9	73,1	63%	68,4	88,7	45,9	136,	97,8	89%	99,4	
	Aktif		9%	3%	6%	3%	1%	1%	1%		8%	3%	1	32%	9%		6%	

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa trend realisasi SPM sudah cukup baik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun beberapa indikator masih perlu ditingkatkan realisasi pencapaiannya seperti Persentase Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani, Persentase Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani dan Persentase Cakupan Pelayanan Anak Balita.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Hingga saat ini, seluruh unsur yang terlibat dalam sektor kesehatan telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut, namun masalah kesehatan tidak menjadi tanggung jawab tunggal sektor kesehatan, banyak sektor lain yang diperlukan keterlibatannya dalam ikut menjaga dan mewujudkan tercapainya derajat kesehatan masyarakat, antara lain sektor Pendidikan, Agama, Pertanian/Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, Transmigrasi dan Pemukiman, Kelautan, Peternakan dan sektor lainnya.

Tantangan lainnya adalah perkembangan globalisasi yang menghilangkan batas antar wilayah dan antar Negara. Perkembangan sistem pelayanan kesehatan dunia yang sangat pesat, tidak dapat dihindari akan memasuki pasar pelayanan kesehatan di Indonesia dan menggeser sistem pelayanan kesehatan di negara kita yang tidak sesuai dengan kondisi kekinian.

Dengan adanya globalisasi, seluruh tenaga kesehatan (Medis, Paramedis dan Non Medis) dituntut untuk memiliki kemampuan yang handal dan prima dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Sejalan dengan tingginya tuntutan tersebut, sarana dan prasarana kesehatan dari level terendah hingga tertinggi harus disediakan dan dilengkapi segala fasilitasnya agar dapat mendukung terlaksananya pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh masyarakat.

Di lain pihak, makin banyak pasien di Rumah Sakit yang membutuhkan pelayanan kesehatan, artinya dari sisi kuratif dan rehabilitatif terjadi peningkatan demand sementara dari sisi preventif dan promotif masih jauh ketinggalan. Hal ini perlu perhatian serius, mengingat aspek preventif dan promotif merupakan strategi utama yang sangat efektif dan efisien dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menjadi tuntutan terbesar terhadap keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Aspek promotif dan preventif ini harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan secara optimal dengan melibatkan seluruh lintas sektor terkait, stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat.

Adapun peluang pengembangan pelayanan bagi sektor kesehatan ke depan sangat terbuka lebar, terlebih dengan akan diterapkannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada tanggal 1 Januari 2014. Dengan pemberlakuan SJSN, maka sistem pemeliharaan kesehatan masyarakat akan tertata dengan baik, aspek promotif-preventif-kuratif dan rehabilitatif mendapatkan porsi yang seimbang dan akan terlaksana dengan optimal, tenaga kesehatan akan termanfaatkan dengan baik pada aspek promotif-preventif-kuratif dan rehabilitatif, dan seluruh masyarakat akan terlayani dengan baik.

Perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini juga memberikan peluang terhadap peningkatan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi SKPD

Dinas Kesehatan bertugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, kesehatan masyarakat serta sumber daya tenaga kesehatan dan teknologi kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, telah dilakukan berbagai upaya dan telah berhasil dicapai beberapa indikator kinerja, namun masih ditemukan adanya beberapa permasalahan spesifik.

Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Status Gizi Masyarakat masih berfluktuasi mengalami peningkatan dan penurunan, dan belum mencapai target nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Millenium Development Goals (MDGs).

Secara umum, angka kesakitan akibat penyakit menular dapat diturunkan namun penyakit infeksi dan penyakit menular khususnya ATM (AIDS/HIV, TBC dan Malaria) masih tinggi dan memerlukan upaya serius untuk menyelesaikannya. Di samping itu, terjadi peningkatan penyakit tidak menular yang berkontribusi besar terhadap kesakitan dan kematian.

Masalah lain yang dihadapi adalah belum mencukupinya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis, kualitas dan distribusinya secara proporsional yang akan berpengaruh terhadap akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat menimbulkan permasalahan pada sistem rujukan dan penanganan kasus tertentu.

Sistem Informasi kesehatan menjadi lemah setelah ditetapkannya kebijakan desentralisasi, yang mengakibatkan keterbatasan data dalam pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan baik di tingkat Provinsi maupun Nasional.

Masyarakat masih ditempatkan pada posisi sebagai objek pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan masih rendah.

Dalam pembangunan kesehatan, integrasi dengan sektor terkait belum dilaksanakan secara optimal dan koordinasi pada semua tingkat administrasi pemerintahan masih perlu ditingkatkan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2013-2018, arahan dari RPJPD Sulawesi Selatan, serta arahan dari visi RPJMN 2010-2014, visi pembangunan daerah Sulawesi Selatan 2013-2018 adalah:

Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan

Dalam rumusan visi ini ada tiga pokok visi yakni pilar utama pembangunan Indonesia, simpul jejaring, dan akselerasi kesejahteraan. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut.

Pilar Utama Pembangunan Nasional adalah gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi acuan dan berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia. Persoalan mendasar tersebut khususnya dalam perwujudan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan dimana Indonesia masih mengimpor beras, garam, jagung dan daging.

Sulawesi Selatan juga lebih berperan dalam mengembangkan pola ideal perwujudan kehidupan religius dan kerukunan antar umat beragama, selain dapat mengembangkan tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, khususnya pada pengembangan demokrasi, dalam substansi dan konteks yang sesuai dengan cara dan karakter Sulawesi Selatan.

Simpul Jejaring adalah gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan luar pulau Jawa, pusat pelayanan barang dan jasa, hub pendidikan, hub kesehatan, serta hub perhubungan darat, laut dan udara. Dengan posisi demikian, Sulawesi Selatan semakin kuat mensinergikan kemajuan kabupaten dan kota serta semakin bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional.

Akselerasi Kesejahteraan adalah gambaran tentang proses dan hasil perubahan pada masyarakat Sulawesi Selatan melalui pengelolaan keragaman modal manusia, sosial, budaya, alam, fisik, dan finansial sehingga dapat mempercepat perwujudan kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pada saat itu, pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional, pendapatan perkapita lebih dari Rp.30 juta, angka pengangguran dan angka kemiskinan berada di bawah rata-rata nasional. Agroindustri berkembang pesat sebagai kelanjutan dari perkembangan agribisnis, sementara industri manufaktur dan pertambangan akan berkontribusi signifikan dalam struktur perekonomian. Kondisi ini merupakan fase akhir era tinggal landas dan merupakan awal kematangan ekonomi yang sudah menunjukkan terbentuknya kelas menengah dan *civil society* dengan jumlah yang signifikan.

Terkait dengan Visi dan Misi tersebut, Dinas Kesehatan sebagai salah satu SKPD mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan antara lain tersedianya Rumah Sakit yang berakreditasi Internasional dan Nasional, menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Prevalensi Gizi Buruk/Kurang, Angka Kesakitan yang akan mendukung peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH).

Untuk mencapai sasaran tersebut faktor pendukung adalah adanya program Kesehatan Gratis, adapun faktor penghambat adalah masih rendahnya mutu pelayanan yang disebabkan oleh antara lain keterbatasan SDM kesehatan terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan terluar (DTPK), masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat terutama pada perubahan gaya hidup yang mengakibatkan meningkatnya kasus penyakit degeneratif.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan di semua tingkatan administratif adalah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional bidang kesehatan yakni mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI telah menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta program – program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten) melaksanakan pembangunan kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Visi dari Kementerian Kesehatan adalah :

“ Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat
2. Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit menular
3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender dengan menurunnya disparitas separuh dari tahun 2009.
4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi resiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk terutama penduduk miskin
5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50 % menjadi 70 %
6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di daerah tertinggal/ terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK)
7. Seluruh Provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular
8. Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sasaran strategis dari Kementerian Kesehatan sejalan dengan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan bidang kesehatan. Adapun faktor pendorong adalah adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan RI) berupa dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, adanya bantuan tenaga strategis diantaranya pengangkatan Dokter/Dokter Gigi PTT. Sedangkan faktor penghambat adalah keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan yang masih rendah terutama pada daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK), seringnya mutasi pegawai terutama tenaga teknis fungsional dan pemberdayaan masyarakat serta kemitraan swasta dan lintas sektor yang masih rendah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk optimalisasi hasil kerja serta kontribusi positif tersebut, “wawasan kesehatan” perlu dijadikan sebagai asas pokok program pembangunan kesehatan, dalam pelaksanaannya seluruh unsur atau subsistem dari SKN/SKP berperan sebagai penggerak utama pembangunan nasional berwawasan kesehatan yang diejawantahkan dalam bentuk program-program dalam RPJMN/RPJMD dan Renstra Kementerian/Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya, disamping tanggung jawab individu dan keluarga. Dalam penyelenggaraan pembangunan, sistem kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan dapat bersinergi secara dinamis dengan berbagai sistem lainnya seperti : Sistem Pendidikan, Sistem Perekonomian, Sistem Ketahanan Pangan, Sistem Pertahanan dan Keamanan, Sistem Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta sistem-sistem lainnya.

Untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam pembangunan kesehatan, diperlukan pemikiran tidak konvensional mengenai kebijakan program kesehatan masyarakat dan sektor kesehatan pada umumnya untuk mencakup determinan kesehatan lainnya, terutama yang berada di luar domain sektor kesehatan.

Reformasi kesehatan masyarakat yang meliputi reformasi kebijakan SDM Kesehatan, reformasi kebijakan Pembiayaan Kesehatan, reformasi kebijakan Pelayanan Kesehatan dan reformasi untuk kebijakan yang terkait dengan terselenggaranya **Good Governance** sudah harus dilakukan.

Dibutuhkan pula perhatian pada akar masalah yang ada, diantaranya faktor sosial ekonomi yang menentukan situasi dimana masyarakat tumbuh, belajar, hidup, bekerja dan terpapar serta rentan terhadap penyakit dan komplikasinya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai target lokal (RPJMD, 11 Prioritas Gubernur), target nasional (RPJPN, RPJMN, dan RPJPK), target regional dan target global (MDGs 2015).

Hubungan antara status sosial ekonomi dan kesehatan berlaku secara universal. Tingkat kematian dan tingkat kesakitan secara konsisten didapatkan lebih tinggi pada kelompok dengan sosial ekonomi rendah. Perlu upaya sungguh-sungguh dalam rangka mengurangi disparitas masyarakat terhadap akses pendidikan, pekerjaan, partisipasi sosial dan pelayanan publik.

Pemberdayaan masyarakat diarahkan agar masyarakat berdaya untuk ikut memelihara kesehatannya sendiri, melakukan upaya pro-aktif tidak menunggu sampai jatuh sakit, karena ketika sakit sebenarnya telah kehilangan nilai produktif. Upaya promotif dan preventif perlu ditingkatkan untuk mengendalikan angka kesakitan yang muncul dan mencegah hilangnya produktivitas serta menjadikan sehat sebagai fungsi produksi yang dapat memberi nilai tambah.

Perlu pula diperhatikan adanya perkembangan Lingkungan Strategis, baik dalam lingkup internasional, nasional dan lokal yang akan mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Isu Strategis Internasional antara lain globalisasi seperti implementasi WTO, APEC dan AFTA dengan segala resiko deregulasi dan perizinan yang harus diantisipasi, pemanasan global, *biosecurity*, *bioterrorism*, penggunaan teknologi *high cost*, *Global Epidemic Diseases*, *Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health*, *Millenium Development Goals (MDGs)*, krisis ekonomi global, krisis bahan bakar dan pangan, Komitmen ASEAN dan internasional lainnya, Komitmen Bilateral dengan negara perbatasan, terbukanya peluang lapangan kerja kesehatan secara global, serta masuknya investasi dan tenaga kerja/profesi kesehatan dari negara lain. Harmonisasi regulasi dan implementasi AFTA dan kesepakatan global, termasuk tenaga kesehatan.

Isu Strategis Nasional antara lain desentralisasi (penyerahan kewenangan pemerintahan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah), penyakit *new emerging disease*, reformasi dan demokratisasi, dinamika politik nasional, krisis ekonomi dan keterbatasan dana Pemerintah, pengurangan anggaran Pusat, peningkatan anggaran daerah, deregulasi di berbagai perizinan dan bidang pembangunan, pengurangan peran Pemerintah, privatisasi dan *outsourcing*, pemberdayaan masyarakat, IPM dan kualitas SDM rendah, kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, serta kemiskinan dan pengangguran. Isu lokal diantaranya disparitas status kesehatan dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Beberapa Kementerian dan Lembaga memberikan perhatian khusus kepada daerah tertentu yang tertinggal dibandingkan daerah lainnya, dengan program dan strategi khusus agar daerah-daerah tersebut mampu mengejar ketertinggalannya dan sejajar dengan daerah lainnya; mensinergikan pembangunan kesehatan dalam upaya-upaya itu dinilai lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Berbagai masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan kesehatan juga telah didiskusikan dalam National Summit. Dibahas 4 (empat) isu pokok pembangunan kesehatan, yaitu : 1) Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat; 2) Peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDGs; 3) Pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana; dan 4) Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan terutama di DTPK. Di samping empat isu pokok tersebut, dipandang perlu untuk menambahkan isu penting lainnya yaitu dukungan manajemen dalam peningkatan pelayanan kesehatan, yang termasuk di dalamnya adalah *good governance*, desentralisasi bidang kesehatan dan struktur organisasi yang efektif dan efisien.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Menganalisis permasalahan yang terjadi, dapat dikemukakan beberapa isu strategis sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan masih perlu perbaikan menyeluruh dan berkesinambungan (pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat baik laki-laki maupun perempuan).
- b. Masih rendahnya pemberdayaan masyarakat, kemitraan swasta dan peran serta lintas sektor.
- c. Belum terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Kesehatan (Sarana dan Prasarana, SDM, Obat, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan) baik kuantitas, kualitas dan distribusinya.
- d. Masih perlu penyempurnaan dalam penetapan skala prioritas, sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 – 2018, dengan berpedoman kepada visi tersebut, permasalahan dan isu strategis pembangunan bidang kesehatan, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Visi sebagai berikut :

“Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama dan Simpul Jejaring Pembangunan Kesehatan Nasional”

Dalam rumusan visi ini terdapat dua pokok visi yakni pilar utama dan simpul jejaring pembangunan nasional. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut :

Pilar Utama adalah kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang berkontribusi besar terhadap pembangunan bidang kesehatan.

Simpul Jejaring Pembangunan Nasional adalah gambaran kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi simpul layanan kesehatan.

Untuk mendukung Visi tersebut, dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Mendorong penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, kemitraan swasta dan lintas sektor.
3. Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan (SDK) secara merata baik kuantitas, kualitas dan distribusinya.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel T- IV.C24
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2014	2015	2016	2017	2018
I	Terselenggaranya Upaya Kesehatan yang Merata, Terjangkau dan Berkualitas	1. Menurunnya Jumlah/Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit dan Meningkatnya Umur Harapan Hidup	1. Umur Harapan Hidup (UHH)	71,30	71,70	72,10	72,50	73,10
			2. Jumlah Kematian Bayi (Kasus)	1.031	1.026	1.021	1.016	1.011
			3. Jumlah Kematian Ibu (Kasus)	107	106	105	104	103
			4. Prevalensi Penduduk Usia > 15 Tahun dengan Tekanan Darah Tinggi (%)	20,64	20,24	19,84	19,44	19,04
			5. Mempertahankan Prevalensi Obesitas (%)	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
			6. Menurunkan Prevalensi Perokok Anak dan Remaja	6,9	6,6	6,3	6	5,7
			7. Angka Penemuan / Kejadian Malaria per 1.000 Penduduk (API)	1	< 1	< 1	< 1	< 1
			8. Angka Kejadian Tuberkulosis / 100.000 Penduduk (Case Notification Rate)	169	177	186	195	205
		2. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	1. Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	18,7	18,4	18,1	17,8	17,5
			2. Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	5,7	5,2	5,0	4,3	4,0
			3. Prevalensi Balita Stunting (%)	35,98	35,26	34,55	33,86	33,18

		3. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)	92	92,5	93	93,5	94
			2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani (%)	65	67	69	71	73
			3. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)	93	94	95	96	97
			4. Cakupan Pelayanan Nifas (%)	87	89	91	93	95
			5. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani (%)	93	94	95	96	97
			6. Cakupan Kunjungan Bayi (%)	94	95	96	97	98
			7. Cakupan Desa/Kelurahan UCI (%)	95	95	95	95	95
			8. Cakupan Pelayanan Anak Balita (%)	68	70	75	80	85
			9. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin (%)	25	35	45	55	65
			10. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100
			11. Cakupan Penimbangan Balita (D/S) (%)	80	85	87	90	93
			12. Cakupan ASI Eksklusif (%)	75	80	83	85	87
			13. Cakupan Pendistribusian Vitamin A pada Balita (%)	85	87	90	92	93
			14. Cakupan Ibu Hamil yang mengkonsumsi Tablet Fe 90 Tablet (%)	80	85	87	90	93
			15. Cakupan Konsumsi Garam ber-Iodium (%)	85	90	92	93	94
			16. Cakupan Kab/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi (%)	100	100	100	100	100

			17. Cakupan Kunjungan Puskesmas (%)	33,12	36,77	40,42	44,08	47,73
			18. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular (%)	65	70	78	85	90
			19. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100
			20. Cakupan Kualitas Air Minum	80,5	82	83,5	85	86
			21. Cakupan Akses Sanitasi Dasar	64	65	67	69	70
			22. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin (%)	100	100	100	100	100
			23. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	100	100	100	100
			24. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100
II	Meningkatnya Promosi, Pemberdayaan Masyarakat dan Keikutsertaan Swasta, LS dalam Pembangunan Kesehatan	1. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang berbasis masyarakat	1. % Rumah Tangga ber-PHBS	56	58	60	62	65
			2. % Desa Siaga Aktif	92	95	98	100	100
			Pratama	50	33	20	10	5
			Madya	30	30	31	29	23
			Purnama	15	27	34	41	47
			Mandiri	5	10	15	20	25

		2. Meningkatnya Kemitraan Lintas Sektor/Swasta	1. Jumlah Kemitraan Lintas Sektor/Swasta	4	5	6	7	8
III	Tersedianya Sarana Prasarana, SDM, Obat dan Perbekalan Kesehatan serta Pembiayaan Kesehatan yang Mencukupi	1. Meningkatnya Sarana Pelayanan Kesehatan yg Berkualitas	1. Jumlah RS yang Terakreditasi Internasional (Unit/Rumah Sakit)	1	-	-	1	2
			2. Jumlah RS yang Terakreditasi Nasional (Versi 2012) (Unit/Rumah Sakit)	1	5	5	5	5
			3. Jumlah Regulasi yang Dihasilkan	2	1	1	1	1
			4. % RS Pemerintah yang telah mempunyai Registrasi	100 (32 RS)	100	100	100	100
			5. % RS Swasta yang telah mempunyai Registrasi	60 (30 RS)	70 (35 RS)	80 (40 RS)	90 (45 RS)	100 (49 RS)
			6. % RS Pemerintah yang telah Melaksanakan Penetapan Kelas	100				
			7. % RS Swasta yang telah Melaksanakan Penetapan Kelas	60 (30 RS)	70 (35 RS)	80 (40 RS)	90 (45 RS)	100 (49 RS)
			8. % RS Non Pusat Rujukan sebagai RS Kelas C	92 (24 RS)	96 (25 RS)	100 (26 RS)		
			9. % RS pusat Rujukan sebagai RS Kelas B	83 (5 RS)	100 (6 RS)			
			10. % RS Pemerintah yang telah Memiliki Izin Rumah Sakit	60 (19 RS)	70 (22 RS)	80 (26 RS)	90 (29 RS)	100 (32 RS)
			11. % RS Swasta yang telah Memiliki Izin Rumah Sakit	50 (24 RS)	60 (30 RS)	70 (35 RS)	80 (40 RS)	90 (45 RS)
			12. % RS sebagai Wahana Internsip	86 (18 RS)	100 (21 RS)	100 (21 RS)	100 (21 RS)	100 (21 RS)
			13. Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi (Unit/Puskesmas)	2	4	6	8	10

		2. Meningkatnya Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.% Ketersediaan Obat Generik	75	80	85	90	95
			2. % Pengawasan Obat dan Makanan yang Layak, Bermutu dan Aman Dikonsumsi	40	45	50	55	60
			3.% Kualitas Pelayanan Kefarmasian pada Sarana Pelayanan Obat Tradisional	30	35	50	75	100
			4. % Kualitas Kefarmasian dalam Pengembangan Obat Asli Indonesia	50	60	65	75	80
		3.Meningkatnya Ketersediaan SDM Kesehatan yang Proporsional	1. Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk	15	17	19	20	22
			2. Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk	8	10	11	12	13
			3. Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	9	11	14	15	17
			4. Rasio Apoteker per 100.000 Penduduk	10	11	13	15	17
			5. Rasio Perawat per 100.000 Penduduk	94	95	97	99	100
			6. Rasio Bidan per 100.000 Penduduk	52	53	54	56	58
			7. Rasio Ahli Gizi per 100.000 Penduduk	11	12	14	16	18
			8. Rasio Ahli Sanitasi per 100.000 Penduduk	12	13	15	16	17
			9. Rasio Ahli Kesmas per 100.000 Penduduk	21	22	23	24	25

		4. Meningkatnya Pembiayaan Bidang Kesehatan	1. Cakupan Kepesertaan Jamkesda Menuju Universal Coverage (%)	100	100	100	100	100
			2. Cakupan Kepesertaan Kemitraan Asuransi Kesehatan Menuju Universal Coverage (%)	45	50	60	70	80

5. Strategi dan Kebijakan

TABEL T- IV.C.27

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Visi : Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama dan Simpul Jejaring Pembangunan Kesehatan Nasional				
Misi I : Mendorong Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas, Terjangkau dan Berkeadilan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
	Terselenggaranya Upaya Kesehatan yang Merata, Terjangkau dan Berkualitas	Menurunnya Jumlah/Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit dan Meningkatnya Umur Harapan Hidup	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Merata, Terjangkau dan Berkualitas	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		Meningkatnya Status Gizi Masyarakat		Perbaikan Gizi Masyarakat
		Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan		Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Misi II : Meningkatkan Peran serta Masyarakat, Kemitraan Swasta dan Lintas Sektor				
	Meningkatnya Promosi Kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keikutsertaan LS dan Swasta dalam pembangunan kesehatan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berbasis Masyarakat	Meningkatkan promosi kesehatan pemberdayaan masyarakat swasta dan kemitraan lintas sektor	Peningkatan Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama dengan Swasta serta Kemitraan Lintas Sektor.
		Meningkatnya Kemitraan Lintas Sektor/Swasta		

Misi III : Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan secara Merata baik Kuantitas, Kualitas maupun Distribusinya				
	Tersediaanya Sarana Prasarana, SDM, Obat dan Perbekalan Kesehatan serta Anggaran Kesehatan yang Mencukupi	Meningkatnya Sarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Menyediakan sarana dan prasana kesehatan	Standarisasi Pelayanan Kesehatan
		Meningkatnya Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatkan ketersediaan obat dan mengembangkan Obat Asli Indonesia	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
		Meningkatnya SDM Kesehatan yang Proporsional	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan	
		Meningkatnya Pembiayaan Bidang Kesehatan	Meningkatkan pembiayaan kesehatan dalam rangka penguatan SJSN	

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program prioritas yang telah ditetapkan dalam rangka mempercepat tercapainya visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Program Pengadaan Obat, Pengawasan Obat, Makanan dan Pengembangan Obat Asli Indonesia
2. Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
5. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
7. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Balita, Anak dan Lansia

Program pendukung yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja

Adapun sasaran, indikator target dan pembiayaan seperti pada tabel berikut :

TABEL T-IV.C.28

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	Ket		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(20)	(21)	(22)
Tujuan 1	Sasaran 1			Upaya Kesehatan Masyarakat	% RS yang melaksanakan SPGDT	0 Rumah Sakit	24	200	50	300	57	400	63	500	70	600	70	2.000	Dinkes Sulsel	Provinsi dan Kab/Kota	
					% RS Provinsi/Kab/Kota yang telah menjadi BLU	13 Rumah Sakit	19	200	25	300	31	400	32	500	32	600	32	1.400	Dinkes Sulsel	Provinsi dan Kab/Kota	
					% RS yang melakukan pelaporan SIRS On Line	36 Rumah Sakit	53	50	62	100	70	150	79	200	88	250	88	750	Dinkes Sulsel	Provinsi dan Kab/Kota	
					% puskesmas yang mengembangkan program kesehatan indera	37,5	47,5	10	57,5	11	67,5	12	77,5	14	87,5	15	87,5	62	Dinkes Sulsel		
					% puskesmas yang mengembangkan program kesehatan Olahraga	20,8	30,8	100	40,8	110	50,8	121	60,8	133	70,8	146	70,8	610	Dinkes Sulsel		
					% puskesmas yang mengembangkan program kesehatan Jiwa	29	39	80	49	88	59	97	69	106	79	117	79	488	Dinkes Sulsel		
					% puskesmas yang mengembangkan program kesehatan Gigi Mulut	11,14	21,14	25	31,14	47	41,14	72	51,14	98	61,14	127	61,14	369	Dinkes Sulsel		

Tujuan 1		% puskesmas yang mengembangkan program kesehatan Kerja	7,42	8,35	50	9,28	55	10,21	61	11,14	67	12,06	73	12,06	306	Dinkes Sulsel		
		% puskesmas yang melaksanakan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	11,14	16,71	100	27,84	110	33,41	121	38,98	123	44,55	134	44,55	588	Dinkes Sulsel		
		% Puskesmas yang mengembangkan Program Tradisional, Alternatif dan Komplementer	40	50	95	60	120	70	150	80	165	90	170	90	700	Dinkes Sulsel		
	Sasaran 2	Kegiatan.... Standarisasi Pelayanan Kesehatan	% RS Pemerintah yang telah mempunyai Registrasi	31	32	50	32	100	32	150	32	200	32	250	32	750	Dinkes Sulsel	Provinsi dan Kab/Kota
			% RS Swasta yang telah mempunyai Registrasi	25	30	50	35	100	40	150	45	200	49	250	49	750	Dinkes Sulsel	Provinsi dan Kab/Kota
			% RS Pemerintah yang telah melaksanakan Penetapan Klas	31	32	50	32	100	32	150	32	200	32	250	32	750	Dinkes Sulsel	Provinsi dan Kab/Kota
			% RS Swasta yang telah melaksanakan Penetapan Klas	20	30	50	35	100	40	150	45	200	49	250	49	750	Dinkes Sulsel	Provinsi dan Kab/Kota
			% RS Non Pusat Rujukan sebagai RS Klas C	23	24	50	25	100	26	150				26	300	Dinkes Sulsel	Provinsi dan Kab/Kota	
			% RS Pusat Rujukan sebagai RS Klas B	4	5	50	6	100	6	150				6	300	Dinkes Sulsel	Provinsi dan Kab/Kota	
			% RS Pemerintah yang telah melaksanakan Akreditasi Versi 2012	1	5	600	9	700	13	800	17	900	21	1.000	21	4.000	Dinkes Sulsel	Provinsi dan Kab/Kota
			% RS Swasta yang telah melaksanakan Akreditasi Versi 2012	0	3	300	6	350	9	400	12	450	15	500	15	2.000	Dinkes Sulsel	Provinsi dan Kab/Kota
			% RS Pemerintah yang telah Memiliki Izin RS	16	19	50	22	100	26	150	29	200	32	250	32	750	Dinkes Sulsel	Provinsi dan Kab/Kota
			% RS Swasta yang telah Memiliki Izin RS	16	24	50	30	100	35	150	40	200	45	250	45	750	Dinkes Sulsel	Provinsi dan Kab/Kota
			% RS Pemerintah	13	18	100	21	150	24	200	27	250	32	300	32	1.000	Dinkes	Provinsi dan

		yang mempunyai Tim PONEK RS	Rumah Sakit													Sulsel	Kab/Kota
		% Jumlah Dokter Pendamping Internship	30 Orang	37	75	45	150	52	200	59	250	65	300	65	975	Dinkes Sulsel	Provinsi dan Kab/Kota
		Jumlah Dokumen yang Disusun	1 Dokumen	2	250	3	300	4	350	5	400	6	450	6	1.750	Dinkes Sulsel	Provinsi dan Kab/Kota
		Kegiatan.....															
Tujuan 2	Sasaran 1	Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatan.....	% balita gizi buruk mendapat perawatan	100	450	100	550	100	605	100	666	100	733	100	3.004	Dinkes Sulsel	
			Tersedianya buffer stock bahan antisipasi KLB sebesar 20% dari total sasaran (kasus)	50	200	65	250	70	275	75	303	80	333	80	1.361	Dinkes Sulsel	
			Pendampingan kader pada 250 kasus	65	75	70	77	75	84	80	93	85	102	85	431	Dinkes Sulsel	
			% Bayi yang mendapat MP Asi	80	261	83	315	85	347	87	382	90	420	90	1.725	Dinkes Sulsel	
			Penguatan kerjasama LS/LP dalam Gerakan Nasional Sadar Gizi Fokus pada 1000 HPK	60	200	65	250	70	275	75	303	80	333	80	1.361	Dinkes Sulsel	
			% Bayi usia 0-6 bln mendapat Asi Eksklusif	80	261	83	315	85	347	87	382	90	420	90	1.725	Dinkes Sulsel	
			Ditegakkannya Perda dan Pergub di 24 Kab/Kota	35	60	50	62	60	68	70	74	75	82	75	346	Dinkes Sulsel	
			Cakupan RT yang mengkonsumsi garam beryodium	90	90	92	93	93	102	94	112	95	123	95	520	Dinkes Sulsel	
			Penyediaan Kit Iodium		25		26		29		31		35		146	Dinkes Sulsel	
			% Anak usia 6-59 bulan dapat kapsul Vit. A	85	150	87	154	90	169	93	186	95	205	95	864	Dinkes Sulsel	
			Terkonfirmasi anak yang tidak mendapat kapsul Vit. A	50	35	55	36	60	40	65	44	70	48	70	203	Dinkes Sulsel	
			% Ibu hamil yang mendapat Fe 90 tablet	85	180	87	185	90	203	93	224	95	246	95	1.038	Dinkes Sulsel	

	% Kab/Kota yang melaksanakan surveylans gizi	100	225	100	231	100	254	100	279	100	307	100	1.296	Dinkes Sulsel
	Pendampingan surveylans dan on the job training KMS baru pada 427 puskesmas	50	150	60	154	70	169	75	186	80	205	80	864	Dinkes Sulsel
	% Balita ditimbang berat badannya	85	300	87	305	90	335	93	369	95	406	95	1.715	Dinkes Sulsel
	Peningkatan Cakupan D/S (partisipasi masyarakat)	85	463	87	474	90	521	93	573	95	630	95	2.661	Dinkes Sulsel
	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Cakupan PHBS Rumah Tangga	54,4	54,4	2.200	56	2.420	62	2.640	69	2.875	75	3.000	80
		Meningkatnya Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	89,57	92	5.500	95	6.000	98	6.500	100	7.000	100	7.500	100
	1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Tersedianya Media Promosi Kesehatan	1 Pt	1 Pt	1.500	1 Pt	1.670	1 Pt	1.790	1 Pt	1.850	1 Pt	1.900	1 Pt
	2. Pengembangan UKBM dan Generasi Muda (Lomba Desa Siaga Tingkat Provinsi)	Terpilainya Desa Siaga Aktif Terbaik	5 Desa Siaga Aktif	5 Desi	750	5 Desi	850	5 Desi	950	5 Desi	1.000	5 Desi	1.100	5 Desi
	3. Pengembangan UKBM dan Generasi Muda (Lomba Posyandu Tingkat Provinsi)	Terpilainya Posyandu Terbaik	5 Posyandu	5 PSY	750	5 PSY	850	5 PSY	950	5 PSY	1.000	5 PSY	1.100	5 PSY
	4. Pengembangan UKBM dan Generasi Muda (Pengembangan SBH dan	Terlaksananya Pembinaan dan Konsultasi SBH/UKBM lainnya	10 Kab/Kota dan 1 LS	24 Kab/Kota, 1 LS	1.500	24 Kab/Kota, 1 LS	1.600	24 Kab/Kota, 1 LS	1.700	24 Kab/Kota, 1 LS	1.800	24 Kab/Kota, 1 LS	1.900	24 Kab/Kota, 1 LS

UKBM Lainnya)														
5. Peningkatan Kesadaran Pola Hidup Sehat	Tersebarluasnya Informasi Sadar Hidup Sehat melalui Radio dan Terkonsultasinya Program Promosi Kesehatan	500 kl, 1 LS	500 kl, 1 LS	2.000	500 kl, 1 LS	2.200	500 kl, 1 LS	2.400	500 kl, 1 LS	2.650	500 kl, 1 LS	2.750	500 kl, 1 LS	
6. Pengembangan Kemitraan Swasta dan Ormas	Terlaksananya Pertemuan Kemitraan Swasta/Ormas dan Ketua Forum Desa	40 Org (1 kl)	40 Org (1 kl)	1.000	80 Org (2 kl)	1.250	80 Org (2 kl)	1.350	80 Org (2 kl)	1.575	80 Org (2 kl)	1.750	80 Org (2 kl)	

BAB VI
INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

6.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	Umur Harapan Hidup (Tahun)	70,45	71,30	71,70	72,10	72,50	73,10	73,10 Tahun
2	Jumlah Kematian Ibu (Kasus)	108	107	106	105	104	103	103 Kasus
3	Jumlah Kematian Bayi (Kasus)	1.041	1.031	1.026	1.021	1.016	1.011	1.011 Kasus
4	Status Gizi							
	Gizi Buruk	6,6%	5,7%	5,2%	5,0%	4,3%	4,0%	4,0%
	Gizi Kurang	19%	18,7%	18,4%	18,1%	17,8%	17,5%	17,5%

6.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
	PELAYANAN KESEHATAN DASAR							
1	Cakupan Kunjungan Bumil K4	91,64%	92	92,5	93	93,5	94	94%
2	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	64,99%	65	67	69	71	73	73%
3	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	92,74%	93	94	95	96	97	97%
4	Cakupan Pelayanan Nifas	85,54%	87	89	91	93	95	95%
5	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	91,84%	93	94	95	96	97	97%
6	Cakupan Kunjungan Bayi	90,95%	94	95	96	97	98	98%
7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization	87,1%	95	95	95	95	95	95%

8	(UCI) Cakupan Pelayanan Anak Balita	58,44%	68	70	75	80	85	85%
9	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	26,81% (SPM 2012)						
10	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	88,31%	100	100	100	100	100	
11	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	94,40%	95	96	97	98	99	99%
12	Cakupan Peserta KB Aktif	64,75%						
13	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Acute Flacid Analysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 Tahun	2,08%	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2	
14	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit-Penemuan Penderita Pneumonia Balita	5,97%						
15	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit-Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	56%						
16	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit-Penderita DBD yang Ditangani	107,75%						
17	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit-Penemuan Penderita Diare	69,26%						
18	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	100%	100	100	100	100	100	
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN								
19	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100%	100	100	100	100	100	
20	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/Kota	100%	100	100	100	100	100	
PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB								
21	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	96,46 %	100	100	100	100	100	
PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								
22	Cakupan Desa Siaga Aktif	88,33%	92	95	98	100	100	

Sumber : Data Program dan Data SPM 2012 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Secara global, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan juga berkomitmen terhadap pencapaian Indikator Millenium Development Goals (MDGs). Indikator MDGs terdiri dari 8 (delapan) Goals dan 5 (lima) diantaranya berada di sektor kesehatan, sebagaimana diuraikan berikut ini :

GOAL



MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

Status Capaian Tujuan 1 MDGs Provinsi Sulawesi Selatan







Target 1 C menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990 – 2015						
	Indikator	Tahun 2011	Tahun 2012	Target MDGs 2015	Status	Sumber
1.8	Prevalensi Balita dengan berat badan rendah / Kekurangan Gizi	25%	25%	23,6%		Kemenkes, Riskesdas
1.8a	Prevalensi Balita Gizi Buruk	6,4	6,4	5,2%		Kemenkes, Riskesdas
1.8b	Prevalensi Balita Gizi Kurang	18,6%	18,6%	18,4%		Kemenkes, Riskesdas
Keterangan: Sudah Tercapai Akan Tercapai Perlu Perhatian Khusus						

GOAL



MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK

Status Capaian Tujuan 4 MDGs Provinsi Sulawesi Selatan

Indikator	Tahun 2011	Tahun 2012	Target MDGs 2015	Status	Sumber	
<i>Target 4 A : Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 2015</i>						
4.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	868 Kasus (6/1.000 KH)	1.021 Kasus (6/1.000 KH)	1.026 Kasus		Dinkes
4.2	Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 kelahiran hidup	109 Kasus (1/1.000 KH)	83 Kasus (1/1.000 KH)	32/1.000 KH		Dinkes
4.3	Proporsi anak berusia 1 tahun diimunisasi campak	93 %	100,5%	95%		Dinkes
Keterangan:  Sudah Tercapai  Akan Tercapai  Perlu Perhatian Khusus						

GOAL



MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

Status Capaian Tujuan 5 MDGs Provinsi Sulawesi Selatan

Indikator	Tahun 2011	Tahun 2012	Target MDGs 2015	Status	Sumber	
Target 5 A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990 – 2015						
5.1	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	116 kasus; (76/100.000 KH)	140 kasus; (93/100.000 KH)	106 Kasus	▶	Dinkes Sulsel
5.2	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (%)	92,17%	94%	94%	▶	Dinkes Sulsel
Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015						
5.3	Angka pemakaian kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun (Cara Modern)	64,77%	65%	65%	●	KB aktif Dinkes Sulsel
5.5	Tingkat kelahiran pada remaja (per 1.000 perempuan usia 15 – 19 tahun)	39,5; BPS 2010	30; BPS 2010	25,5	▶	BPS
5.6	Cakupan pelayanan antenatal (K1)	102,9% ; Dinkes 2011	101% ; Dinkes 2012	100%	●	Dinkes Sulsel
5.7	Cakupan pelayanan antenatal (K4)	90,6%; Dinkes 2011	92%; Dinkes 2012	92,5%	▶	Dinkes Sulsel
5.8	Unmet need KB (Kebutuhan keluarga berencana / KB yang tidak terpenuhi)	15,38% Dinkes 2011	14,45%; Dinkes 2012	5%	▶	Dinkes Sulsel
Keterangan: ● Sudah Tercapai ▶ Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus						









GOAL



MENGENDALIKAN HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA (TB)

Status Capaian Tujuan 6 MDGs Provinsi Sulawesi Selatan

Indikator	Tahun 2011	Tahun 2012	Target MDGs 2015	Satus	Sumber
Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya					
Target 6 A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015					
6.1. Prevalensi HIV	< 0,5	< 0,5	< 0,5		Dinkes
6.2. Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi	54,0	65%	60 (P) 45 (L)		Dinkes
6.3. Proporsi penduduk usia 15 – 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS	75%	81%	95%		Dinkes
Target 6 B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015					
6.4. Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan aniretroviral	58,6	72,5%	90 %		Dinkes
Target 6 C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015					
6.5. Angka penemuan kasus (kejadian) Malaria per 1.000 penduduk	0,40	0,24	0,30		Dinkes
6.6. Angka kematian Malaria per 100.000 penduduk					Harus melalui Survei Pusat

6.7.	Angka kejadian Tuberkulosis (insiden semua kasus/ 100.000 penduduk/ tahun/CNR)	139	153	163		Dinkes
6.8.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	106	112	222		Dinkes
6.9	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	3,4% (149 Kasus)	3,45% (308 Kasus dari 8.934 TB BTA+ Baru)	27		Dinkes Data memakai sistem kohort
7.0	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)	55%	55,51%	70%		Dinkes
7.1	Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)	89%	90%	88%		Dinkes
<p>Keterangan :  Sudah Tercapai  Akan Tercapai  Perlu Perhatian Khusus</p>						

GOAL



MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Status Capaian Tujuan 7 MDGs Provinsi Sulawesi Selatan

INDIKATOR	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TARGET MDGS 2015	STATUS	SUMBER	
TARGET 7C : MENURUNKAN HINGGA SETENGAHNYA PROPORSI RUMAH TANGGA TANPA AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR MINUM LAYAK DAN SANITASI DASAR HINGGA TAHUN 2015						
7.7	PROPORSI RUMAH TANGGA DENGAN AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR MINUM LAYAK, PERKOTAAN DAN PERDESAAN	68,40%	68,5%	71%	▶	DINKES
	PERKOTAAN	71,1%	71,5%	74,7%	▶	DINKES
	PERDESAAN	65,2%	65,6%	67,3%	▶	DINKES
7.8	PROPORSI RUMAH TANGGA DENGAN AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP SANITASI DASAR, PERKOTAAN DAN PERDESAAN	61,40%	62,1%	63%	▶	DINKES
	PERKOTAAN	71,50%	73%	76%	▶	DINKES
	PERDESAAN	50,60%	51,2%	54%	▶	DINKES
KETERANGAN : ■ = SUDAH TERCAPAI ▶ = AKAN TERCAPAI ▼ = PERLU PERHATIAN KHUSUS						

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah kerangka kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama lima tahun kedepan sebagai pelaksana teknis dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan . Rencana Strategis ini menjabarkan lebih lanjut kebijakan dan sasaran pembangunan bidang kesehatan yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis ini merupakan perencanaan tingkat (menengah) SKPD yang perlu dipahami oleh semua staf dalam rangka melaksanakan program kegiatan. Selanjutnya, dokumen Renstra akan menjadi pedoman dan dijabarkan dalam rangka perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan (Renja – SKPD).

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Tahun 2013 – 2018 merupakan hasil revisi (penyesuaian) terhadap perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 09 Tahun 2015, dan rencana strategis ini akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dalam rangka pencapaian Visi Dinas Kesehatan yaitu **“SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA DAN SIMPUL JEJARING PEMBANGUNAN KESEHATAN NASIONAL”**.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Dr.dr.H. Rachmat Latief, SpPD, KPTI, M.Kes, FINASIM
Pangkat : Pembina Utama
NIP : 19590204 198511 1 002

Tabel T-IV.C.28
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Terselenggaranya upaya kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.	Menurunnya jumlah/angka kesakitan dan kematian akibat penyakit	Umur Harapan Hidup		Program Upaya Kesehatan Masyarakat				692,100,000.00		3,604,160,000.00		3,903,159,358.00		3,672,494,472.31		3,765,057,534.22			
			Cakupan Kunjungan Puskesmas		<i>Pelayanan Kesehatan Dasar</i>	Cakupan Kunjungan Puskesmas (%)	29.46%	33.12%	310,000,000	36.77%	475,000,000	40.42%	956,123,929.00	44.08%	740,000,000.00	47.73%	781,800,000	47.73%	Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar	24 Kab/Kota
					Pemilihan Puskesmas Berprestasi (Kinerja Terbaik) Tingkat Provinsi	Terpilainya Puskesmas Berprestasi (Kinerja Terbaik) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan		5 PKM	200,000,000	5 PKM	200,000,000	5 PKM	247,900,000.00	5 PKM	250,000,000.00	5 PKM	250,000,000	25 PKM	Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar	Kab/Kota
					Pembinaan dan Monitoring SIMPUS/SP2TP	Terpantaunya SIMPUS/SP2TP di Kab/Kota			70,000,000								100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar	Kab/Kota	
					Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Dasar	Terlaksananya pertemuan pelayanan kesehatan dasar		24 Kab/Kota	40,000,000			24 Kab/Kota	37,077,000.00	24 Kab/Kota	40,000,000.00	24 Kab/Kota	40,000,000	24 Kab/Kota	Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar	Provinsi
					Ujicoba Akreditasi Puskesmas bagi Puskesmas Berprestasi	Terakreditasinya Puskesmas				24 Kab/Kota	104,925,000							24 Kab/Kota	Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar	Kab/Kota
					Pertemuan Pelayanan Kesehatan Dasar	Terlaksananya pertemuan pelayanan kesehatan dasar				24 Kab/Kota	37,075,000							24 Kab/Kota	Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar	Provinsi
					Pelatihan Rekam Medik di Pelayanan Kesehatan Dasar	Terlaksananya pelatihan Rekam Medik di Pelayanan Kesehatan Dasar				24 Kab/Kota	47,900,000							24 Kab/Kota	Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar	Provinsi
					Pelatihan SP2TP bagi Kab/Kota	Terlaksananya pelatihan SP2TP				24 Kab/Kota	85,100,000	24 Kab/Kota	50,000,000.00					24 Kab/Kota	Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar	Provinsi
					Penguatan dan Pembinaan Akreditasi Puskesmas	Terbinanya Akreditasi Puskesmas						24 Kab/Kota	398,431,529.00	24 Kab/Kota	200,000,000.00	24 Kab/Kota	200,000,000	24 Kab/Kota	Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar	Kab/Kota
					Pelatihan Manajemen Puskesmas	Terlaksananya pelatihan Manajemen Puskesmas bagi Petugas Puskesmas						24 Kab/Kota	150,000,000.00	24 Kab/Kota	150,000,000.00	24 Kab/Kota	150,000,000	24 Kab/Kota	Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar	Provinsi
					Pelatihan Tenaga Front Office Puskesmas	Terlatihnya tenaga Front Office Puskesmas						24 Kab/Kota	72,715,400.00					24 Kab/Kota	Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar	Provinsi
					Pelatihan Petugas Laboratorium bagi Kab/Kota	Terlaksananya pelatihan Petugas Laboratorium Kab/Kota									24 Kab/Kota	40,000,000	24 Kab/Kota	40,000,000	Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar	Provinsi
					Bimbingan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan ke Lokasi Terpencil	Meningkatkan Akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di DTPK (Jumlah Kab/Kota DTPK)							11 Kab/Kota	100,000,000.00	15 Kab/Kota	101,800,000	15 Kab/Kota DTPK	Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar	Kab/Kota	
					<i>Pelayanan Kesehatan Indera</i>	Persentase puskesmas yang mengembangkan program kesehatan Indera	37.5%	42.5%	10,000,000	47.5%	55,120,000	52.5%	233,063,500.00	57.5%	237,258,643.00	62.5%	241,529,299	62.5%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	24 Kab/Kota
					Pencetakan Buku Pedoman Pemeriksaan Tajam Penglihatan di Sekolah	Ter tercatatnya/tersedianya buku pedoman pemeriksaan tajam penglihatan di Sekolah		200 Exemplar	10,000,000					2,000 Exemplar	100,000,000.00			2,200 Exemplar	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi
					Pertemuan Program Kesehatan Indra Provinsi	Terlaksananya pertemuan koordinasi Program Kesehatan Indra				24 Kab/Kota	55,120,000	24 Kab/Kota	83,063,500.00			24 Kab/Kota	100,000,000	24 Kab/Kota	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi
					Peningkatan Keterampilan Kesehatan Indera Bagi Dokter dan Petugas Kesehatan di Puskesmas	Meningkatnya keterampilan kesehatan Indera pada Dokter dan Petugas Kesehatan di Puskesmas								48 Orang	137,258,643.00			48 Orang	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi
					Bimbingan Teknis Program Kesehatan Indera di Kabupaten/Kota	Terlaksananya bimbingan teknis Program Kesehatan Indera Kab/Kota						24 Kab/Kota	150,000,000.00			24 Kab/Kota	141,529,299	24 Kab/Kota	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Kab/Kota
					Seminar Sehari Pengenalan dan Deteksi Dini Gangguan Kesehatan Indera penglihatan dan Pendengaran pada Anak Sekolah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya seminar sehari pengenalan dan deteksi dini gangguan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran pada anak sekolah di Kab/Kota												100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
					Pelayanan Kesehatan Olah Raga	Persentase puskesmas yang mengembangkan program Kesehatan Olah Raga	20.8%	25%	165,800,000	35%	2,779,640,000	40%	1,925,216,500.00	45%	1,959,452,117.31	50%	1,994,950,416	50%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi dan Kab/Kota		
					Pembudayaan Olah Raga di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	Tersosialisasinya pembudayaan olahraga di Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel		150 Orang	35,800,000								150 Orang	100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi		
					Senam Sehat dan Buger bagi Karyawan Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan	Terlaksananya senam sehat dan buger bagi Karyawan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel						100%	16,000,000.00	100%	16,000,000.00	100%	25,148,064	100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi		
					Peningkatan Kemampuan Instruktur Senam Khusus Kesehatan	Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan Instruktur Senam Khusus Kesehatan dan tersedianya Instruktur Senam Kesehatan												100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi		
					Pelaksanaan Senam Osteoporosis di Kantor-Kantor	Terlaksananya Senam Osteoporosis di Kantor-Kantor												100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi		
					Advokasi Program Pelayanan Kesehatan Olahraga Bagi Pemangku Kebijakan di Kabupaten/Kota Tingkat	Tersedianya advokasi program pelayanan kesehatan olahraga bagi Pemangku Kebijakan di Kab/Kota Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan												100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi		
					Pertemuan Perencanaan Program Kesehatan Olahraga Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	Terlaksananya pertemuan perencanaan Program Kesehatan Olahraga Tingkat Provinsi Sulsel								24 Kab/Kota	100,000,000.00	24 Kab/Kota	200,000,000	24 Kab/Kota	100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi	
					Tes Kebugaran	Terlaksananya Tes Kebugaran				100%	80,600,000							100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi		
					Monev Program Kesehatan Olahraga	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Program Kesehatan Olahraga					24 Kab/Kota	148,265,000			24 Kab/Kota	115,170,397.00	24 Kab/Kota	190,000,000	24 Kab/Kota	100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Kab/Kota
					Pelatihan Pengukuran Kebugaran Jasmani	Terlaksananya pelatihan pengukuran kebugaran jasmani				100%	526,615,000							100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi		
					Bimtek Program Kesehatan Olahraga ke Kab/Kota	Terlaksananya bimtek Program Kesehatan Olahraga ke Kab/Kota							10 Kab/Kota	55,000,000.00				10 Kab/Kota	100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Kab/Kota	
					Pencetakan Buku Pedoman Upaya Kesehatan Olahraga	Tercetaknya/tersedianya Buku Pedoman Upaya Kesehatan Olahraga							1 Dokumen	25,000,000.00				1 Dokumen	100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi	
					Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM)															BKOM	Provinsi	
					Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kesehatan Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kesehatan olahraga di Kabupaten/Kota	-											100.00%	BKOM	24 Kab/Kota		
					Sosialisasi Program Pelayanan Kesehatan Olahraga	Terlaksananya sosialisasi Program Pelayanan Kesehatan Olahraga				100%	368,530,000							100%	BKOM	24 Kab/Kota		
					Sosialisasi Bahaya NAPZA dan HIV AIDS bagi Pemuda Pelajar dengan Berolahraga	Terlaksananya sosialisasi bahaya NAPZA dan HIV AIDS bagi Pemuda Pelajar dengan Berolahraga								100%	100,000,000.00	100%	150,000,000	100%	BKOM	24 Kab/Kota		
					Seminar Kebugaran Fisik Bagi Guru-Guru Olahraga	Terlaksananya seminar tentang pengukuran kebugaran bagi guru olahraga setingkat SMA dan sederajat	-													BKOM	Provinsi	
					Pertemuan Koordinasi Lintas Program/Sektor Kesehatan Olahraga	Terlaksananya pertemuan koordinasi lintas program/sector kesehatan olahraga	-													BKOM	Provinsi	
					Pertemuan Koordinasi dan Perencanaan Tahunan Kesehatan Olahraga Tingkat Provinsi	Terlaksananya pertemuan koordinasi dan perencanaan tahunan Kesehatan Olahraga Tingkat Provinsi							1 Kali	140,177,000.00				1 Kali		BKOM	Provinsi	
					Konsultasi dan Koordinasi Pusat dan Daerah	Terlaksananya konsultasi dn koordinasi antara Pusat dan Daerah	-													BKOM	Jakarta / Bandung	
					Tes Kebugaran Jasmani Bagi Pegawai UPTD/RSIB/Klub Jantung Sehat/Petugas Haji/Anggota DPR	Terlaksananya tes kebugaran haji	-													BKOM	Provinsi	
					Pelaksanaan Tes Kebugaran	Terlaksananya Tes Kebugaran									100%	100,000,000.00	100%	100,000,000	100%	BKOM	Provinsi	
					Peningkatan Kemampuan Instruktur Senam Khusus Kesehatan (BKOM)	Terlaksananya peningkatan kemampuan Instruktur Senam Khusus Kesehatan		100%	110,000,000									100%	BKOM	Provinsi		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
					Pelaksanaan Senam Osteoporosis di Kantor-Kantor (BKOM)	Terlaksananya Senam Osteoporosis di Kantor-Kantor		1 Paket	20,000,000									1 Paket	BKOM	Provinsi		
					Senam Khusus Kesehatan	Terlaksananya senam khusus kesehatan				100%	1,155,630,000							100%	BKOM	Provinsi dan Kab/Kota		
					Pelatihan Instruktur Kesehatan Olahraga	Terlaksananya pelatihan instruktur Kesehatan Olahraga						100%	309,102,000.00					100%	BKOM	Provinsi dan Kab/Kota		
					Lomba Senam Sehat Bugar dalam rangka HKN Tingkat Provinsi	Terlaksananya lomba Senam Sehat Bugar dalam rangka HKN tingkat Provinsi						100%	333,900,000.00	100%	250,000,000.00	100%	300,000,000	100%	BKOM	Provinsi		
					Pelatihan Senam Khusus Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan di Kab/Kota	Terlaksananya pelatihan senam khusus kesehatan bagi tenaga kesehatan di Kab/Kota						100%	553,004,500.00	100%	250,000,000.00	100%	250,000,000	100%	BKOM	Kab/Kota		
					PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR BKOM																	
					Pelatihan Pengukuran Kebugaran Jasmani	Terlaksananya Pelatihan Pengukuran Kebugaran Jasmani	-													BKOM	Bandung	
					Peningkatan Sumberdaya Aparatur (BKOM)	Terlaksananya peningkatan sumberdaya aparatur BKOM				100%	500,000,000								100%	BKOM	Provinsi	
					Pelatihan Pengukuran Kebugaran bagi Petugas Kesehatan Olahraga	Terlaksananya Pelatihan Pengukuran Kebugaran Jasmani bagi Petugas Kesehatan Olahraga								6 Kab/Kota	250,000,000.00	6 Kab/Kota	299,802,352.22	12 Kab/Kota	BKOM	Kab/Kota		
					Pelatihan Cedera Olahraga	Terlaksananya Pelatihan Cedera Olahraga Bagi Tenaga Kesehatan	-												100%	BKOM	Bandung	
					Pelatihan Senam Khusus Kesehatan	Terlaksananya Pelatihan Senam Khusus Kesehatan	-													BKOM	Bandung	
					Pelatihan petugas Operator Alat Kesehatan Olahraga (Elektromedik)	Terlatih dan mahirnya Operator Alat Kesehatan Olahraga (Elektromedik)	-							100%	18,000,000.00				100%	BKOM	Bandung	
					Pelatihan Penatalaksanaan Penggunaan EKG	Terlaksananya pelatihan penatalaksanaan penggunaan EKG	-							100%	10,000,000.00				100%	BKOM	Provinsi	
					Pelatihan Gizi Kesehatan Olahraga	Terlatih dan mahirnya tenaga gizi kesehatan olahraga	-							100%	85,281,720.31	100%	100,000,000	100%	BKOM	Bandung		
					Pelatihan Kegawatdaruratan Medik Olahraga	Terlaksananya pelatihan Kegawatdaruratan Medik Olahraga								100%	20,000,000.00				100%	BKOM	Provinsi	
					Pelatihan Pemeriksaan Kepadatan Tulang	Terlaksananya pelatihan Pemeriksaan Kepadatan Tulang								100%	20,000,000.00				100%	BKOM	Provinsi	
					Study Kerja	Terlaksananya Study Kerja								100%	200,000,000.00	100%	200,000,000	100%	BKOM	Luar Provinsi		
					PELATIHAN/PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN OLAHRAGA																	
					Pelatihan Pengukuran Kebugaran Jasmani	Terlaksananya pelatihan Pengukuran Kebugaran Jasmani	-													100%	BKOM	Provinsi
					Pelatihan Pengukuran Kebugaran Fisik di Kab/Kota	Terlaksananya pelatihan Pengukuran Kebugaran Fisik di Kab/kota							6 Kab/Kota	361,230,000.00					6 Kab/Kota	BKOM	Kab/Kota	
					Pelatihan Cedera Olahraga Bagi TIM Kesehatan Olahraga	Terlaksananya Pelatihan Cedera Olahraga Bagi TIM Kesehatan Olahraga	-													100%	BKOM	Provinsi
					Pelatihan Tenaga Kesehatan Senam Khusus Kesehatan	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kesehatan Olahraga Senam Khusus Kesehatan	-													100%	BKOM	Provinsi
					Pelatihan Deteksi dan Kecacatan Dini bagi Anak Sekolah	Terlaksananya pelatihan Deteksi dan Kecacatan Dini bagi Anak Sekolah								100%	100,000,000.00				100%	BKOM	Provinsi	
					KEMITRAAN																	
					Pertemuan Forum Komunikasi, Kemitraan Lintas Program dan Lintas Sektor	Terlaksananya pertemuan forum komunikasi, kemitraan lintas program dan lintas sektor	-						100%	131,803,000.00	100%	100,000,000.00	100%	150,000,000	100%	BKOM	Provinsi	
					Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya kunjungan kerja	-														BKOM	Jawa Timur dan Kalimantan Timur
					KONSELING																	
					Pelatihan Pemeriksaan Psikolog bagi Pelatih dan Atlet Olahraga	Terlaksananya pelatihan pemeriksaan Psikologi bagi Pelatih dan Atlet Olahraga	-							100%	105,000,000.00				100%	BKOM	Provinsi	
					Penyuluhan Kesehatan Olahraga pada Anak Sekolah melalui UKS	Terlaksananya penyuluhan kesehatan olahraga pada Anak Sekolah melalui UKS	-							100%	20,000,000.00	100%	30,000,000	100%	BKOM	Provinsi		
					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
					Survey Status Gizi pada Members Senam Aerobik di BKOM	Terlaksananya survey status gizi pada members senam aerobik di BKOM	-											100%	BKOM	Provinsi		
					Survey Kepuasan Members Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan di BKOM	Terlaksananya Survey Kepuasan Members terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan di BKOM	-												100%	BKOM	Provinsi	
					Workshop Pengembangan Pusat-pusat Kesehatan Olahraga di Kab/Kota MONEV	Terlaksananya workshop pengembangan Pusat-Pusat Kesehatan Olahraga di Kab/Kota							100%	100,000,000.00					100%	BKOM	Kab/Kota	
					Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Bagi Pengelola Kesehatan Olahraga	Terlaksananya pertemuan monitoring dan evaluasi bagi tenaga kesehatan olahraga di Kab/Kota	-													100%	BKOM	Provinsi
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Olahraga	Terlaksananya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kesehatan olahraga	-													100%	BKOM	24 Kab/Kota
					Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase puskesmas yang mengembangkan program Kesehatan Jiwa	29%	33.5%	-	38%	168,425,000	42%	303,571,429.00	46.5%	152,700,000.00	50%	155,448,600	50%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi dan Kab/Kota		
					Peningkatan Kemampuan Teknis Pelayanan Kesehatan Jiwa Bagi Petugas Medis di Tingkat Pelayanan Dasar	Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan teknis pelayanan kesehatan jiwa bagi petugas medis di tingkat pelayanan dasar							60 Orang	152,700,000.00			60 Orang	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi dan Kab/Kota			
					Seminar Sehari Sosialisasi Kesehatan Jiwa Dalam Rangka Indonesia Bebas Pasung	Terlaksananya Seminar Sehari Sosialisasi Kesehatan Jiwa dalam rangka Indonesia Bebas Pasung												100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi		
					Seminar Sehari Pencegahan dan Penanggulangan Napza Bagi Guru Sekolah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Seminar Sehari Pencegahan dan Penanggulangan NAPZA bagi Guru Sekolah di Kab/Kota												100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi		
					Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor/Lintas Program Napza	Terlaksananya pertemuan koordinasi Lintas Sektor/Lintas Program NAPZA												100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi		
					Bimbingan Teknis Program Kesehatan Jiwa ke Kab/Kota	Terlaksananya bimbingan teknis Program Kesehatan Jiwa ke Kab/Kota			100%	94,400,000								100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Kab/Kota		
					Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Jiwa Tingkat Provinsi	Terlaksananya pertemuan monitoring dan evaluasi Program Kesehatan Jiwa tingkat Provinsi			100%	74,025,000						100%	155,448,600	100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi		
					Pemantauan Kasus Pasung di Kab/Kota	Terlaksananya kegiatan pemantauan kasus pasung di Kab/Kota						9 Kab/Kota	203,571,429.00					9 Kab/Kota	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Kab/Kota		
					Pertemuan Advokasi LS/LP dalam rangka Pembentukan Tim Pembina Keswamas (TP-KJM) Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	Terlaksananya pertemuan advokasi LS/LP dalam rangka pembentukan Tim Pembina Keswamas (TP KJM) Tingkat Provinsi dan Kab/Kota						48 Orang	100,000,000.00				48 Orang	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi dan Kab/Kota			
					Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Persentase puskesmas yang mengembangkan program Kesehatan Gigi dan Mulut	11.14%	21.14%	-	31.14%	125,975,000	41.14%	135,750,000.00	51.14%	138,193,500.00	61.14%	140,680,983	61.14%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi dan Kab/Kota		
					Peningkatan Kemampuan Teknis dalam Penanganan Gangguan Kesehatan Gigi dan Mulut bagi Puskesmas Kab/Kota	Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan teknis dalam penanganan gangguan kesehatan gigi dan mulut bagi Puskesmas Kab/Kota			100%	74,975,000								100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi dan Kab/Kota		
					Peningkatan Kapasitas Teknis bagi Perawat Gigi dalam Pelayanan Kesehatan di UKGS/UKGM	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas teknis bagi Perawat Gigi dalam Pelayanan Kesehatan di UKGS/UKGM						48 Orang	100,750,000.00	60 Orang	138,193,500.00			108 Orang	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi dan Kab/Kota		
					Peningkatan Kemampuan Teknis dalam Deteksi Dini Gangguan Kesehatan Gigi dan Mulut bagi Guru UKS	Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan teknis dalam deteksi dini gangguan kesehatan gigi dan mulut bagi Guru UKS												100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi		
					Sosialisasi Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat			100%	51,000,000									100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
					Monev Pemantauan Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut di Kab/Kota	Terlaksananya pemantauan upaya kesehatan gigi dan mulut di Kab/Kota						24 Kab/Kota	35,000,000.00					24 Kab/Kota	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Kab/Kota	
					Pembinaan Teknis Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan teknis pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Kab/Kota											24 Kab/Kota	140,680,983	24 Kab/Kota	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Kab/Kota
					Pelayanan Kesehatan Kerja	Persentase puskesmas yang mengembangkan program Kesehatan Kerja	7.42%	8.35%	-	20%	-	32%	81,500,000.00	44%	82,967,000.00	56%	84,460,406	56%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi dan Kab/Kota	
					Peningkatan Kapasitas Pengelola Kesehatan Kerja di Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas Pengelola Kesehatan Kerja di Kab/Kota												100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Kab/Kota	
					Pelatihan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Puskesmas	Terlaksananya pelatihan keselamatan kesehatan kerja (K3) Puskesmas												100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi	
					Pelatihan Penyakit Kerja Bagi Dokter Puskesmas	Terlaksananya pelatihan penyakit kerja bagi Dokter Puskesmas												100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi	
					Pertemuan Koordinasi Dengan LS/LP dalam hal Pelaksanaan Program Kesehatan Kerja	Terlaksananya pertemuan koordinasi dengan LS/LP dalam hal pelaksanaan Program Kesehatan Kerja												100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi	
					Pembentukan POS UKK Bagi Pekerja Informal	Terbentuknya POS UKK bagi Pekerja Informal												100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi	
					Bimbingan Teknis tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Puskesmas	Terlaksananya bimbingan teknis tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Puskesmas						24 Kab/Kota	50,000,000.00					24 Kab/Kota	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Kab/Kota	
					Pencetakan Buku Pedoman K3 Puskesmas	Tersedianya Buku Pedoman K3 Puskesmas bagi 24 Kab/Kota						350 Eksemplar	31,500,000.00	350 Eksemplar	82,967,000.00	350 Eksemplar	84,460,406	1.050 Eksemplar	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi	
					Pelayanan Keperawatan	Persentase puskesmas yang melaksanakan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	11.14%	16.71%	107,800,000	27.84%	-	33.14%	232,734,000.00	38.98%	236,923,212.00	44.55%	241,187,830	44.55%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi dan Kab/Kota	
					Pertemuan Koordinasi Program Perkesmas	Terkoordinasinya Program Perkesmas antara Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Provinsi		30 Orang	92,800,000			35 Orang	44,000,000.00					65 Orang	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi	
					Pencetakan Buku Pedoman Kegiatan Perkesmas di Puskesmas	Tercetaknya Buku Pedoman Kegiatan Perkesmas di Puskesmas		150 Eksemplar	15,000,000									150 Eksemplar	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi	
					Bimbingan Teknis Program Perkesmas Kab/Kota	Terlaksananya bimbingan teknis Program Perkesmas Kab/Kota						24 Kab/Kota	101,234,000.00					24 Kab/Kota	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Kab/Kota	
					Pencetakan Buku Pedoman Perkesmas dan Form Pencatatan dan Pelaporan Perkesmas	Tersedianya Buku Pedoman Perkesmas dan Form Pencatatan dan Pelaporan Perkesmas						350 Eksemplar	35,000,000.00	500 Eksemplar	86,923,212.00			850 Eksemplar	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi	
					Peningkatan Kemampuan Teknis Perkesmas Bagi Pengelola di Puskesmas	Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis Perkesmas bagi Pengelola di Puskesmas								48 Orang	150,000,000.00	48 Orang	141,187,830	96 Orang	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi	
					Peningkatan Kemampuan Petugas Perkesmas di Puskesmas	Terlaksananya peningkatan kemampuan Petugas Perkesmas di Puskesmas						40 Orang	52,500,000.00					40 Orang	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Kab/Kota	
					Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pelayanan Perkesmas di Puskesmas	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penerapan pelayanan Perkesmas di Puskesmas 24 Kab/Kota											24 Kab/Kota	100,000,000	24 Kab/Kota	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Kab/Kota
					Pertemuan Evaluasi Pelayanan Perkesmas Tingkat Provinsi	Terlaksananya pertemuan evaluasi pelayanan Perkesmas tingkat Provinsi												100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					Pengadaan PHN-KIT di Puskesmas	Tersedianya PHN KIT di Puskesmas												100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi
					Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer	Persentase Kab/Kota memiliki minimal 2 puskesmas yang mengembangkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer	40%	33.30%	98,500,000	41%	-	50%	35,200,000.00	58.3%	125,000,000.00	66%	125,000,000	66%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi dan Kab/Kota
					Sosialisasi dan Advokasi Program Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi Program Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer		100%	98,500,000									100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi
					Orientasi Selfcare Ramuan dan Pemanfaatan TOGA Bagi Petugas Puskesmas	Terlaksananya Orientasi Selfcare ramuan dan pemanfaatan TOGA bagi Petugas Puskesmas								24 Orang	125,000,000.00	24 Orang	125,000,000	48 Orang	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi
					Orientasi Akupresur Bagi Petugas Puskesmas	Terlaksananya orientasi pijat akupresur bagi petugas Puskesmas												100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi
					Seminar Manfaat Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer	Terlaksananya Seminar Manfaat Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer							30 Orang	35,200,000.00				30 Orang	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi
					Pertemuan Koordinasi Yankestradkom di Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T)	Terlaksananya pertemuan koordinasi Yankestradkom dan SP3T												100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Provinsi
					Pembinaan Yankestradkom di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan Yankestradkom di Kab/Kota												100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Penunjang	Kab/Kota
					Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan				1,880,328,116.00		2,143,125,500.00		2,753,447,286.00		3,367,205,784.00		3,948,495,200.00			
					Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)				154,485,000		39,855,000		327,120,000		744,000,000.00		1,184,496,000.00		Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	Provinsi dan Kab/Kota
					Prevalensi Penduduk Usia > 15 Tahun dengan Tekanan Darah Tinggi	Prevalensi Penduduk Usia > 15 Tahun dengan Tekanan Darah Tinggi	21,04%	20,64%		20,24%		19,84%		19,44%		19,04%		19,04%	Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	
					Mempertahankan Prevalensi Obesitas	Mempertahankan Prevalensi Obesitas	13,6%	13,6%		13,6%		13,6%		13,6%		13,6%		13,6%	Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	
					Menurunkan Prevalensi Perokok Anak dan Remaja	Menurunkan Prevalensi Perokok Anak dan Remaja	7,2%	6,9%		6,6%		6,3%		6%		5,7%		5,7%	Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	
					Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis dalam Pengendalian Penyakit Tekanan Darah Tinggi	Meningkatnya kapasitas tenaga medis dalam pengendalian penyakit tekanan darah tinggi								24 Kab/Kota	100,000,000.00	24 Kab/Kota	186,000,000.00	24 Kab/Kota	Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	Kab/Kota
					Sosialisasi Pengendalian Faktor Resiko Obesitas bagi SKPD Provinsi Sulsel	Tersosialisasinya pengendalian faktor resiko obesitas di SKPD Provinsi Sulsel								100%	100,000,000.00	100%	155,000,000.00	100%	Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	Provinsi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
					Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Program Kesehatan Haji	Meningkatnya pembinaan dan status kesehatan Haji terhadap berbagai Penyakit Tidak Menular (PTM) di 24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	51,875,000	24 Kab/Kota	39,855,000	24 Kab/Kota	72,120,000	24 Kab/Kota	55,000,000.00	24 Kab/Kota	106,000,000.00	24 Kab/Kota	Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	Provinsi	
			Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)			Persentase desa yang mempunyai cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi minimal 80%	90.5%	95%	84,910,000	95%	53,050,000	95%	145,479,070	95%	347,260,784.00	95%	490,647,500.00	95%	Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	Provinsi dan Kab/Kota	
					Pelaksanaan DQS (Data Quality Self Assessment)	Tingkat akurasi dan kualitas pelaporan (%)	0							92%	48,000,000.00	95%	68,000,000.00	95%	Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	Provinsi dan Kab/Kota	
					Peningkatan Kapasitas Petugas Imunisasi bagi Kabupaten Daerah Sulit	Meningkatnya kapasitas Petugas Imunisasi di Kabupaten Daerah Sulit								5 Kab/Kota	25,000,000.00	5 Kab/Kota	50,000,000.00	5 Kab/Kota	Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	Provinsi dan Kab/Kota	
					Pertemuan Rutin Tim Pokja Eradikasi Polio	Terlaksananya pertemuan rutin Tim Pokja Eradikasi Polio								100%	25,000,000.00	100%	25,000,000.00	100%	Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	Provinsi	
					Pemeliharaan Cold Room dan Distribusi Vaksin	Terjaganya kualitas vaksin di tingkat Provinsi (%)	100%	100%	31,200,000	100%	53,050,000	100%	73,133,370	100%	57,500,000.00	100%	87,647,500.00	100%	Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	Provinsi	
					Pertemuan Monitoring Penggunaan Vaksin Baru	Terpantaunya penggunaan Vaksin Baru (Measles dan Rubella)		100%	53,710,000					100%	60,000,000.00	100%	60,000,000.00	100%	Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	Provinsi	
					Pemeliharaan Mobil Box Angkutan Vaksin	Terpeliharanya Mobil Box Angkutan Vaksin						1 Unit	25,000,000	1 Unit	25,000,000.00	1 Unit	35,000,000.00	1 Unit	Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	Provinsi	
					Pendistribusian Vaksin dan Logistik Lainnya	Tersedianya vaksin yang berkualitas di tingkat Kab/Kota dan Puskesmas	100%							100%	56,760,784.00	100%	100,000,000.00	100%	Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	Kab/Kota dan Puskesmas	
					Investigasi dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)	Terlaksananya investigasi dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)							100%	25,000,000	100%	25,000,000.00	100%	30,000,000.00	100%	Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	Kab/Kota
					Pelatihan Surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Kab/Kota	Terlatihnya Petugas Imunisasi Surveilans KIPI Kab/Kota						35 Orang	22,345,700	35 Orang	25,000,000.00	35 Orang	35,000,000.00	105 Orang	Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	Provinsi	
			Angka Penemuan / Kejadian Malaria per 1.000 Penduduk (API)		Penanggulangan Penyakit (P2) Malaria	Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Malaria (Annual Parasite Incidence (API) Per 1.000 Penduduk)	0,21 Per 1.000 Penduduk	1 Per 1.000 Penduduk	46,350,000	< 1 Per 1.000 Penduduk	22,500,000	< 1 Per 1.000 Penduduk	50,000,000	< 1 Per 1.000 Penduduk	40,000,000.00	< 1 Per 1.000 Penduduk	40,000,000.00	< 1 Per 1.000 Penduduk	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi	
					Pengadaan Logistik Malaria	Tersedianya Rapid Diagnostic Test (RDT) Malaria	0			15 Dos	22,500,000			10 Dos	15,000,000.00	10 Dos	15,000,000.00	35 Dos	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi	
					Pemeriksaan Sediaan Darah Malaria	Terlaksananya pemeriksaan uji silang SD Malaria	0					1.400 Sediaan Darah	35,000,000	1.000 Sediaan Darah	25,000,000.00	1.000 Sediaan Darah	25,000,000.00	3.400 Sediaan Darah	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi	
					Workshop Penatalaksanaan Kasus Malaria Terkini	Terlaksananya kegiatan workshop penatalaksanaan kasus malaria terkini	0											3 Kali	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi	
					Mass Blood Survey	Terlaksananya kegiatan Mass Blood Survey	0	4 Lokasi	46,350,000									4 Lokasi	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					Pengadaan Alat Pengendalian Vektor	Tersedianya Alat Pengendalian Vektor	0											Sprycan : 96 Buah; Mistblower : 8 Buah	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Pengadaan Bahan Pengendalian Vektor	Tersedianya Bahan Pengendalian Vektor	0											Larvasida : 500 Brqutes; Insektisida : 300 Liter	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Penyemprotan Rumah	Terlaksananya kegiatan IRS (Indoor Residual Spraying)	0											30 Lokasi	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Pengadaan Kelambu Berinsektisida	Tersedianya Kelambu Berinsektisida	0											20.264 Lembar	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Pembentukan Pos Malaria Desa (Posmalades)	Terbentuknya Pos Malaria Desa (Posmalades)	0											20 Buah	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Pembentukan POKJA Gebrak Malaria	Terbentuknya POKJA Gebrak Malaria di Kabupaten/Kota	2 Kab/Kota											22 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Pengadaan Buku Pedoman Program Malaria	Tersedianya Buku Pedoman Program Malaria	24 Paket											400 Paket	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Advokasi Eliminasi Malaria	Terlaksananya kegiatan advokasi eliminasi malaria untuk mendapatkan dukungan stakeholder	0											4 Kali	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program	Terlaksananya pertemuan koordinasi LS dan LP terkait Penyakit Malaria	0											5 Kali	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Pelatihan Program Malaria	Terlatihnya Tenaga Mikroskopist, Dokter, Paramedis dan Bidan	0											Mikroskopist = 120 Orang, Dokter = 100 Orang, Paramedis = 100 Orang, Bidan = 100 Orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Malaria	Diketuainya pencapaian hasil pelaksanaan Program Malaria	2 Kali											5 Kali	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Supervisi Supportif Program Malaria	Terbinanya Pengelola Program Malaria Kab/Kota	24 Kab/Kota											24 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Bimbingan Teknis Program Malaria	Terlaksananya bimbingan teknis Program Malaria	24 Kab/Kota					24 Kab/Kota	15,000,000					24 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular		Penanggulangan Penyakit (P2) Diare	Meningkatnya Cakupan Penemuan dan Pelayanan Penderita Diare	100%	78%	42,350,000	80%	35,869,000	83%	95,111,000	85%	92,500,000.00	90%	92,600,300.00			
					Pelaporan	Ketepatan dan keakuratan laporan kabupaten dan RS sehingga diketahui besarnya cakupan penemuan	91,67 %											100%	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Pelatihan / Workshop Petugas dan Dokter PKM	Meningkatnya pengetahuan dan pelaksanaan tatalaksana diare sesuai standar	0						4 kab/kota	64,000,000.00	4 kab/kota	64,000,000.00	8 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota	
					Workshop Pengelola Diare Kab/Kota dan Puskesmas	Terlaksananya workshop Pengelola Diare Kab/Kota dan Puskesmas	2 Kab/Kota		26,100,000									2 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Workshop Program Diare	Terlaksananya workshop Program Diare tentang LROA						2 Kab/Kota	30,111,000					2 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Sosialisasi Program Diare dan ISP lainnya	Update informasi terkait program Diare dan ISP lainnya	0											1 Kali	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Konsultasi Teknis Program Diare dan ISP lainnya	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program Diare dan ISP lainnya.	2 kali											8 Kali	Seksi Penanggulangan Penyakit	Pusat
					Bimbingan Teknis/ Supervisi Supportif Program Diare dan ISP lainnya	Dipahaminya pelaksanaan Program Diare dan tatalaksana standar pelayanan penderita	10 kab/kota	5 kab/kota	16,250,000	24 kab/kota	35,869,000	24 kab/kota	35,000,000	24 kab/kota	20,000,000.00	24 kab/kota	20,000,000.00	24 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					SKD KLB Diare pada daerah endemis Diare tinggi	Mencegah terjadinya Diare	0	0										6 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Pertemuan Monitoring dan Evaluasi	Diketuainya pelaksanaan Program Diare yang ada di Kab/kota, capaian kinerja dan pemecahan masalah yang dihadapi kab/kota	24 orang											96 Orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Cetak Buku Pedoman Program P2 Diare	Tersedianya Buku Pedoman Program Diare	0	0						100 buku	8,500,000.00	100 buku	8,600,300.00	200 Buku	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Advokasi dan Sosialisasi Hepatitis	Terlaksananya pertemuan advokasi dan sosialisasi Hepatitis						2 Kab/Kota	30,000,000					2 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					Penanggulangan Penyakit (P2) ISPA	Meningkatnya Cakupan Penemuan Pneumonia (%)	9%	9.30%	40,500,000	9.60%	48,253,000	10%	51,008,000	10.50%	50,000,000.00	10.80%	50,000,000.00	< 1	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi, Kab/ kota
					Sosialisasi Tatalaksana Kasus ISPA	Terlaksananya sosialisasi tatalaksana ISPA		35 org	25,500,000	70 org	48,253,000	25 org	16,008,000	35 org	30,000,000.00	35 org	30,000,000.00	200 Orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Pertemuan Monev	Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan dan tersusunnya rencana kegiatan program ISPA selanjutnya	0											120 Orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Monitoring dan Supervisi Supportif Program P2 ISPA	Terbina dan terkoordinasinya pelaksanaan program ISPA di kabupaten/kota		8 kab/kota	15,000,000			16 Kab/Kota	35,000,000	24 Kab/Kota	20,000,000.00	24 Kab/Kota	20,000,000.00	24 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Workshop Program ISPA	Tersosialisasinya Rencana Tindak Lanjut Penanggulangan ISPA	1 Kali											1 Kali	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Penanggulangan Penyakit (P2) Typoid	- Menurunnya angka kesakitan penyakit Tifoid (IR per 1.000 pddk) - Menurunnya angka kematian (CFR %)	-25 -2	-2 < 1	47,250,000	< 2 < 1	52,702,000	< 2 < 1	51,986,000	< 2 < 1	66,000,000.00	< 2 < 1	66,295,000.00	< 2 < 1	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi Kab/Kota Puskesmas
					Workshop Tatalaksana Teknis Program Tifoid Kab/Kota	Terlaksananya workshop tatalaksana teknis Program Tifoid	48 Orang					48 Orang	51,986,000					48 Orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Sosialisasi Tatalaksana Teknis Pengendalian Penyakit Tifoid	Terlaksananya Sosialisasi Tifoid Bagi Petugas Kabupaten/Kota	0	8 Kab/Kota	37,250,000				8 Kab/Kota	25,000,000.00	8 Kab/Kota	25,000,000.00	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi & Kab/Kota
					Supervisi/pembinaan & pemantauan Program P2 Tifoid	Terbinanya pengelola program dan diperolehnya akurasi data program P2 Tifoid	7 kab/kota	12 Kab/Kota	10,000,000	24 Kab/Kota	52,702,000			24 Kab/Kota	25,000,000.00	24 Kab/Kota	25,295,000.00	24 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Pertemuan Monev Program P2 Tifoid	Terevaluasinya dan tersusunnya rencana pelaksanaan kegiatan Program P2 Tifoid	0											96 Orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Pelatihan Tatalaksana Tifoid bagi Pengelola Program Tifoid	Terlatihnya petugas pengelola Program Tifoid	0											72 Orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Pengadaan Laboratorium Supply	Tersedianya bahan test widal dan terlaksananya pemeriksaan widal bagi suspek penyakit Tifoid	0											280 Paket	Seksi Penanggulangan Penyakit	Puskesmas
					Cetak Buku Pedoman Program Tifoid	Tersedianya buku Pedoman Program Tifoid	0											150 Buku	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Survei Prevalensi Penyakit Tifoid	Diketahui tingkat prevalensi Penyakit Tifoid di suatu wilayah/daerah	0											12 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Konsultasi Teknis Program P2 Tifoid	Diketahui informasi baru sesuai standar Pengendalian Penyakit Tifoid	0							2 Kali	16,000,000.00	2 Kali	16,000,000.00	4 Kali	Seksi Penanggulangan Penyakit	Pusat
					Penanggulangan Penyakit (P2) TB	Jumlah kasus TB per 100.000 pddk	158	160	45,999,000	161	62,528,000	163	27,825,000	165	107,000,000.00	167	107,000,000.00	168	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi Kab/Kota
						Persentase kasus baru TB Paru BTA Positif yang ditemukan	55	56		57		58		59		60		60		
						Persentase kasus baru TB Paru BTA Positif yang disembuhkan	88	>85		>85		>85		>85		>85		>85		
					Monitoring dan Evaluasi Program TB Tingkat provinsi	Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan dan tersusunnya rencana kegiatan program TB selanjutnya	0			57 org	62,528,000							57 Orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Pelatihan Program TB bagi tenaga Fasyankes	Terlatihnya petugas dan atau dokter Fasyankes tentang manajemen dan tatalaksana kasus TB	0											225 Orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Pelatihan Mikroskopis bagi petugas Laboratorium fasyankes	Terlatih dan terampilnya petugas laboratorium dalam tatalaksana kasus TB	0											60 Orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Pemberian PMT TB MDR	Adanya dukungan dan motivasi kepada pasien TB MDR dalam menjalani masa pengobatan	0							20 org	10,000,000.00	20 org	10,000,000.00	40 Orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Transportasi Pasien TB MDR	Adanya dukungan transportasi kepada pasien TB MDR	0							20 org	20,000,000.00	20 org	20,000,000.00	40 Orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Supervisi Supportif Program P2 TB	Terbina dan terkoordinasinya pelaksanaan program TB di Kabupaten/kota dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0							24 kab/kota	20,000,000.00	24 kab/kota	20,000,000.00	24 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Supervisi Supportif Terpadu TB MDR dan TB HIV	Terbinanya Petugas/Pengelola Program P2 TB MDR dan TB HIV	12 Orang		36,000,000									12 Orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Pengadaan logistik Tuberculosis (TB)	Tersedianya Logistik program P2 TB	0					1 paket	12,000,000	1 paket	25,000,000.00	1 paket	25,000,000.00	3 Paket	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Pengadaan Laboratorium Supply TB	Tersedianya bahan laboratorium untuk mendukung penemuan kasus dan tindak lanjut	0		9,999,000									2 Paket	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi					
								Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018								
								Target	Target	Target	Target	Target								
								Rp	Rp	Rp	Rp	Rp								
					Pengadaan Format RR (Recording and Reporting) TB-MDR dan TB-HIV	Tersedianya format pencatatan dan pelaporan program TB-MDR dan TB-HIV	0			1 Paket	15,825,000	1 Paket	25,000,000.00	1 Paket	25,000,000.00	3 Paket	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi		
					Workshop IPT (INH Profilaksis Therapy) bagi ODHA	Tersosialisasinya tentang tatalaksana IPT Bagi ODHA oleh Petugas di RS ARV	0									125 Orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi		
					Workshop TB MDR bagi Dokter RS Kab/Kota	Terlatihnya dokter RS tentang manajemen dan tatalaksana kasus TB-MDR	0									125 Orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi		
					Konsultasi Teknis Program P2 TB ke Pusat	Ditemukannya solusi dalam penanganan masalah TB di tingkat provinsi	0					2 kali	7,000,000.00	2 kali	7,000,000.00	4 Kali	Seksi Penanggulangan Penyakit	Pusat		
					Penanggulangan Penyakit (P2) Kusta	Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Kusta (Prevalensi Rate per 10.000 pdck)	1,3	1,3	45,500,000	1,3	88,310,000	1,2	65,000,000	1,1	170,000,000.00	1	170,590,000.00	< 1	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi Kab/Kota Desa
					Pertemuan Aliansi Daerah Eliminasi Kusta (ADEK)	Tersedianya dukungan dana dan politik untuk kegiatan program kusta	0									2 Kali	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi		
					Pelatihan Program Kusta	Terlatihnya petugas dan atau dokter UPK tentang manajemen dan tatalaksana kasus kusta	0									180 orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi		
					Pelatihan Refreshing bagi Petugas Puskesmas	Meningkatnya pengetahuan petugas tentang manajemen dan tatalaksana kasus kusta	0									180 orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi		
					Pertemuan Movev	Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan dan tersusunnya rencana kegiatan program kusta selanjutnya	0									240 Orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi		
					Pemeriksaan Kontak (Penderita Kusta)	Ditemukannya penderita baru dari hasil pemeriksaan kontak penderita yang ditemukan atau yang berobat	0					1350 kasus	25,000,000.00	1300 kasus	25,000,000.00	2.650 Kasus	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota		
					Monitoring dan Supervisi Supertif Program P2 Kusta	Terbina dan terkoordinasinya pelaksanaan program Kusta di kabupaten/kota	8 kab/kota	12 kab/kota	34,500,000	12 kab/kota	53,510,000	18 Kab/Kota	55,000,000	24 kab/kota	25,000,000.00	24 kab/kota	24 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota	
					Pengadaan Format RR (Recording and Reporting) P2 Kusta	Tersedianya format pencatatan dan pelaporan program P2 Kusta	1 Paket	1 Paket	11,000,000	4 Paket	34,800,000	3 Paket	10,000,000	3 Paket	15,000,000.00	3 Paket	15,000,000.00	14 Paket	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Komunikasi, Informasi dan Edukasi : Radio Spot, Dialog interaktif dan Bahan KIE	Dipahaminya masalah penyakit kusta oleh masyarakat melalui media cetak dan elektronik	0					2 kali, 2 kali, 4000 lbr	25,000,000.00	2 kali, 2 kali, 4000 lbr	25,000,000.00	4 Kali; 4 Kali; 8.000 Lbr	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi		
					Rapid Village Survey	Ditemukannya penderita kusta baru sebelum terjadi cacat atau sebelum terjadi penularan lebih lanjut	0					6 Kab/Kota	30,000,000.00	6 Kab/Kota	30,000,000.00	12 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota		
					Workshop Program Kusta	Tersosialisasi dan tersusunnya rencana tindaklanjut penanggulangan penyakit kusta	0									3 Kali	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi		
					Peningkatan Peran Kader dalam Deteksi Dini Kasus Kusta	Ditemukannya suspek kusta di masyarakat	0					6 Kab/Kota	25,000,000.00	6 Kab/Kota	25,000,000.00	12 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota		
					Konsultasi Teknis Program P2 Kusta ke Pusat	Ditemukannya solusi dalam penanganan masalah kusta di tingkat provinsi	0									10 Kali	Seksi Penanggulangan Penyakit	Pusat		
					Pertemuan Advokasi Kusta di Daerah Endemis Tinggi	Tersedianya dukungan dana dan politik untuk kegiatan program kusta	0					5 Kab/Kota	25,000,000.00	6 Kab/Kota	25,295,000.00	11 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota		
					Penanggulangan Penyakit (P2) IMS dan HIV/AIDS				46,000,000		124,297,000		44,120,000		75,000,000.00		75,590,000.00		Seksi Penanggulangan Penyakit	
					Sero Survei Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV	- Prevalensi HIV Terlaksananya penemuan dan pengobatan kasus IMS	0,2	< 5%		< 5%		< 5% 1.500 orang	44,120,000	< 5% 750 Orang	25,000,000.00	< 5% 750 Orang	25,000,000.00	< 5% 3.000	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Sosialisasi layanan PDP	- Cakupan ODHA yg mendapat ART	85%									100%	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi		
					Pelatihan PDP/CST	- Pembentukan RS rujukan ART	18 kab/kota									24 kab/kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota		
						- Darah Donor diskriming HIV	100%									100%	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi		
					Survey Penggunaan Kondom	Presentase penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko	0									100%	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota		
					Rapid Survey Pengetahuan Komprehensif pada Penduduk Usia 15-24 Tahun	Presentase anak usia 15-24 tahun mempunyai pengetahuan komprehensif ttg HIV-AIDS Terlaksananya Rapid Survey Pengetahuan Komprehensif pada Penduduk Usia 15-24 Tahun	28,2%	50% 900 Orang	46,000,000	75% 1200 Orang	55,297,000		85% 500 Orang	25,000,000.00	90% 500 Orang	25,295,000.00	100%	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota	
					Pelatihan PITC	Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang	0									24 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
					Pelatihan/Refreshing klinik KTS/VCT	menerima konseling dan testing HIV	24 RS											24 PKM di Kab/kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi	
					Pelatihan Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) HIV AIDS	Terlaksananya pelatihan LKB HIV AIDS	2 Kab/Kota						2 Kab/Kota	25,000,000.00	2 Kab/Kota	25,295,000.00	4 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi		
					Pengadaan Reagen HIV & SIFILIS	Tersedianya Logistik Pemeriksaan Tes HIV & Sifilis	0											1.800 Tes	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi	
					Pengadaan Logistik HIV					Reagen Test HIV : 50 Dos; Reagen Test Sifilis : 20 Dos	69,000,000							Reagen Test HIV : 50 Dos; Reagen Test Sifilis : 20 Dos	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi	
					Penanggulangan Penyakit (P2) Zoonosis	Meningkatnya Penemuan dan Penatalaksanaan kasus penyakit zoonosis	72%	75%	36,000,000	78%	94,846,000	80%	78,000,000	83%	123,000,000.00	85%	124,090,000.00	85%			
					Pelacakan dan Penyelidikan Epidemiologi, Penatalaksanaan Kasus Zoonosis	Terlaksananya pelacakan dan penyelidikan Epidemiologi, penatalaksanaan Kasus Zoonosis	24 Kab/Kota						24 Kab/Kota	25,000,000.00	24 Kab/Kota	25,000,000.00	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota	
					Pengadaan Buffer Stock Vaksin Anti Rabies (VAR)	Tersedianya Buffer Stock Vaksin Aanti Rabies (VAR)	85 kuur	100 kuur	36,000,000	100 kuur	46,800,000	100 kuur	63,000,000	100 kuur	50,000,000.00	100 kuur	50,590,000.00	500 Kuur	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi	
					Pelatihan / Workshop Petugas dan Dokter PKM	Meningkatnya pengetahuan dan pelaksanaan Tatalaksana Penyakit Zoonosis sesuai standar	0											13 Kab/kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota	
					Konsultasi Teknis Program Zoonosis	Terlaksananya konsultasi teknis Program Zoonosis	0						2 kali	18,000,000.00	2 kali	18,500,000.00	4 Kali	4 Kali	Seksi Penanggulangan Penyakit	Pusat	
					Bimbingan Teknis/Supervisi Supportive Program Zoonosis	Terbina dan terkoordinasinya pelaksanaan Program Zoonosis di Kab/Kota	0			10 Kab/Kota	48,046,000	4 Kab/Kota	15,000,000	5 Kab/Kota	20,000,000.00	5 Kab/Kota	20,000,000.00	24 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota	
					Pertemuan Monitoring dan Evauasi Provinsi dan Kabupaten/Kota	Diketahuinya pelaksanaan program Zoonosis yang ada di Kab/Kota, capaian kinerja dan pemecahan masalah yang dihadapi kab/kota	0											24 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi	
					Cetak Buku Pedoman dan Brosur, Pamflet Pengendalian Penyakit Zoonosis	Tersedianya buku pedoman dan brosur/pamflet pengendalian penyakit zoonosis	-	-	-					100 buku, 50 brosur, 50 pamflet	10,000,000.00	100 buku, 50 brosur, 50 pamflet	10,000,000.00	200 buku, 100 brosur, 100 pamflet	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi	
					Penanggulangan Penyakit (P2) DBD	Angka Kesakitan (IR) (per 100.000 penduduk)	51	30	98,100,000	25	137,327,000	25	258,571,429	25	198,000,000.00	22	200,041,400.00	< 22	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi & Kab/Kota	
					Pertemuan Manajemen Perencanaan Program DBD	Tesusunnya perencanaan program DBD di Provinsi	0											120 Orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi	
					Pertemuan Evaluasi Program DBD	Terevaluasinya program DBD	0											96 Orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi	
					Pertemuan Jejaring & Pokjanel DBD	Terbentuknya Jejaring & Pokjanel DBD	40 orang							45 org	25,000,000.00	45 org	25,295,000.00	45 Orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi	
					Pelatihan bagi Pengelola Program & Laboran PKM dalam penemuan kasus	Terlatihnya tenaga pengelola program & Laboran PKM	0											96 Orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi	
					Survey Kepadatan Jentik Aedes Aegypti (Demam Berdarah Dengue/DBD)	Terlaksananya Survey/Pemantauan Kepadatan Jentik Aedes Aegypti (DBD)	0	24 Kab/Kota	28,100,000			15 Kab/Kota	35,000,000					24 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota	
					Pengadaan Buku Pedoman DBD	Tersedianya buku pedoman DBD di Kab/Kota	0							40 Buah	6,500,000.00	50 Buah	6,576,700.00	90 Buah	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi	
					Pengadaan Buku Jumantik	Tersedianya buku Jumantik di Kab/kota	0							40 Buah	6,500,000.00	50 Buah	6,576,700.00	90 Buah	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi	
					Pengadaan Bahan Penemuan Kasus (RDT)	Tersedianya bahan RDT untuk penemuan kasus DBD	0							40 Dos	15,000,000.00	50 Dos	15,177,000.00	90 Dos	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi	
					Pengadaan Larvasida	Tersedianya Larvasida di Kab/kota	25 Box							45 Box	20,000,000.00	45 Box	20,236,000.00	90 Box	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi	
					Pengadaan Insektisida	Tersedianya Insektisida di Kab/Kota	0							120 Liter	25,000,000.00	120 Liter	25,000,000.00	240 Liter	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi	
					Pengadaan Bahan Penanggulangan Kasus DBD	Tersedianya bahan penanggulangan kasus DBD di kab/kota	0							110 Fokus	25,000,000.00	120 Fokus	25,295,000.00	230 Fokus	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi	
					Penanggulangan Kasus DBD (Demam Berdarah Dengue)	Terlaksananya penanggulangan kasus DBD		95%	70,000,000			95%	25,000,000					95%	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota	
					Pengadaan Jumantik kit	Tersedianya Jumantik Kit di Kab/Kota	0							50 Paket	20,000,000.00	50 Paket	20,236,000.00	100 Paket	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi	
					Bimtek Program DBD	Terbinanya pengelola program DBD kab/kota	6 Kab	12 Kab		12 Kab/Kota	52,327,000			12 Kab/Kota	20,000,000.00	12 Kab/Kota	20,236,000.00	12 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					Pertemuan Perencanaan Program Vektor/Entomologi	Tersusunnya perencanaan program vektor di Prov	0											96 Orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Pemantauan Resistensi Nyamuk Anopheles	Tersedianya data resistensi nyamuk Anopheles	0											24 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Pemantauan Resistensi Nyamuk Aedes	Tersedianya data resistensi nyamuk Aedes	0											24 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Pemetaan Vektor Malaria	Tersedianya data pemetaan vektor	0					5 Kab/Kota	10,000,000.00	5 Kab/Kota	10,118,000.00	10 Kab/Kota			Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Uji Resistensi Insektisida	Tersedianya data resistensi insektisida di Kab/Kota	0					5 Kab/Kota	10,000,000.00	5 Kab/Kota	10,118,000.00	10 Kab/Kota			Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Pelatihan Pengendalian Vektor	Tersedianya tenaga Entomologi Kab/Kota	0											120 Orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Pemetaan Surveilans Vektor	Terlaksananya pemetaan Surveilans Vektor	0			9 Kab/Kota	57,000,000							9 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
						Tersedianya buku pedoman vektor	0	-	0	100		100		100		100	-	100%	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Bimtek Program Vektor	Terbinanya Pengelola Program Vektor Kab/Kota	0					24 Kab/Kota	198,571,429	5 Kab/Kota	15,000,000.00	5 Kab/Kota	15,177,000.00	19 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Pengadaan Laboratorium Supply DBD	Tersedianya Rapid Diagnostic DBD				1 Paket	28,000,000							1 Paket	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Penanggulangan Penyakit (P2) Filaria	100% kab/kota melakukan Pemetaan endemisitas Filariasis	63%			92%		100%						100%	Seksi Penanggulangan Penyakit	
						100% kab/kota endemisitas melakukan POMP filariasis	75%	100%	59,400,000		53,612,000		-		50,000,000.00		50,000,000.00	100%		
						90 % penderita kronis filariasis melaksanakan tatalaksana kasus	35%	50%		55%		60%		65%		70%		100%		
					Survei Endemisitas Kab/Kota (Survei Darah Jari I)	Tersedianya data tingkat endemisitas filariasis kab/kota.	19 kab/kota											5 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Survei Darah Jari	Terlaksananya kegiatan survey darah jari kasus kronis daerah endemis		2,000 Sampel	59,400,000									2,000 Sampel	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Evaluasi Cakupan Kab/Kota POMP	Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan pengobatan	0											1 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Survei Evaluasi Tahap II (SDJ II) pada 4 kab/kota endemis	Tersedianya data tingkat endemisitas filariasis kab/kota pada tahap II	0											2 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Survei Darah Jari (SDJ) tahap III dan treatment Assesment Survey (TAS)	Tersedianya data tingkat endemisitas filariasis kab/kota pada tahap III dan terevaluasinya hasil pelaksanaan pengobatan kasus filariasis	0								1 kab/kota	50,000,000.00		1 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Pelatihan Tatalaksana Kasus Filariasis	Terlatihnya petugas/pengelela program filariasis dalam hal manajemen dan tatalaksana kasus filariasis	0			30 orang	53,612,000			30 orang	50,000,000.00			60 Orang	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi
					Monitoring & Evaluasi Program Filariasis	Terevaluasi dan tersusunnya rencana tindak lanjut pelaksanaan program Filariasis	0											18 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Penanggulangan Penyakit (P2) Cacangan	Pengendalian dan penatalaksanaan penyakit kecacingan	17%	35%	-	37,5%	-	67 %	140,000,000.00	84%	65,000,000.00	100 %	65,000,000.00	35 %	Seksi Penanggulangan Penyakit	
						Survei Kecacingan Anak SD/MI	Persentase Puskesmas Kab/Kota melaksanakan Program Pengendalian Kecacingan (target sasaran anak sekolah dan anak pra sekolah)	0										24 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
						Pelatihan Manajemen dan Tatalaksana Kasus Kecacingan	Terlatihnya petugas/pengelela Program Cacangan dalam hal manajemen dan tatalaksana kasus Kecacingan	0						6 Kab/Kota%	50,000,000.00	6 Kab/Kota%	50,000,000.00	12 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota
					Pemetaan dan Evaluasi Pengobatan Selektif dan Pengobatan Massal Kecacingan	Diperolehnya data wilayah pelaksanaan pengobatan selektif dan pengobatan massal Kecacingan	0						6 Kab/Kota%	15,000,000.00	6 Kab/Kota%	15,000,000.00	12 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/kota	
					Pemantauan dan Evaluasi Pengobatan Selektif dan Pengobatan Massal Kecacingan	Terpantaunya evaluasi pengobatan selektif dan pengobatan massal kecacingan						9 Kab/Kota	20,000,000					9 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/kota
					Sosialisasi/Advokasi Kemitraan Pengendalian Kecacingan	Tersosialisasinya dan diperolehnya dukungan dana pelaksanaan program P2 Cacangan	0											3 Kali	Seksi Penanggulangan Penyakit	Provinsi & kab/kota
					Sosialisasi dan Advokasi Pengendalian Kecacingan Tingkat Kabupaten	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi pengendalian kecacingan tingkat Kabupaten						1 Kab/Kota	120,000,000					1 Kab/Kota	Seksi Penanggulangan Penyakit	Kab/Kota

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24		Penyelidikan/Penangulangan KLB Penyakit Menular dan Posko Penanggulangan Bencana	Persentase desa terkena KLB yang ditangani < 24 jam, dan tertanggulangnya KLB dan Bencana di Masyarakat	96.46%	100%	415,474,000	100%	166,045,500	100%	577,778,358	100%	432,145,000.00	100%	420,145,000.00	100%	Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	Provinsi dan Kab/Kota	
					Supervisi Supportif Sistem Kewaspadaan Dini Respon KLB	Meningkatkan sistem kewaspadaan respon KLB di seluruh Kabupaten/Kota	14 Kab/Kota										24 Kab/Kota	44,783,500.00	24 Kab/Kota	Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	Kab/Kota
					Penyelidikan / Penanggulangan KLB Penyakit Menular	Persentase desa terkena KLB yang ditangani < 24 jam Tertanggulangnya KLB di Masyarakat	96.46%	100%	185,950,000			100%	212,701,429	100%	165,547,500.00	100%	150,547,500.00	100%	Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	Kab/Kota	
					Review Surveilans Epidemiologi Penyakit di Provinsi	Terlatihnya petugas Surveilans Kab/Kota tentang penyelenggaraan Surveilans untuk menurunkan Kejadian Luar Biasa	22 Petugas Surveilans Kab/Kota											24 Petugas Surveilans Kab/Kota		Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	Provinsi
					Training of Trainer (TOT) Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Penyakit Respon KLB	Terlatihnya Petugas Surveilans Kab/Kota tentang Sistem Kewaspadaan Dini (EWARS)	22 Petugas Surveilans Kab/Kota							26 Petugas Surveilans Kab/Kota	44,783,500.00			26 Petugas Surveilans Kab/Kota		Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	Provinsi
					Pertemuan Provincial Epidemiologi Surveilans Team (PEST)	Penurunan KLB penyakit menular melalui pertemuan PEST	113 Laporan Kejadian							90 Laporan	54,814,000.00	85 Laporan	54,814,000.00	175 Laporan Kejadian		Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	Provinsi
					Pengembangan Provincial Epidemiologi Surveilans Team (PEST)	Tersedianya Buletin Epidemiology Penyakit Menular		408 Exp	76,174,000	408 Exp	37,920,000	408 Exp	65,355,500					1,224 Exp		Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	Provinsi
					Penyelenggaraan Posko Terpadu dan Operasional Kapal Penanggulangan Bencana	Terlaksananya kegiatan Posko Bencana dan Operasional Kapal Penanggulangan Bencana		100%	123,950,000	100%	128,125,500	100%	260,521,429	100%	125,000,000.00	100%	125,000,000.00	100%		Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	Provinsi
					Pemantauan Sistem Kewaspadaan Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya sistem kewaspadaan penanggulangan bencana	10 Kab/Kota		29,400,000			17 Kab/Kota	39,200,000	22 Kab/Kota	42,000,000.00	24 Kab/Kota	45,000,000.00	24 Kab/Kota		Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra	Kab/Kota
					Penyehatan Lingkungan				718,010,116		1,163,931,000		841,448,429		807,300,000.00		812,000,000.00				
			Cakupan Kualitas Air Minum		Pengawasan Kualitas Air Minum Masyarakat	Persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas	64.20%											77%	Seksi Penyehatan Lingkungan	Kab/Kota	
						Akses air bersih (%)	85%											90.50%	Seksi Penyehatan Lingkungan	Kab/Kota	
					Pelatihan Pengawasan Kualitas Air Minum	Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	95%											100%	Seksi Penyehatan Lingkungan	Kab/Kota	
					Pelatihan Manajemen Pengawasan Kualitas Air Minum	Terlaksananya pelatihan manajemen pengawasan kualitas air	24 Orang		38,400,000									24 Orang		Seksi Penyehatan Lingkungan	Provinsi
					Pengawasan Kualitas Sarana Air Minum Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pengawasan kualitas sarana air minum masyarakat				24 Kab/Kota	50,000,000							24 Kab/Kota		Seksi Penyehatan Lingkungan	Kab/Kota
					Pembinaan Pengawasan Kualitas Air Minum Masyarakat	Terlaksananya pembinaan pengawasan kualitas air minum masyarakat						24 Kab/Kota	35,000,000	24 Kab/Kota	35,000,000.00	24 Kab/Kota	35,000,000.00	24 Kab/Kota		Seksi Penyehatan Lingkungan	Kab/Kota
			Cakupan Akses Sanitasi Dasar		Pengawasan Sanitasi Dasar dan Kualitas Lingkungan	Persentase akses terhadap sanitasi dasar/jamban yang berkelanjutan	65%											70%	Seksi Penyehatan Lingkungan	Kab/Kota	
						Jumlah desa yang melaksanakan STBM (Jumlah Desa)	300 Desa											700 Desa		Seksi Penyehatan Lingkungan	Kab/Kota

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
						Jumlah sarana TTU yang memenuhi syarat kesehatan (Jumlah TTU)	83 TTU											88 TTU	Seksi Penyehatan Lingkungan	Kab/Kota
						Persentase rumah yang memenuhi syarat	83%											88%	Seksi Penyehatan Lingkungan	Kab/Kota
						Jumlah sarana tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan (Unit)	70 Unit											84 Unit	Seksi Penyehatan Lingkungan	Kab/Kota
						Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan limbah medis di sarana/fasilitas pelayanan kesehatan	80%											85%	Seksi Penyehatan Lingkungan	Kab/Kota
					TOT Community Lead Total Sanitation	Terlaksananya TOT Community Lead Total Sanitation	30 Orang	61,500,000					30 Orang	60,000,000.00	30 Orang	60,000,000.00	90 Orang	Seksi Penyehatan Lingkungan	Provinsi	
					Monitoring dan Evaluasi Sanitasi Dasar	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan sanitasi dasar	24 Kab/Kota	124,025,116					24 Kab/Kota	80,000,000.00	24 Kab/Kota	119,700,000.00	24 Kab/Kota	Seksi Penyehatan Lingkungan	Kab/Kota	
					Pelatihan Pengawasan Pengelolaan Limbah Sarana Kesehatan	Terlaksananya pelatihan pengawasan pengelolaan limbah sarana kesehatan	24 Orang	40,600,000									24 Orang	Seksi Penyehatan Lingkungan	Provinsi	
					TOT Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) dan Tempat-Tempat Umum (TTU)	Tersedianya petugas yang terampil dan mampu melaksanakan pembinaan dan pengawasan TPM dan TTU yang baik	24 Kab/Kota	42,800,000									24 Kab/Kota	Seksi Penyehatan Lingkungan	Provinsi	
					Ranperda Kawasan Tanpa Asap Rokok (Naskah Akademik)	Tersusunnya Naskah Akademik Kawasan Tanpa Asap Rokok	1 Dokumen	200,000,000										1 Dokumen	Seksi Penyehatan Lingkungan	Provinsi
					Pelatihan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU)	Terlaksananya pelatihan sanitasi Tempat-tempat Umum (TTU)			24 Kab/Kota	74,325,000								24 Kab/Kota	Seksi Penyehatan Lingkungan	Provinsi
					Pelatihan Pengawasan Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM)	Terlaksananya pelatihan sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM)			24 Kab/Kota	65,425,000	24 Kab/Kota	120,000,000	24 Kab/Kota	100,000,000.00	24 Kab/Kota	100,000,000.00	24 Kab/Kota	Seksi Penyehatan Lingkungan	Provinsi	
					Pemantauan Sanitasi Perumahan	Terlaksananya koordinasi sanitasi perumahan			15 Kab/Kota	54,425,000								15 Kab/Kota	Seksi Penyehatan Lingkungan	Kab/Kota
					Pelatihan Pengelolaan Limbah Medis pada Sarana Kesehatan	Terlaksananya pelatihan pengelolaan limbah medis pada sarana kesehatan			1 Angkatan	71,825,000								1 Angkatan	Seksi Penyehatan Lingkungan	Provinsi
					Pemantauan Klinik Sanitasi	Terlaksananya pemantauan Klinik Sanitasi					24 Kab/Kota	100,000,000	24 Kab/Kota	100,000,000.00	24 Kab/Kota	100,000,000.00	24 Kab/Kota	Seksi Penyehatan Lingkungan	Kab/Kota	
					Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi Limbah Medis	Terlaksananya pembinaan dan monev pengolahan Limbah Medis					24 Kab/Kota	62,300,000	24 Kab/Kota	62,300,000.00	24 Kab/Kota	62,300,000.00	24 Kab/Kota	Seksi Penyehatan Lingkungan	Kab/Kota	
					Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Program Penyehatan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan pertemuan evaluasi dan perencanaan Program Penyehatan Lingkungan					24 Kab/Kota	77,057,500	24 Kab/Kota	75,000,000.00	24 Kab/Kota	75,000,000.00	24 Kab/Kota	Seksi Penyehatan Lingkungan	Provinsi	
					Bimtek dan Monev Sanitasi TPM (Tempat Pengelolaan Makanan)	Terlaksananya pembinaan dan monev Sanitasi TPM					24 Kab/Kota	65,000,000					24 Kab/Kota	Seksi Penyehatan Lingkungan	Kab/Kota	
					Pembinaan Kesehatan Lingkungan Sekolah	Terlaksananya pembinaan kesehatan lingkungan sekolah					24 Kab/Kota	70,389,000	24 Kab/Kota	70,000,000.00	24 Kab/Kota	70,000,000.00	24 Kab/Kota	Seksi Penyehatan Lingkungan	Kab/Kota	
					Pengembangan Wilayah Sehat	Persentase Kabupaten/Kota sehat	50%											100%	Seksi Penyehatan Lingkungan	Kab/Kota
					Pembinaan Kabupaten/Kota Sehat	Terselenggaranya pembinaan Kabupaten/Kota Sehat	24 Kab/Kota	210,685,000										24 Kab/Kota	Seksi Penyehatan Lingkungan	Kab/Kota
					Pembinaan dan Verifikasi Pelaksanaan Kab/Kota Sehat	Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang dibina dan diverifikasi			24 Kab/Kota	720,581,000	24 Kab/Kota	243,982,429	24 Kab/Kota	85,000,000.00	24 Kab/Kota	85,000,000.00	24 Kab/Kota	Seksi Penyehatan Lingkungan	Kab/Kota	
					Pertemuan Kab/Kota Sehat	Terlaksananya pertemuan Kab/Kota Sehat			24 Kab/Kota	127,350,000			24 Kab/Kota	100,000,000.00			24 Kab/Kota	Seksi Penyehatan Lingkungan	Provinsi	
					Pertemuan Koordinasi Program Kab/Kota Sehat	Terlaksananya pertemuan koordinasi Program Kab/Kota Sehat					24 Kab/Kota	67,719,500			24 Kab/Kota	65,000,000.00	24 Kab/Kota	Seksi Penyehatan Lingkungan	Provinsi	
					Konsultasi Teknis Kabupaten Sehat di Pusat	Terlaksananya konsultasi teknis Kabupaten Sehat ke Pusat							100%	40,000,000.00	100%	40,000,000.00	100%	Seksi Penyehatan Lingkungan	Pusat	
		Meningkatnya Status Gizi Masyarakat			Program Perbaikan Gizi Masyarakat			449,730,000.00		610,000,000.00		859,446,429.00		1,030,627,405.00		1,042,788,808.00				

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Prevalensi Balita Gizi Kurang		Peningkatan kapasitas kader dalam pemanfaatan pangan lokal dalam mengatasi gizi kurang	- Terlaksananya peningkatan kapasitas kader dalam pemanfaatan pangan lokal dalam mengatasi gizi kurang - Terlaksananya kegiatan pendataan remaja putri - Terlaksananya suplementasi gizi Mikro (Fe) - Terlaksananya bimtek pada Petugas gizi dan kader Posyandu	0%	30%		45%	215,215,000	60%	111,340,000	75%				80%	Seksi Gizi Masyarakat	24 Kab / Kota	
			Prevalensi Balita Gizi Buruk		Pencapaian Perbaikan Gizi Masyarakat melalui Penguatan Jejaring dan Mitra LS/LP dalam Gerakan Nasional Sadar Gizi Fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan	Penguatan kerjasama LS/LP dalam Gerakan Nasional Sadar Gizi Fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan	50%						75%	80,000,000	80%	80,944,000.00		80%	Seksi Gizi Masyarakat	24 Kab / Kota	
					Fasilitasi dan Bimtek Petugas terkait Pembinaan Masyarakat menuju 1000 Hari Pertama Kehidupan	Terlaksananya fasilitasi dan bimtek Petugas terkait pembinaan masyarakat menuju 1.000 Hari Pertama Kehidupan						8 Kab/Kota	100,000,000					8 Kab/Kota	Seksi Gizi Masyarakat	24 Kab / Kota	
			Prevalensi Balita Stunting		Pendampingan Kasus Gizi Buruk oleh Kader Posyandu	Terlaksananya pendampingan kasus gizi buruk (250 kasus)	50%		70%	156,475,000		75%	186,475,000	80%	188,675,405	85%	190,901,775.00		85%	Seksi Gizi Masyarakat	7 Kab/Kota (Maros, Wajo, Pinrang, Makassar, Toraja Utara, Tator, Bone)
			Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin		Pengadaan Bufferstock Bahan Antisipasi KLB	Tersedianya Buffer Stock bahan antisipasi KLB sebesar 20 % dari total sasaran (kasus)	35%	60	249,730,000	65		70	75		80				80%	Seksi Gizi Masyarakat	24 Kab / Kota
					Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Konseling MP-ASI	Persentase bayi yang mendapat MP-ASI	60%												90%	Seksi Gizi Masyarakat	24 Kab / Kota
			Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan		Pelayanan Balita Gizi Buruk	Persentase balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%						100%	300,000,000	100%	303,540,000.00		100%	Seksi Gizi Masyarakat	24 Kab / Kota	
			Cakupan Penimbangan Balita (D/S)		Pertemuan Manajemen Percepatan D/S Bagi Petugas Gizi Puskesmas	Persentase balita ditimbang berat badannya	50%												95%	Seksi Gizi Masyarakat	24 Kab / Kota
					Penguatan Jejaring dan Mitra Posyandu dalam Peningkatan D/S	Terciptanya koordinasi Mitra Posyandu dalam percepatan D/S	0												90%	Seksi Gizi Masyarakat	24 Kab / Kota
					Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pemantauan Pertumbuhan Balita	Peningkatan cakupan D/S (Partisipasi Masyarakat) (%)	70%												95%	Seksi Gizi Masyarakat	24 Kab / Kota
					Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu sebagai Motivator Posyandu	Tersedianya motivator posyandu	0												65%	Seksi Gizi Masyarakat	24 Kab / Kota
			Cakupan ASI Eksklusif		Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Konseling Menyusui	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	67%						87%	125,000,000	90%	126,475,000.00		90%	Seksi Gizi Masyarakat	24 Kab / Kota	
					Pengawasan Penegakan Perda No.6 Tahun 2010 (PERDA ASI) dan Pergub No. 68 Tahun 2011 (PERGUB ASI)	Terlaksananya pengawasan penegakan PERDA dan PERGUB ASI di 24 Kab/Kota (%)	30%	35%	62,900,000	50%	77,535,000	60%	76,735,000	70%	77,000,000	75%	77,908,600.00		75%	Seksi Gizi Masyarakat	24 Kab / Kota
					Penguatan Jejaring dan Mitra LS/LP dalam Implementasi PERDA dan PERGUB tentang ASI EKSCLUSIF	Terlaksananya penguatan jejaring dan mitra LP/LS dalam implementasi Perda/Pergub ASI melalui diseminasi percepatan penegakan Perda/Pergub ASI	25%	35%	57,800,000	50%	52,675,000	60%	87,425,000	70%	88,000,000	75%	89,038,400.00		75%	Seksi Gizi Masyarakat	24 Kab / Kota
			Cakupan Pendistribusian Vitamin A pada Balita		Pertemuan Percepatan Peningkatan Cakupan Pendistribusian Kapsul Vitamin A	Persentase anak usia 6 - 59 bulan dapat kapsul vitamin A	80%												95%	Seksi Gizi Masyarakat	24 Kab / Kota
					Sweeping dan Monitoring Pendistribusian Vitamin A Tingkat Kabupaten/Kota	Terkonfirmasinya anak yang tidak mendapat kapsul Vitamin A (%)	30%												70%	Seksi Gizi Masyarakat	24 Kab / Kota
			Cakupan Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Fe 90 Tablet		Pertemuan Integrasi Gizi dan KIA dalam rangka Percepatan Peningkatan Cakupan Pendistribusian Tablet Fe Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapat Fe 90 Tablet	68.9%												93%	Seksi Gizi Masyarakat	24 Kab / Kota
					Sweeping dan Monitoring Pendistribusian Tablet Fe Tingkat Kab/Kota	Terdistribusinya Tablet Fe ke Kabupaten/Kota	30%							70%	61,952,000	80%	62,683,033.00		80%	Seksi Gizi Masyarakat	24 Kab / Kota

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Cakupan Konsumsi Garam Beryodium		Pertemuan Penguatan Kerjasama dan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program dalam Peningkatan Konsumsi Garam Beryodium	Cakupan RT yang mengonsumsi garam Beryodium (%)	81.3%											94%	Seksi Gizi Masyarakat	24 Kab / Kota
					Pengadaan Iodina Kit	Penyediaan KIT Iodium	50%											75%	Seksi Gizi Masyarakat	24 Kab / Kota
			Cakupan Kab/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi		Pertemuan Review Surveilans Gizi Puskesmas dan Kab/Kota	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	100%						100%	110,000,000	100%	111,298,000.00	100%	Seksi Gizi Masyarakat	24 Kab / Kota	
					Bimbingan Teknis Pendampingan Surveilans gizi dan On The Job Training KMS Baru pada 427 Puskesmas	Terlaksananya bimbingan teknis pendampingan Surveilans Gizi dan On the Job Training KMS baru pada 427 Puskesmas	50%	79,300,000	60%	108,100,000	70%	297,471,429					70%	Seksi Gizi Masyarakat	24 Kab / Kota	
	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Balita Anak dan Lansia			476,200,000.00		879,500,000.00		1,604,278,929.00		1,862,000,000.00		1,930,726,600.00		Seksi Kesehatan Keluarga		
		Angka Kematian Bayi (AKB)/1.000 KH/Jumlah Kematian Bayi			Audit Maternal Perinatal (AMP)	Kematian Bayi (Kasus) Terlaksananya Audit Maternal Perinatal	1.041 Kasus	1.031 Kasus	1.026 Kasus	1.021 Kasus	1.016 Kasus	100%	33,000,000.00	1.011 Kasus	100%	33,389,400.00	1.011 Kasus	100%	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi & 24 Kab/Kota.
					Pertemuan Review Audit Maternal Perinatal (AMP)	Terlaksananya pertemuan Review Audit Maternal Perinatal (AMP)				50 Orang	66,768,000						50 Orang	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi	
					Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan (Dokter Umum, Bidan dan Perawat) dalam Tatalaksana Neonatus	Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama/KN 1 (%) Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan (Dokter Umum, Bidan dan Perawat) dalam tatalaksana Neonatus	91,84%				96% 100%	102,000,000.00	97% 100%	103,203,600.00	97% 100%			Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi & 24 Kab/Kota.	
					Peningkatan Kemampuan Dokter Umum dalam Penanganan Bayi dan Balita Sakit	Cakupan Kunjungan Bayi (%) Meningkatnya kemampuan Dokter Umum dalam penanganan bayi dan balita sakit	90,95%				97% 100%	102,000,000.00	98% 100%	103,203,600.00	98% 100%			Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi & 24 Kab/Kota.	
		Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 KH / Jumlah Kematian Ibu			Pemantapan dan Evaluasi Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) dan Penguatan Sistem Rujukan	Terpantainya pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) dan penguatan sistem rujukan							1 Paket	200,000,000.00	1 Paket	202,360,000.00	2 Paket	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi	
					Pertemuan POKJA AKI/AKB untuk Penguatan Sistem Rujukan dalam rangka Akselerasi Penurunan AKI dan AKB	Terlaksananya pertemuan Pokja AKI/AKB untuk penguatan sistem rujukan dalam rangka akselerasi penurunan AKI/AKB		1 Paket	126,600,000								1 Paket	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi	
					Pemantapan dan Evaluasi Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) dan Penguatan Sistem Rujukan	Terlaksananya pemantapan dan evaluasi pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) dan penguatan sistem rujukan			1 Paket	59,400,000							1 Paket	Seksi Kesehatan Keluarga	Kab/Kota	
					Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi yang sesuai Standar	Terlaksananya pertemuan pemantapan sistem pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi dalam sistem informasi Posyandu					1 Paket	115,000,000					1 Paket	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi	
					Pertemuan Analisis dan Evaluasi Pemantapan Sistem Rujukan dan AMP (Audit Maternal Perinatal) dalam Peningkatan Pelayanan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	Terlaksananya pertemuan analisis dan evaluasi pemantapan sistem rujukan dan AMP dalam peningkatan pelayanan komplikasi kebidanan yang ditangani					1 Paket	125,000,000					1 Paket	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi	
					Pertemuan POKJA AKI/AKB untuk Penguatan Sistem Pelayanan Ibu dan Reproduksi dalam rangka Akselerasi Penurunan AKI dan AKB	Terlaksananya pertemuan Pokja AKI/AKB untuk penguatan sistem pelayanan Ibu dan Reproduksi dalam rangka akselerasi penurunan AKI dan AKB					1 Paket	151,800,000					1 Paket	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi	
		Cakupan Peserta KB Aktif			Evaluasi Sistem Pelayanan dan Pencatatan/Pelaporan KB di Fasilitas Kesehatan.	Cakupan Peserta KB Aktif (%) Terlaksananya evaluasi sistem pelayanan dan pencatatan/pelaporan KB di fasilitas kesehatan	67,27%		66% 100%	46,600,000			68% 100%	92,000,000.00	69% 100%	93,085,600.00	69% 100%	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi	
					Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pengelolaan Program Ibu dan Reproduksi yang Berbasis Gender	Cakupan Peserta KB Aktif (%) Terlaksananya pertemuan peningkatan kapasitas Petugas dalam pengelolaan Program Ibu dan Reproduksi Berbasis Gender	67,27%		66% 1 Paket	55,000,000			68% 1 Paket	145,000,000.00	69% 1 Paket	146,711,000.00	69% 3 Paket	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi & 24 Kab/Kota.	
					Pertemuan Pemantapan Pelayanan KB Metode Jangka Panjang serta Sistem Pencatatan	Terlaksananya pertemuan pemantapan pelayanan KB metode jangka panjang serta sistem pencatatan						1 Paket	106,000,000				1 Paket	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi	
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani			Evaluasi Pelaksanaan ANC Terpadu bagi Pengelola Puskesmas di Kab/Kota	Cakupan Ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan Minimal 4 Kali sesuai standar (K4) (%) Terlaksananya evaluasi pelaksanaan ANC terpadu bagi Pengelola Puskesmas di Kab/Kota	91,64%		92,5% 1 Paket	50,000,000			93,5% 1 Paket	175,000,000.00	94% 1 Paket	177,065,000.00	94% 3 Paket	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi & 24 Kab/Kota.	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					Pertemuan Penguatan Kerjasama dan Koordinasi LP/LS dalam rangka Peningkatan Pelayanan ANC Terpadu Berkualitas di Unit Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pertemuan penguatan kerjasama dan koordinasi LP/LS dalam rangka peningkatan pelayanan ANC Terpadu Berkualitas di Unit Pelayanan Kesehatan					100%	90,000,000					100%	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi	
			Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki		Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Supervisi Fasilitatif	Terlaksananya peningkatan kapasitas petugas dalam supervisi fasilitatif							1 Paket	102,000,000.00	1 Paket	103,203,600.00	2 Paket	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi	
			Cakupan Pelayanan Nifas		Peningkatan Pemantapan Petugas RS PONEK dan Puskesmas PONEK	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani (%) Terlaksananya kegiatan peningkatan petugas di RS PONEK dan Puskesmas PONEK dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi	64,99%		67%	100,000,000	1 Paket		71%	110,000,000.00	73%	111,298,000.00	3 Paket	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi & 24 Kab/Kota.	
			Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani		Pembinaan SDM dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi sesuai Standar	Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan (PN) (%) Terlaksananya pertemuan pemantapan sistem pelayanan kesehatan Ibu dan Reproduksi dalam sistem informasi posyandu	92,74%		94%	51,500,000	1 Paket		96%	102,000,000.00	97%	103,203,600.00	3 Paket	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi & 24 kab/Kota.	
			Cakupan Kunjungan Bayi		Pemantapan Sistem Pelayanan dan Pencatatan / Pelaporan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas yang berkualitas sesuai standar (Kf) (%) Terlaksananya kegiatan pembinaan petugas dalam rangka peningkatan cakupan hasil pelayanan kesehatan ibu dan anak	85,54%		89%	50,000,000	1 Paket	91%	243,771,429	93%	92,000,000.00	95%	93,085,600.00	4 Paket	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi
			Cakupan Pelayanan Anak Balita		Peningkatan Kapasitas dalam Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)	- Cakupan Pelayanan Balita (%) Meningkatnya pengetahuan petugas dalam stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK)		85%					88%	125,000,000.00	90%	126,475,000.00	90%	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi & 24 Kab/Kota.	
					Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)		77.63%											Seksi Kesehatan Keluarga		
					Peningkatan Pemanfaatan Buku KIA melalui LP/LS terkait Kesehatan Anak														Seksi Kesehatan Keluarga	
					Peningkatan Kapasitas Pelaksana Rujukan Kelainan Tumbuh Kembang Balita														Seksi Kesehatan Keluarga	
					Penguatan Sistem Perlindungan Anak (Perda Perlindungan Anak Sulsel)	Terlaksananya Perda Perlindungan Anak Sulsel		50 Orang	55,025,000									50 Orang	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi dan Kab/Kota
					Pertemuan Tim Pokja SHK (Screening Hypothyroid Congenital)	Terlaksananya pertemuan Tim Pokja SHK (Screening Hypothyroid Congenital)					1 Kali	32,000,000						1 Kali	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi
					Pembinaan UKS Tingkat Provinsi	Terlaksananya pertemuan koordinasi Tim Pembina UKS Tingkat Provinsi					40 Orang	66,000,000						40 Orang	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi
					Peningkatan Pemanfaatan Buku KIA melalui Kerjasama LP/LS terkait Kesehatan Anak	Terlaksananya peningkatan pemanfaatan Buku KIA melalui kerjasama LP/LS terkait Kesehatan Anak					40 Orang	56,000,000						40 Orang	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi
					Lomba Balita Sehat Indonesia (LBSI)	Terpilainya Balita Sehat Indonesia (LBSI)							1 Paket	209,080,500				1 Paket	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi
					Pertemuan Pemanfaatan Buku KIA untuk Bidan Praktek Swasta dan Rumah Sakit	Terlaksananya pertemuan pemanfaatan Buku KIA untuk Bidan Praktek Swasta dan Rumah Sakit					40 Orang	193,431,000						40 Orang	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi
			Cakupan Penjarangan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat		Pelaksanaan Penjarangan Anak Sekolah Dasar	Cakupan Penjarangan Siswa SD & Setingkat (%) Terlaksananya kegiatan penjarangan anak sekolah	94,40%						98%	82,000,000.00	99%	82,967,600.00	99%	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi dan 24 Kab/Kota	
			% Kelompok Lansia Aktif		Promosi Lansia Sehat	Terlaksananya promosi lansia sehat di Kab/Kota	0 Kab/Kota				1 Paket	32,250,000	1 Paket	20,000,000.00	1 Paket	20,236,000.00	3 Paket	Seksi Kesehatan Keluarga	Kab/Kota	
					Lomba Lansia Sehat Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	Terlaksananya pemilihan lansia sehat dan produktif di Kab/Kota	6 Kab/Kota		1 Paket	92,775,000	1 Paket	29,450,000	1 Paket	105,000,000.00	1 Paket	106,239,000.00	4 Paket	Seksi Kesehatan Keluarga	Provinsi	
					Lomba Posyandu Lansia	Terpilainya Posyandu Lansia di Kab/Kota			1 Kali	165,000,000	1 Kali	191,369,000	1 Kali	50,000,000.00	1 Kali	100,000,000.00	4 Kali	Seksi Kesehatan Keluarga	Kab/Kota	
					Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Lansia	Meningkatnya kapasitas pengelola Program Lansia Kab/Kota							100%	75,000,000.00	100%	75,000,000.00	100%	Seksi Kesehatan Keluarga	24 Kab/Kota	
					Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Lansia	Meningkatnya kapasitas Kader Posyandu Lansia			1 Kali	55,225,000	1 Kali	50,359,000	1 Kali	75,000,000.00	1 Kali	75,000,000.00	4 Kali	Seksi Kesehatan Keluarga	24 Kab/Kota	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
						Madya (%)	23.44%	30%		30%		31%		29%		23%		23%	Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab/Kota
						Purnama (%)	13.44%	15%		27%		34%		41%		47%		47%	Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab/Kota
						Mandiri (%)	2.43%	5%		10%		15%		20%		25%		25%	Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab/Kota
						Pengembangan UKBM dan Generasi Muda (Lomba Desa Siaga Tingkat Provinsi)	5 Desa Siaga Aktif	5 Desa Siaga Aktif	100,000,000	5 Desa Siaga Aktif	100,000,000	5 Desa Siaga Aktif	123,333,000	5 Desa Siaga Aktif	124,788,329.00	5 Desa Siaga Aktif	126,260,831.00	25 Desa Siaga Aktif	Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab/Kota
						Pengembangan UKBM dan Generasi Muda (Lomba Posyandu Tingkat Provinsi)	5 Posyandu	5 Posyandu	100,000,000	5 Posyandu	100,000,000	5 Posyandu					10 Posyandu	Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab/Kota	
						Pengembangan UKBM dan Generasi Muda (Pengembangan SBH dan UKBM Lainnya)	10 Kab/Kota	24 Kab/Kota dan 1 Lintas Sektor		485,050,000	24 Kab/Kota	208,831,000	24 Kab/Kota	211,295,207.00	24 Kab/Kota	213,788,490.00	24 Kab/Kota	Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab/Kota	
						Pengembangan UKBM, Generasi Muda dan PSM					6 Kali	308,571,429	6 Kali	156,829,000.00	6 Kali	158,679,582.00	18 Kali	Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab/Kota	
		Meningkatnya kemitraan Lintas Sektor/Swasta	Jumlah Kemitraan Lintas Sektor/Swasta			Pengembangan Kemitraan Swasta dan Ormas	4 Mitra	4 Mitra		5 Mitra	57,575,000	6 Mitra	58,000,000	7 Mitra	58,684,400.00	8 Mitra	59,376,876.00	8 Mitra	Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi dan Kab/Kota
III	Tersedianya Sarana Prasarana, SDM Obat dan Perbekalan Kesehatan serta Pembiayaan Kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya Sarana Pelayanan Kesehatan yang berkualitas				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			525,605,000.00	2,257,450,000.00		2,146,971,598.00		3,172,000,000.00		2,948,000,000.00				
			Rumah Sakit (RS) Terakreditasi Internasional			Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Akreditasi Internasional di Rumah Sakit	0	1 RS		-		-		1 RS		2 RS		4 Rumah Sakit	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi dan Kab/Kota
						Workshop Akreditasi RS menuju Akreditasi Internasional						20 Rumah Sakit	145,572,500				20 Rumah Sakit	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi	
						Persiapan Rumah Sakit Internasional						3 Kab/Kota	25,000,000	3 Kab/Kota	50,000,000		3 Kab/Kota	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi dan Kab/Kota	
			RS Terakreditasi Nasional (Versi 2012)			Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Akreditasi RS Versi 2012	3%	16%		28%		41%		53%		66%		66%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi dan Kab/Kota
						% RS Swasta yang melaksanakan Akreditasi Nasional Versi 2012	0	6%		12%		18%		24%		31%		31%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi dan Kab/Kota
						Pelatihan Manajemen ICU RS		100%	62,200,000								100%		Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi
						Pertemuan Koordinasi dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Infeksi OK		100%	161,447,000								100%		Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi
						Rumah Sakit Bersih						100%	97,431,500				100%		Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi dan Kab/Kota
						Peningkatan Kapasitas Tenaga Front Office RS						30 Orang	103,394,240				30 Orang		Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi
						Pemantauan Manajemen ICU Rumah Sakit						32 Rumah Sakit	50,000,000				32 Rumah Sakit		Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi dan Kab/Kota
						Pemantauan RS Swasta								100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi dan Kab/Kota

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					Peningkatan Kapasitas Pengelola Gizi RS	Meningkatnya kapasitas Pengelola Gizi RS							100%	150,000,000			100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi	
					Pertemuan Petugas CSSD RS	Terlaksananya pertemuan Petugas CSSD RS							100%	150,000,000			100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi	
					Workshop Manajemen dan Penggunaan Obat serta HPK dalam rangka Akreditasi RS	Terlaksananya workshop manajemen dan penggunaan obat serta HPK dalam akreditasi RS							100%	190,000,000			100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi	
					Peningkatan Kapasitas Pengelola PKM RS	Meningkatnya kapasitas Pengelola PKM RS									100%	150,000,000	100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi	
					Peningkatan Kapasitas Pengelola Farmasi di RS	Meningkatnya kapasitas Pengelola Farmasi di RS									100%	150,000,000	100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi	
					Peningkatan Kapasitas Pengelola IPSRS	Meningkatnya kapasitas Pengelola IPSRS									100%	150,000,000	100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi	
					Workshop Pelayanan Anestesi dan Bedah dalam rangka Akreditasi RS	Terlaksananya workshop pelayanan anestesi dan bedah dalam rangka akreditasi RS									100%	190,000,000	100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi	
			Regulasi RS Dihasilkan		Penyusunan Pedoman Pelayanan Kesehatan di RS	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen										6 Dokumen	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi	
					Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan Anestesi di Rumah Sakit	Tersosialisasinya Pedoman Penyelenggaraan Anestesi di RS			100%	13,600,000							100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi dan Kab/Kota	
					Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan ICU di RS	Tersusunnya Pedoman ICU di Rumah Sakit			100%	46,225,000							100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi	
					Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit	Tersusunnya Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit							100%	90,000,000			100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi	
			% RS Pemerintah yang telah mempunyai Registrasi		Pemantauan dan Pembinaan RS Pemerintah dalam Melakukan Registrasi	% RS Pemerintah yang telah mempunyai register	97% (31 RS)										100% (32 RS)	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi dan Kab/Kota	
			% RS Swasta yang telah mempunyai Registrasi		Pemantauan dan Pembinaan RS Swasta dalam Melakukan Registrasi	% RS Swasta yang telah mempunyai register	50% (25 RS)										100% (49 RS)	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi dan Kab/Kota	
			% RS Pemerintah yang telah melaksanakan Penetapan Klas		Pemantauan dan Pembinaan RS Pemerintah dalam Melaksanakan Penetapan Klas	% RS Pemerintah yang telah melaksanakan penetapan klas	97% (31 RS)										100% (32 RS)	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi dan Kab/Kota	
			% RS Swasta yang telah melaksanakan Penetapan Klas		Pemantauan dan Pembinaan RS Swasta dalam Melaksanakan Penetapan Klas	% RS Swasta yang telah melaksanakan penetapan klas	40% (20 RS)										100% (49 RS)	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi dan Kab/Kota	
			% RS Non Pusat Rujukan sebagai RS Klas C		Pembinaan RS Non Pusat Rujukan sebagai Klas C	% RS non pusat rujukan sebagai Klas C	88% (23 RS)										100% (26 RS)	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab/Kota	
			% RS Pusat Rujukan sebagai RS Klas B		Pembinaan RS Pusat Rujukan sebagai Klas B	% RS pusat rujukan sebagai Klas B	67% (4 RS)										100% (6 RS)	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab/Kota	
			% RS Pemerintah yang telah memiliki izin RS		Pemantauan dan Pembinaan Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pemberian Izin RS Pemerintah	% RS Pemerintah yang memiliki izin RS	50% (16 RS)										100% (32 RS)	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab/Kota	
					Pembinaan dan Pemantauan Izin Penyelenggaraan RS	Terbinanya dan terpantaunya izin penyelenggaraan RS		100%	133,600,000								100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab/Kota	
					Visitasi Pemberian Izin Operasional RS	Terlaksananya visitasi pemberian izin operasional RS			100%	1,447,625,000							100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab/Kota	
					Pemantauan dan Pembinaan Dinkes Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pemberian Izin RS Pemerintah	Terpantaunya dan terbinanya Dinkes Kab/Kota dalam pelaksanaan pemberian izin RS Pemerintah					34 Orang	118,000,000					34 Orang	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab/Kota	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
					Visitasi Perizinan RS	Terlaksananya visitasi perizinan RS												100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab/Kota			
					Peningkatan Kapasitas Pengelola Izin RS Kab/Kota	Meningkatnya kapasitas Pengelola Izin RS Kab/Kota												100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi dan Kab/Kota			
		% RS Swasta yang telah memiliki izin RS			Pemantauan dan Pembinaan Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pemberian Izin RS Swasta	Terpantaunya dan terbinanya Dinkes Kab/Kota dalam pelaksanaan pemberian izin RS Swasta						6 Rumah Sakit	104,826,500						6 Rumah Sakit	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab/Kota		
		% RS yang melaksanakan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)			Pemantauan dan Pembinaan Rumah Sakit Jejaring SPGDT	% RS yang Melaksanakan SPGDT	0												40% (35 RS)	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab/Kota		
					Penyusunan Juknis SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)	Tersusunnya Petunjuk Teknis Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Provinsi Sulsel						1 Dokumen	21,051,500						1 Dokumen	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi		
					Monev Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Pusat Region	Terlaksananya monev SPGDT di Pusat Rujukan Region						6 Rumah Sakit	188,571,429						6 Rumah Sakit	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab/Kota		
					Monev PSC di Kabupaten/Kota	Terevaluasinya PSC di Kab/Kota													100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab/Kota		
		% RS Provinsi/Kab/Kota yang telah menjadi BLU			Pemantauan dan Pelaksanaan BLU RS	% RS Prov/Kab/Kota yang telah menjadi BLU	40% (13 RS)													100% (32 RS)	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi dan Kab/Kota	
					Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD Rumah Sakit	Terlatihnya Petugas dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RS		100%	168,358,000											100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi	
					Pemantauan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD) di RS	Terlaksananya pemantauan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD) di RS				100%	100,000,000									100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi dan Kab/Kota	
					Pelatihan Penyusunan Sistem Remunerasi di Rumah Sakit	Terlatihnya BLU Rumah Sakit tentang penyusunan sistem Remunerasi						62 Orang	184,584,500							62 Orang	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi	
					Peningkatan Kapasitas Satuan Pengawas Internal (SPI) RS	Meningkatnya kapasitas Satuan Pengawas Internal (SPI) RS														100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi	
					Pemantauan SPI dalam rangka Penguatan BLUD RS	Terlaksananya pemantauan SPI dalam rangka penguatan BLUD di Rumah Sakit														100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi dan Kab/Kota	
		% RS yang melakukan Pelaporan SIRS On Line			Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan SIRS On Line	% RS yang melakukan Pelaporan SIRS On Line	40% (36 RS)													100% (88 RS)	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi	
					Pertemuan Pelaporan Berbasis SIM RS terintegrasi JKN	Terlaksananya pertemuan pelaporan berbasis SIM RS yang terintegrasi JKN														100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi	
		Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota			Pelatihan BTCLS bagi Perawat dan ATLS bagi Dokter di Rumah Sakit	% Dokter dan Perawat yang telah dilatih ATLS dan BTCLS di RS	100%													100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi	
					Peningkatan Kemampuan Tim PONEK dalam Pelayanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di Rumah Sakit	Jumlah RS Pemerintah yang mempunyai tim PONEK RS	13 Rumah Sakit														32 Rumah Sakit	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi
					Workshop PONEK (Penanganan Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensif)	Terlaksananya pelatihan Tim PONEK Rumah Sakit						30 Orang	105,356,500							30 Orang	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi	
		% RS sebagai Wahana Internship			Pemantapan RS Wahana Internship	% RS yang digunakan sebagai wahana Internship	86% (18 RS)					100% (21 RS)	100,000,000							100% (21 RS)	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi dan Kab/Kota	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Dokter Internsip	Terlaksananya pertemuan koordinasi pelaksanaan Dokter Internsip					101 Orang	62,424,500					101 Orang	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi	
					Peningkatan Kapasitas Dokter Pendamping Internsip	Meningkatnya kapasitas Dokter Pendamping Internsip								100%	120,000,000			100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Provinsi
					Monev Internsip	Terevaluasinya pelaksanaan Program Internsip								100%	240,000,000	100%	240,000,000	100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab/Kota
			Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi		Bimbingan Teknis Akreditasi Bagi Puskesmas Berprestasi	Puskesmas yang telah melaksanakan akreditasi pelayanan kesehatan	0 PKM						8 PKM	194,000,000	10 PKM	197,000,000	18 PKM	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab/Kota	
		Meningkatnya ketersediaan SDM kesehatan yang proporsional	Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk		Pendataan Kebutuhan Tenaga Dokter Umum	Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk	15/100.000 Penduduk	15/100.000 Penduduk	17/100.000 Penduduk	19/100.000 Penduduk	20/100.000 Penduduk	22/100.000 Penduduk	22/100.000 Penduduk				22/100.000 Penduduk	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota	
					Pertemuan Pengelola Program SDMK	Terlaksananya pertemuan pengelola program SDMK												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi
					Evaluasi Pengumpulan Data Dokter Umum	Terlaksananya evaluasi pengumpulan data Dokter Umum												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
					Pertemuan Dalam Rangka Fasilitasi Kebutuhan Nakes Berdasarkan Beban Kerja	Terlaksananya pertemuan dalam rangka fasilitasi kebutuhan nakes berdasarkan beban kerja												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi
					Pendataan Tenaga Kesehatan Asing Dokter Umum	Terlaksananya pendataan tenaga kesehatan asing (Dokter Umum)												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
			Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk		Pendataan Kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk	5/100.000 Penduduk	8/100.000 Penduduk	10/100.000 Penduduk	11/100.000 Penduduk	12/100.000 Penduduk	13/100.000 Penduduk	13/100.000 Penduduk				13/100.000 Penduduk	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota	
					Pertemuan Pengelola Program SDMK	Terlaksananya pertemuan pengelola program SDMK												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi
					Evaluasi Pengumpulan Data Dokter Spesialis	Terlaksananya evaluasi pengumpulan data Dokter Spesialis												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
					Pertemuan Dalam Rangka Fasilitasi Kebutuhan Nakes Berdasarkan Beban Kerja	Terlaksananya pertemuan dalam rangka fasilitasi kebutuhan nakes berdasarkan beban kerja												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi
					Pendataan Tenaga Kesehatan Asing Dokter Spesialis	Terlaksananya pendataan tenaga kesehatan asing (Dokter Spesialis)												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
			Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk		Pendataan Kebutuhan Tenaga Dokter Gigi	Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	7/100.000 Penduduk	9/100.000 Penduduk	11/100.000 Penduduk	14/100.000 Penduduk	15/100.000 Penduduk	17/100.000 Penduduk	17/100.000 Penduduk				17/100.000 Penduduk	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota	
					Pertemuan Pengelola Program SDMK	Terlaksananya pertemuan pengelola program SDMK												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi
					Evaluasi Pengumpulan Data Dokter Gigi	Terlaksananya evaluasi pengumpulan data Dokter Gigi												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
					Pertemuan Dalam Rangka Fasilitasi Kebutuhan Nakes Berdasarkan Beban Kerja	Terlaksananya pertemuan dalam rangka fasilitasi kebutuhan nakes berdasarkan beban kerja												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi
					Pendataan Tenaga Kesehatan Asing Dokter Gigi	Terlaksananya pendataan tenaga kesehatan asing (Dokter Gigi)												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
			Rasio Apoteker per 100.000 Penduduk		Pendataan Kebutuhan Tenaga Apoteker	Rasio Apoteker per 100.000 Penduduk	7/100.000 Penduduk	10/100.000 Penduduk	11/100.000 Penduduk	13/100.000 Penduduk	15/100.000 Penduduk	17/100.000 Penduduk	17/100.000 Penduduk				17/100.000 Penduduk	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					Pertemuan Pengelola Program SDM	Terlaksananya pertemuan pengelola program SDM												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi
					Evaluasi Pengumpulan Data Apoteker	Terlaksananya evaluasi pengumpulan data Apoteker												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
					Pertemuan Dalam Rangka Fasilitasi Kebutuhan Nakes Berdasarkan Beban Kerja	Terlaksananya pertemuan dalam rangka fasilitasi kebutuhan nakes berdasarkan beban kerja												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi
					Pendataan Tenaga Kesehatan Asing Apoteker	Terlaksananya pendataan tenaga kesehatan asing (Apoteker)												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
			Rasio Perawat per 100.000 Penduduk		Pendataan Kebutuhan Tenaga Perawat	Rasio Perawat per 100.000 Penduduk	92/100.000 Penduduk	94/100.000 Penduduk	95/100.000 Penduduk	97/100.000 Penduduk	99/100.000 Penduduk	100/100.000 Penduduk	100/100.000 Penduduk	100/100.000 Penduduk	100/100.000 Penduduk	100/100.000 Penduduk	100/100.000 Penduduk	100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
					Pertemuan Pengelola Program SDM	Terlaksananya pertemuan pengelola program SDM												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi
					Evaluasi Pengumpulan Data Perawat	Terlaksananya evaluasi pengumpulan data Perawat												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
					Pertemuan Dalam Rangka Fasilitasi Kebutuhan Nakes Berdasarkan Beban Kerja	Terlaksananya pertemuan dalam rangka fasilitasi kebutuhan nakes berdasarkan beban kerja												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi
					Pendataan Tenaga Kesehatan Asing Perawat	Terlaksananya pendataan tenaga kesehatan asing (Perawat)												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
			Rasio Bidan per 100.000 Penduduk		Pendataan Kebutuhan Tenaga Bidan	Rasio Bidan per 100.000 Penduduk	51/100.000 Penduduk	52/100.000 Penduduk	53/100.000 Penduduk	54/100.000 Penduduk	56/100.000 Penduduk	58/100.000 Penduduk	58/100.000 Penduduk	58/100.000 Penduduk	58/100.000 Penduduk	58/100.000 Penduduk	58/100.000 Penduduk	100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi
					Pertemuan Pengelola Program SDM	Terlaksananya pertemuan pengelola program SDM												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
					Evaluasi Pengumpulan Data Bidan	Terlaksananya evaluasi pengumpulan data Bidan												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi
					Pertemuan Dalam Rangka Fasilitasi Kebutuhan Nakes Berdasarkan Beban Kerja	Terlaksananya pertemuan dalam rangka fasilitasi kebutuhan nakes berdasarkan beban kerja												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
					Pendataan Tenaga Kesehatan Asing Bidan	Terlaksananya pendataan tenaga kesehatan asing (Bidan)												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
			Rasio Ahli Gizi per 100.000 Penduduk		Pendataan Kebutuhan Tenaga Ahli Gizi	Rasio Ahli Gizi per 100.000 Penduduk	8/100.000 Penduduk	11/100.000 Penduduk	12/100.000 Penduduk	14/100.000 Penduduk	16/100.000 Penduduk	18/100.000 Penduduk	18/100.000 Penduduk	18/100.000 Penduduk	18/100.000 Penduduk	18/100.000 Penduduk	18/100.000 Penduduk	100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
					Pertemuan Pengelola Program SDM	Terlaksananya pertemuan pengelola program SDM												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
					Evaluasi Pengumpulan Data Ahli Gizi	Terlaksananya evaluasi pengumpulan data Ahli Gizi												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi
					Pertemuan Dalam Rangka Fasilitasi Kebutuhan Nakes Berdasarkan Beban Kerja	Terlaksananya pertemuan dalam rangka fasilitasi kebutuhan nakes berdasarkan beban kerja												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
					Pendataan Tenaga Kesehatan Asing Ahli Gizi	Terlaksananya pendataan tenaga kesehatan asing (Ahli Gizi)												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
			Rasio Ahli Sanitasi per 100.000 Penduduk		Pendataan Kebutuhan Tenaga Ahli Sanitasi	Rasio Ahli Sanitasi per 100.000 Penduduk	10/100.000 Penduduk	12/100.000 Penduduk	13/100.000 Penduduk	15/100.000 Penduduk	16/100.000 Penduduk	17/100.000 Penduduk	17/100.000 Penduduk	17/100.000 Penduduk	17/100.000 Penduduk	17/100.000 Penduduk	17/100.000 Penduduk	100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
					Pertemuan Pengelola Program SDM	Terlaksananya pertemuan pengelola program SDM												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi
					Evaluasi Pengumpulan Data Ahli Sanitasi	Terlaksananya evaluasi pengumpulan data Ahli Sanitasi												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
					Pertemuan Dalam Rangka Fasilitasi Kebutuhan Nakes Berdasarkan Beban Kerja	Terlaksananya pertemuan dalam rangka fasilitasi kebutuhan nakes berdasarkan beban kerja												100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Cakupan Kepesertaan Jamkesda Menuju Universal Coverage		Pelayanan Kesehatan Gratis (Jamkesda)	Persentase cakupan pelayanan kesehatan peserta Jamkesda	58.3%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota	
					Semiloka Pemantapan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Gratis	Adanya informasi dari berbagai stakeholder/pemangku kepentingan		175 Orang	62,500,000	175 Orang	42,725,000							350 Orang	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Provinsi	
					Pemantapan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Gratis / Jamkesda Integrasi ke JKN	Diperolehnya gambaran hasil pelaksanaan program Jamkesda Integrasi ke JKN							175 Orang	115,500,000	175 Orang	115,500,000	350 Orang	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Provinsi		
					Diseminasi dan Informasi Pelayanan Kesehatan Gratis	Tersebarluasnya informasi tentang pelayanan Kesehatan Gratis		100%	45,000,000	100%	100,950,000		100%	62,500,000					100%	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
					Diseminasi dan Informasi Pelayanan Kesehatan Gratis/Jamkesda Integrasi ke JKN	Tersebarluasnya informasi tentang pelayanan Kesehatan Gratis/Jamkesda Integrasi ke JKN								100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota	
					Bimtek dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Kesehatan Gratis	Diperolehnya data dan informasi Kesehatan Gratis dalam rangka pengembangan Kesehatan Gratis		24 Kab/Kota	100,000,000	24 Kab/Kota	140,600,000								24 Kab/Kota	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kab/Kota
					Bimtek dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi ke JKN	Diperolehnya data dan informasi Kesehatan Gratis dalam rangka pengembangan Kesehatan Gratis Integrasi ke JKN							24 Kab/Kota	126,750,000	24 Kab/Kota	110,000,000	24 Kab/Kota	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kab/Kota		
					Survey Kepuasan Masyarakat tentang Pelaksanaan Kesehatan Gratis Integrasi ke JKN	Diperolehnya data kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan Kesehatan Gratis integrasi ke Program JKN								100%	199,875,000	100%	199,875,000	100%	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota	
					Penyusunan Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Gratis	Tersusunnya Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Gratis		1,000 Eksemplar	49,600,000	1,000 Eksemplar	40,000,000								2,000 Eksemplar	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Provinsi
					Penyusunan Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi ke JKN	Tersusunnya Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi ke JKN								2,000 Eksemplar	153,550,000	2,000 Eksemplar	153,525,000	4,000 Eksemplar	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Provinsi	
					Konsultasi dan Bimtek Pemantapan Pelayanan Kesehatan Gratis	Terlaksananya konsultasi dan bimtek pengembangan pemantapan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Sulsel		24 Kab/Kota	83,000,000	24 Kab/Kota	54,050,000	24 Kab/Kota	247,816,429						24 Kab/Kota	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Pusat dan Kab/Kota
					Konsultasi dan Bimtek Pemantapan Pelayanan Kesehatan Gratis/Jamkesda Integrasi ke JKN	Diperolehnya gambaran dan model pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)								24 Kab/Kota	83,000,000	24 Kab/Kota	80,000,000	24 Kab/Kota	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Pusat dan Kab/Kota	
					Penunjang Pokja/Sekretariat Pelayanan Kesehatan Gratis	Terlaksananya dukungan/kegiatan operasional Pelayanan Kesehatan Gratis		1 Tahun	35,000,000	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	82,236,000						3 Tahun	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Provinsi
					Penguatan Tim Pertimbangan Klinis dan Penanganan Masalah Kendali Mutu Kendali Biaya (KMKB) Kab/Kota	Terselesaikannya masalah program Pertimbangan Klinis tentang penanganan masalah JKN								1 Tahun	138,576,114	1 Tahun	118,503,442	2 Tahun	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Provinsi	
					Sosialisasi dan Advokasi PEMDA dalam rangka Integrasi Kesehatan Gratis ke dalam Program JKN/BPJS	Terlaksananya sosialisasi dan integrasi Kesehatan Gratis ke dalam Program JKN				12 Kab/Kota	22,000,000	24 Kab/Kota	136,940,000						24 Kab/Kota	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kab/Kota
					Monitoring Data Kepesertaan Program Kesehatan Gratis/Jamkesda Integrasi ke JKN	Terlaksananya monitoring data kepesertaan Program Kesehatan Gratis/Jamkesda Integrasi ke JKN						24 Kab/Kota	136,940,000	24 Kab/Kota	85,000,000	24 Kab/Kota	85,000,000	24 Kab/Kota	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kab/Kota	
					Pertemuan Evaluasi Integrasi Program Kesehatan Gratis ke JKN	Terlaksananya pertemuan evaluasi integrasi Program Kesehatan Gratis ke JKN						100% (175 Orang)	45,894,000	100%	65,000,000	100%	75,000,000	100%	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Provinsi	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
					Pelatihan Petugas Penyuluh dan Pengawas Keamanan Pangan	% Pengawasan obat dan makanan yang layak, bermutu dan aman di konsumsi masyarakat	35%	40%	-	45%	-	50%	222,033,429	55%	69,749,086.00	60%	71,060,369.00	60%	Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	Provinsi	
					Pembinaan dan Pengawasan Pangan	Tersedianya pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan						100%	222,033,429			100%		100%	Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota	
					Pendampingan Petugas Pangan dalam Pemantauan MJAS (Makanan Jajanan Anak Sekolah)	Meningkatnya mutu dan kualitas makanan jajanan anak sekolah (%)	35%		51,500,000	45%	100,000,000	50%	133,750,000	55%	136,264,500.00	60%	138,826,273.00	60%	Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota	
					Sosialisasi Pengamanan Jajanan Anak Sekolah	Tersosialisasinya pengamanan jajanan anak sekolah		80%	51,500,000									100%	Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota	
					Pendampingan Petugas Pangan dalam Pemantauan MJAS (Makanan Jajanan Anak Sekolah)	Meningkatnya mutu dan kualitas makanan jajanan anak sekolah (MJAS)	35%			45%	100,000,000				136,264,500.00		138,826,273.00	60%	Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota	
					Monitoring dan Evaluasi Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS)	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS)						100%	133,750,000					100%	Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota	
					Pendampingan Petugas Pengelola Obat Tradisional dalam Pemantauan Usaha Jamu Gendong dan Usaha Jamu Racikan (%)	Meningkatnya kualitas pelayanan kefarmasian pada sarana pelayanan obat tradisional (%)	25%		-		-	50%	100,000,000	75%	101,880,000.00	100%	103,795,344.00	100%	Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota	
					Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Usaha Jamu Racikan dan Usaha Jamu Gendong	Tersedianya pembinaan, evaluasi dan pelaporan usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong						100%	100,000,000					100%	Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota	
					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Obat Melalui Sistem e-Catalog RS	Terlaksananya pengadaan obat sesuai petunjuk teknik melalui e-catalog (%)	80%		-	85%	52,075,000			-	95%	53,054,010.00	95%	54,051,425.00	95%	Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Obat Melalui Sistem e-Catalog RS	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan obat melalui sistem e-Catalog RS	80%			100%	52,075,000				53,054,010.00		54,051,425.00	100%	Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	Kab/Kota	
					Percepatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Perawatan	Meningkatnya mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas perawatan (%)	70%							85%	180,000,000.00	95%	250,000,000.00	95%	Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	Kab/Kota	
					Penerapan Pengembangan Software SIPNAP untuk Unit Layanan	Meningkatnya keterampilan petugas pelaporan SIPNAP di Apotek (%)	70%		-	80%	95,125,000		85%	74,250,000	90%	75,645,900.00	95%	77,068,043.00	95%	Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
					Penerapan Pelaporan Sistem Informasi Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP)	Meningkatnya pengetahuan peserta dalam mengaplikasikan Software SIPNAP				100%	47,000,000							100%	Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	Provinsi	
					Penerapan Pengembangan Software SIPNAP untuk Unit Layanan	Meningkatnya keterampilan petugas pelaporan SIPNAP di Apotek (%)	70%			80%	48,125,000		85%	74,250,000	90%	75,645,900.00	95%	77,068,043.00	95%	Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
			% Kualitas Pelayanan Kefarmasian pada Sarana Pelayanan Obat Tradisional		Pembinaan Sarana Industri Kecil Obat Tradisional	Terbinanya Sarana IKOT (%)	25%	30%	-	35%	27,800,000		50%	-	75%	28,322,640.00	100%	28,855,106.00	100%	Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
					Pembinaan Sarana Industri Kecil Obat Tradisional	Terbinanya Sarana Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) (%)	25%			35%	27,800,000				75%	28,322,640.00	100%	28,855,106.00	100%	Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang												100%	Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	Provinsi	
			% Kualitas Kefarmasian dalam Pengembangan Obat Asli Indonesia		Pembekalan Petugas Pengelola Obat Tradisional (OTRA) dalam Pengembangan Obat Asli Indonesia	Meningkatnya kualitas kefarmasian dalam Pengembangan Obat Asli Indonesia (%)	30%	50%	58,950,000	60%	-	65%	-	75%	60,058,260.00	80%	61,187,355.00	80%	Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	Provinsi	
					Pembekalan Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	Meningkatnya kualitas kefarmasian dalam Pengembangan Obat Asli Indonesia (%)	30%	50%	58,950,000						75%	60,058,260.00	80%	61,187,355.00	80%	Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	Provinsi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Mutu Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,202,925,000.00		3,700,645,396.00		2,291,014,387.00		2,711,109,063.00		3,081,162,413.00			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	797,800,000	100%	794,275,396	100%	813,000,000.00	100%	895,250,000.00	100%	984,000,000.00	100%	Subag Umum dan Kepegawaian; BKOM	Provinsi
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan	100%	100%	418,440,000	100%	814,745,000	100%	476,826,800.00	100%	488,000,000.00	100%	537,000,000.00	100%	Subag Umum dan Kepegawaian; BKOM	Provinsi
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	100%	143,345,000	100%	157,250,000	100%	123,898,000.00	100%	125,359,996.00	100%	126,839,244.00	100%	Subag Umum dan Kepegawaian; BKOM	Provinsi
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat / tamu	100%	100%	190,200,000									100%	Subag Umum dan Kepegawaian	Provinsi
					Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	100%	100%	366,800,000	100%	1,548,495,000	100%	632,505,000.00	100%	786,968,559.00	100%	809,520,187.00	100%	Subag Umum dan Kepegawaian; BKOM	Provinsi
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	99,900,000	100%	87,150,000	100%	83,035,000.00	100%	84,014,813.00	100%	250,000,000.00	100%	Subag Umum dan Kepegawaian; BKOM	Provinsi
					Penyediaan Bahan Kebersihan	Tersedianya bahan kebersihan	100%	100%	70,000,000									100%	Subag Umum dan Kepegawaian	Provinsi
					Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Tersedianya jasa dan bahan surat-menyurat	100%	100%	10,000,000	100%	23,880,000	100%						100%	Subag Umum dan Kepegawaian	Provinsi
					Pelayanan Administrasi Pengelolaan Aset Daerah	Terlaksananya pengelolaan aset daerah	100%	100%	18,025,000	100%		100%		100%	18,237,695.00	100%	50,000,000.00	100%	Subag Umum dan Kepegawaian	Provinsi
					Penyediaan Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya pencetakan dan penggandaan	100%	100%	33,550,000	100%	191,800,000	100%	36,749,587.00	100%	52,000,000.00	100%	57,000,000.00	100%	Subag Umum dan Kepegawaian; BKOM	Provinsi
					Monev Pengelolaan Aset Daerah Kab/Kota	Terlaksananya pengelolaan aset daerah di Kab/Kota	100%	100%	54,865,000	100%	83,050,000	100%	110,000,000.00	100%	52,000,000.00	100%	57,000,000.00	100%	Subag Umum dan Kepegawaian	Kab/Kota
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa dan bahan surat-menyurat	100%					100%	15,000,000.00	100%	39,278,000.00	100%	39,802,982.00	100%	Subag Umpeg, BKOM	Provinsi
					Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor								100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	BKOM	Provinsi
					Penyediaan Jasa Tenaga Kesehatan	Tersedianya jasa tenaga kesehatan								100%	120,000,000.00	100%	120,000,000.00	100%	BKOM	Provinsi
					Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			5,984,356,386.00		5,769,934,104.00		5,645,104,011.49		4,116,261,300.00		4,293,425,718.20			
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100%	100%	643,000,000	100%	883,500,000	100%	554,457,233.00	100%	560,999,827.00	100%	600,000,000.00	100%	Subag Umum dan Kepegawaian; BKOM	Provinsi
					Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	100%	2,536,231,057	100%	2,169,059,604	100%	1,523,267,778.49	100%	539,289,400.00	100%	650,000,000.00	100%	Subag Umum dan Kepegawaian; BKOM	Provinsi
					Pemeliharaan Rutin /Berkala Alat Kantor/Rumah Tangga	Terlaksananya pemeliharaan alat kantor/rumah tangga	100%	100%	135,900,000	100%	131,300,000	100%	108,000,000.00	100%	109,274,400.00	100%	300,000,000.00	100%	Subag Umum dan Kepegawaian; BKOM	Provinsi
					Pengadaan Alat Kantor/Rumah Tangga dan Mobiler	Terlaksananya pengadaan kantor, rumah tangga dan mobiler	100%	100%	501,988,329	100%	791,144,500	100%	1,352,520,000.00	100%	779,612,736.00	100%	815,539,595.20	100%	Subag Umum dan Kepegawaian; BKOM	Provinsi
					Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan, bahan kebersihan dan jasa cleaning service kantor	100%	100%	205,200,000	100%	263,539,000	100%	444,000,000.00	100%	515,239,200.00	100%	750,000,000.00	100%	Subag Umum dan Kepegawaian; BKOM	Provinsi
					Asuransi Gedung Kantor	Terselenggaranya asuransi gedung kantor	100%	100%	80,392,000	100%	80,701,000	100%	80,701,000.00	100%	81,653,273.00	100%	100,000,000.00	100%	Subag Umum dan Kepegawaian	Provinsi
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan roda dua dan roda empat operasional BKOM dan Eselon II Dinkes Provinsi Sulsel	100%	100%	198,600,000	100%	825,000,000	100%	700,000,000.00	100%	26,000,000.00			100%	Subag Umum dan Kepegawaian; BKOM	Provinsi
					Pengadaan Sport Centre	Tersedianya Sport Centre								100%	500,000,000.00			100%	BKOM	Provinsi
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan/Olahraga (BKOM)	Terlaksananya pemeliharaan alat kesehatan olahraga	100%	100%	55,000,000									100%	BKOM	Provinsi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
					Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Meningkatnya disiplin aparatur Tersedianya pakaian dinas PNS	100%	100%	189,650,000	100%	175,690,000	100%	288,368,000.00	100%	291,770,742.00	100%	350,000,000.00	100%	Subag Umum dan Kepegawaian; BKOM	Provinsi	
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Subag Umum dan Kepegawaian		
					Pertemuan Pengelola Program SDK	Terlaksananya pertemuan pengelola SDK	100%	100%	47,000,000										100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi
					Pendataan Kebutuhan Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis di RS Pemerintah	Terlaksananya pendataan kebutuhan tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis di RS Pemerintah	100%	100%	53,000,000										100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
					Pendataan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Asing di RS Pemerintah dan Swasta	Terlaksananya pendataan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Asing di RS Pemerintah dan Swasta	100%	100%	50,000,000										100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi dan Kab/Kota
					Pertemuan dalam rangka Fasilitasi Kebutuhan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Beban Kerja	Terlaksananya pertemuan dalam rangka fasilitasi kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan beban kerja	100%	100%	47,000,000										100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi
					Pertemuan Evaluasi Perhitungan Kebutuhan Tenaga Berdasarkan Beban Kerja	Terlaksananya pertemuan evaluasi perhitungan kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja	100%	100%	47,000,000										100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi
					Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program SDK	Terlaksananya pertemuan evaluasi pelaksanaan Program SDK	100%	100%	45,750,000										100%	Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Provinsi
					Pelatihan Pra Tugas Dokter/Dokter Gigi PTT	Terlaksananya pelatihan Pra Tugas Dokter/Dokter Gigi PTT	100%	100%	249,800,000	100%	188,500,000	100%	224,660,000.00	100%	227,310,988.00	100%	229,993,258.00	100%	100%	Subag Umum dan Kepegawaian	Provinsi
					Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Sulse	Terlaksananya pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi	100%	100%	301,125,000	100%	209,300,000	100%	235,550,000.00	100%	238,329,490.00	100%	241,141,777.00	100%	100%	Subag Umum dan Kepegawaian	Provinsi dan Kab/Kota
					Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terlaksananya penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	100%	100%	102,600,000	100%	52,200,000	100%	66,080,000.00	100%	66,859,744.00	100%	67,648,689.00	100%	100%	Subag Umum dan Kepegawaian	Provinsi
					Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan	Terlaksananya bimbingan teknis jabatan fungsional tenaga kesehatan	100%	100%	45,120,000			100%	67,500,000.00	100%	68,296,500.00	100%	69,102,399.00	100%	100%	Subag Umum dan Kepegawaian	Kab/Kota
					Ujicoba Akreditasi Puskesmas bagi Puskesmas Berprestasi	Terlaksananya ujicoba Akreditasi Puskesmas bagi Puskesmas Berprestasi	100%	100%	100,000,000										100%	Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar	Kab/Kota
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BKOM)	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur BKOM	100%	100%	350,000,000										100%	BKOM	Provinsi
					Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam rangka Pengembangan Kesehatan Olahraga	Terlaksananya pertemuan koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam rangka pengembangan Kesehatan Olahraga								100%	111,625,000.00	100%	120,000,000.00	100%	100%	BKOM	Provinsi
					Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	100		100		100		100		100			100%		
					Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD				736,221,914.00		514,711,189.00		1,185,638,577.00		1,245,923,204.00		1,209,276,896.80				
					Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	% Ketersediaan Profil Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota	100%	100%	198,806,914	100%	166,651,914	100%	218,375,000.00	100%	294,951,825.00	100%	223,559,055.80	100%	100%	Subag Program	Provinsi dan Kab/Kota
					Pengembangan Website Dinas Kesehatan Provinsi Sulse	Terupdatenya muatan Website Dinas Kesehatan Provinsi Sulse	100%	100%	41,341,914	100%	41,341,914	100%	45,000,000.00	100%	45,531,000.00	100%	46,068,265.80	100%	100%	Subag Program	Provinsi
					Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya pertemuan Tim Pokja Data dan Informasi Kesehatan	100%	100%	82,465,000	100%	75,310,000	100%	41,700,000.00	100%	42,192,060.00	100%	42,689,926.00	100%	100%	Subag Program	Provinsi
					Validasi dan Diseminasi Informasi Kesehatan	Terlaksananya validasi dan diseminasi informasi kesehatan	100%	100%	75,000,000	100%	50,000,000	100%	131,675,000.00	100%	133,228,765.00	100%	134,800,864.00	100%	100%	Subag Program	Provinsi dan Kab/Kota
					Pengembangan Komunikasi dan Publikasi Kesehatan Olahraga (Website)	Tersedianya Website Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM)								100%	74,000,000.00			100%	BKOM	Provinsi	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					Penyusunan Perencanaan Kesehatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kesehatan	8 Dokumen	8 Dokumen	198,575,000	8 Dokumen	285,639,275	8 Dokumen	341,554,154.00	8 Dokumen	345,584,493.00	8 Dokumen	349,662,390.00	8 Dokumen	Subag Program	Provinsi
					Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi program	100%	100%	79,050,000	100%	182,982,189	100%	158,137,353.00	100%	160,003,374.00	100%	161,891,414.00	100%	Subag Program	Provinsi
					Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan Kesehatan	Terlaksananya konsultasi dan pembinaan perencanaan kesehatan	100%	100%	60,000,000	100%	65,782,086	100%	131,675,000.00	100%	133,228,765.00	100%	134,800,864.00	100%	Subag Program	Provinsi
					Penyusunan Rencana Kerja (Forum SKPD)	Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel	100%	100%	59,525,000	100%	36,875,000	100%	51,741,801.00	100%	52,352,354.00	100%	52,970,112.00	100%	Subag Program	Provinsi
					Evaluasi Kinerja SKPD	Tersedianya LAKIP, LKPJ dan LPPD	3 Dokumen	3 Dokumen	51,270,000	3 Dokumen	29,400,000	3 Dokumen	23,350,000.00	3 Dokumen	23,625,530.00	3 Dokumen	23,904,311.00	3 Dokumen	Subag Program	Provinsi
						Tersedianya Laporan Keuangan Triwulan, Semester dan Tahunan	3 Dokumen	3 Dokumen	287,570,000	3 Dokumen	33,020,000	3 Dokumen	602,359,423.00	3 Dokumen	581,761,356.00	3 Dokumen	612,151,140.00	3 Dokumen	Subag Program	Provinsi
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya LPPD, LKPJ dan LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	100%	100%	51,270,000	100%	29,400,000	100%	23,350,000.00	100%	23,625,530.00	100%	23,904,311.00	100%	Subag Program	Provinsi
					Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan	Tersedianya laporan realisasi DPA SKPD setiap triwulan	100%	100%	32,820,000									100%	Subag Program	Provinsi
					Monitoring Hasil Tindak Lanjut LHP Kab/Kota	Terlaksananya monitoring hasil tindak lanjut LHP RSUD dan Dinkes Kab/Kota	100%	100%	180,000,000									100%	Subag Keuangan	Provinsi
					Konsultasi Tindak Lanjut LHP ke Pusat	Terlaksananya konsultasi LHP ke Pusat	100%	100%	24,000,000									100%	Subag Keuangan	Pusat
					Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Terlaksananya tindak lanjut hasil pemeriksaan	100%					100%	288,571,423.00	100%	136,593,000.00	100%	138,204,797.00	100%	Subag Keuangan	Provinsi
					Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan Olahraga (BKOM)	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi program	100%	100%	50,750,000			100%	82,841,000.00					100%	BKOM	Provinsi
					Pertemuan Monev bagi Pengelola Kesehatan Olahraga	Terlaksananya monitoring dan evaluasi bagi pengelola kesehatan olahraga								15 Kab/Kota	125,000,000.00	15 Kab/Kota	150,000,000.00	15 Kab/Kota	BKOM	Provinsi
					Monev Kesehatan Olahraga	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kesehatan Olahraga								24 Kab/Kota	131,000,000.00	24 Kab/Kota	132,545,800.00	24 Kab/Kota	BKOM	Kab/Kota
					Bimtek Pelaksanaan Kesehatan Olahraga di Kab/Kota	Terlaksananya bimbingan teknis pelaksanaan kesehatan olahraga di Kab/Kota								24 Kab/Kota	125,000,000.00	24 Kab/Kota	126,475,000.00	24 Kab/Kota	BKOM	Kab/Kota
					Peningkatan Kapasitas Dokter Puskesmas dalam Pelayanan Kesehatan Olahraga	Terlaksananya peningkatan Dokter Puskesmas dalam pelayanan kesehatan olahraga						100%	200,547,000.00					100%	BKOM	Provinsi
					Penyusunan Laporan Kinerja dan Anggaran	Tersedianya laporan realisasi DPA SKPD setiap triwulan dan Anggaran	100%			100%	33,020,000	100%	30,400,000.00	100%	64,168,356.00	100%	64,925,543.00	100%	Subag Program	Provinsi
									8,923,503,300.00		9,985,290,689.00		9,121,756,975.49		8,073,293,567.00		8,583,865,028.00			
						SUB TOTAL ADMINISTRASI PERKANTORAN			8,923,503,300.00		9,985,290,689.00		9,121,756,975.49		8,073,293,567.00		8,583,865,028.00			
						TOTAL			17,081,946,416.00		23,751,991,189.00		24,198,674,836.49		25,408,608,578.31		26,679,039,007.22			